

Radikalisme dan Stabilitas Daerah di Provinsi Gorontalo

**(Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Generasi Muda
dari Ancaman Paham Radikalisme)**

Roni Lukum

Radikalisme dan Stabilitas Daerah di Provinsi Gorontalo

**(Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Generasi Muda
dari Ancaman Paham Radikalisme)**



IP.020.07.2021

**Radikalisme dan Stabilitas Daerah di Provinsi Gorontalo:
Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Generasi Muda
dari Ancaman Paham Radikalisme**

Roni Lukum

Pertama kali diterbitkan pada Juli 2021

Oleh **Ideas Publishing**

Alamat: Jalan Ir. Joesoef Dalie No. 110

Kota Gorontalo

Surel: infoideaspublishing@gmail.com

Anggota IKAPI No. 001/GORONTALO/14

ISBN:

Penyunting :

Penata Letak : Siti Khumaira Dengo

Desainer Sampul: Ilham Djafar

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik dan mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, maupun dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

Daftar Isi

Kata Pengantar	vii
Prakata.....	xi

Bab I

Pendahuluan	1
A. Istilah Radikalisme.....	1
B. Faktor-Faktor Sosial Politik Gerakan Radikalisme.....	4

Bab II

Radikalisme dan Stabilitas di Daerah Provinsi Gorontalo	21
A. Darurat Radikalisme yang Harus Segera Diatasi.....	21
B. Gerakan Radikalisme di Gorontalo.....	24

Bab III

Pengetahuan Generasi Muda terhadap Paham Radikalisme dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah.....	33
A. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	34
B. Pemahaman (<i>Comprehension</i>)	44
C. Sikap (<i>Attitude</i>)	58

Bab IV

Penyebab Munculnya Radikalisme	119
A. Faktor-Faktor Terpaparnya Radikalisme pada Anak Muda	119
B. Saran untuk Pemerintah dalam Mengatasi Radikalisme	128

Bab V

Paradigma Makna Terorisme dan Radikalisme	137
A. Meluaskan Makna.....	139
B. Mewaspadai Terorisme	142
C. Gelombang Radikalisme.....	145

Bab VI

Analisis Potensi Radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Realitas Survei pada Kalangan Generasi Muda tentang Fenomena Potensi Radikalisme.....	157
A. Ideologi Sosialisme Komunis.....	158
B. Ideologi Fundamentalisme-Radikalisme	160

Bab VII

Rekomendasi dalam Mewaspadaai Masuknya Ideologi Radikalisme di Kalangan Generasi Muda di Provinsi Gorontalo.....171

- A. Pengetahuan Generasi Muda
terhadap Paham Ideologi Radikalisme.....173
- B. Pemahaman Generasi Muda
terhadap Paham Ideologi Radikalisme.....174
- C. Ketaatan Generasi Muda pada Paham Radikalisme.....177
- D. Rekomendasi pada Potensi Radikalisme
di Kalangan Generasi Muda di Provinsi Gorontalo178

Daftar Pustaka 185

Tentang Penulis 187

Kata Pengantar

Belajar dari Fenomena Radikalisme di Indonesia dan di Belahan Dunia Internasional Bentuk Sel Gerakan Terorisme Global

– Dekan FIS UNG Dr. Hj. Zulaicha Ngiu, M.Pd.

Radikalisme global melalui kegiatan gerakan aksi terorisme global yang terjadi di belahan dunia menjadi perhatian semua negara. Sebagaimana tragedi peledakan gedung WTC oleh kelompok teroris melalui pembajakan pesawat komersial yang ditabrakan kepada dua gedung yang ada di negara Amerika Serikat, yaitu gedung WTC dan pangkalan Militer Pentagon. Ini sebagai pertanda tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok terorisme global di bawah pentolan terorisme global, Usamah bin Laden (almarhum). Tragedi peledakan gedung WTC membuat warga dunia tersentak kaget bahwa betapa dahsyatnya ancaman terorisme global tersebut. Momentum peledakan kedua gedung tersebut menjadi titik awal negara *Super Power AS* memusuhi dan mengutuk tindakan gerakan terorisme global yang dikendalikan oleh Usamah bin Laden di negara Afghanistan.

Hentakan bom bunuh diri di beberapa negara yang menyerang fasilitas umum dan menjadi sasaran adalah warga negara AS dan sekutunya. Hal itu membuat dunia Internasional menganggap betapa berbahayanya gerakan ideologi teroris tersebut melalui pemahaman awal paham radikalisme global yang ditanamkan oleh kelompok garis keras Alqaeda dan gerakan ISIS di bawah komando Abubakar Albaghdadi (almarhum) yang sekarang diganti oleh Abdullah Qurdassh Amir Mohamed Saied Abdulrahman. Gerakan radikalisme global yang diikuti dengan aksi gerakan teroris membawa pengaruh sampai di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.

Aksi-aksi sel terorisme global dilakukan oleh generasi muda kita seperti peledakan bom bunuh diri di Pantai Kuta Bali, hotel Mariot, dan di fasilitas umum yang ada di DKI Jakarta, menunjukkan sel gerakan terorisme global telah memengaruhi pola pikir generasi muda kita untuk berpartisipasi dalam menjalankan misi gerakan radikalisme global melalui bentuk kegiatan teroris. Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok teroris dari warga negara Indonesia yang direkrut oleh Dr. Azhari dan Nurdin M. Top. kewarganegaraan Malaysia merupakan betapa cepatnya paham radikalisme global tersebut memengaruhi *mindset* pemikiran generasi mudah kita, seperti M. Rozi, Imam Samudera, Santoso dalam kegiatan teroris dan melakukan aksi bom bunuh diri di fasilitas umum dan tempat wisata di Indonesia.

Kegiatan aksi dari kelompok teroris di Indonesia telah memengaruhi pariwisata mancanegara berkurang mengunjungi Pulau Bali sebagai kota pariwisata dunia. Motivasi yang berkurang warga dunia untuk berkunjung ke Indonesia telah merugikan sumber pendapatan negara kita melalui sektor pariwisata. Awalnya, para analis menuding bahwa negara tetangga kita melalui Dr. Azhari dan Nurdin M. Top sengaja dikirim oleh pemerintah Malaysia dalam merusak pendapatan pariwisata kita. Akan tetapi, ternyata di negara Malaysia pun diguncang oleh bom bunuh diri, sama dengan negara Indonesia sehingga hipotesis bahwa Dr. Azhari dan Nurdin M. Top masuk kenegara kita sengaja menghancurkan sektor pariwisata terbantahkan. Aksi yang dilakukan bukan hanya bertujuan merusak tatanan ekonomi, sosial, kemananan. Misi utamanya adalah memusuhi siapa saja negara yang menjalin hubungan kerja sama dengan negara Amerika Serikat dan sekutunya.

Namun, dalam perjalanannya aksi teroris berubah pikiran tidak hanya mencari warga negara Amerika Serikat dan sekutunya, justru aksi teroris ingin menghabisi aparat polisi dan TNI. Mereka menganggap polisi sebagai Thogut sebagai musuh dari kelompok teroris. Perubahan pola gerakan teroris menunjukkan aksi gerakan teroris sama sekali tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam yang selama ini dijadikan doktrin dalam mencari dan mencuci otak generasi mudah untuk dapat berpartisipasi dalam melakukan aksi bom bunuh diri.

Pola perubahan gerakan teroris terhadap aksi-aksinya bahwa gerakan teroris sama sekali tidak membawa misi agama Islam dalam memperjuangkan ajakan jihad. Jihad dalam agama Islam dilakukan berada di medan perang, bukan dilakukan warga negara suatu negara dalam keadaan aman, sementara menikmati kebebasan di tempat pariwisata, sementara beribadah di masjid, gereja, wihara tiba-tiba diledakan dengan cara mortir bom bunuh diri. Sungguh perbuatan teroris sangat tidak manusiawi dan sangat dilarang oleh agama mana pun di dunia ini.

Islam melarang menganiaya dan membunuh sesama manusia. Dengan fakta-fakta yang ditunjukkan oleh aksi terorisme global, di mana pun di belahan dunia sampai di negara Indonesia sangat bertentangan dengan keyakinan ajaran agama mana pun di dunia. Apalagi agama Islam yang selalu menganjurkan kedamaian dalam menghadapi segala perbedaan. Berbeda dengan ideologi terorisme yang mengatasnamakan agama Islam. Semua aksi-aksi gerakan terorisme global di mana pun di belahan dunia, termasuk Indonesia di luar apa yang diajarkan dalam syariat Islam.

Berdasarkan fakta-fakta aksi gerakan radikalisme di belahan dunia, termasuk Indonesia, untuk tidak diikuti oleh generasi muda kita, khususnya generasi mudah di daerah Provinsi Gorontalo. Sehingga penting kita melakukan revisi kurikulum di perguruan tinggi untuk memasukan mata kuliah Radikalisme di semua jurusan dan program studi. Melalui perubahan kurikulum memasukan MKDU mata kuliah Radikalisme dapat mencegah generasi muda kita akan terpapar paham radikalisme global.

Demikian kajian akademik saya akan bahaya ancaman radikalisme global sebagai sumbangan pemikiran dalam buku yang disusun dengan judul *Radikalisme dan Stabilitas Daerah Provinsi Gorontalo: Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Generasi Muda dari Ancaman Paham Radikalisme*. Saya selaku Dekan FIS mendukung secara moril akan kehadiran buku ini sebagai referensi bagi mahasiswa dalam mengkaji ideologi radikalisme sebagai musuh bersama negara-negara di dunia Internasional, termasuk negara RI. Semoga buku ini akan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam mencegah generasi muda kita terpapar paham radikalisme, khususnya di lingkungan perguruan tinggi di wilayah Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, Maret 2021
Dekan FIS UNG

Prakata

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul *Radikalisme dan Stabilitas Daerah Provinsi Gorontalo: Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Generasi Muda dari Ancaman Paham Radikalisme*. Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyosialisasikan ancaman paham radikalisme negatif global yang sangat meresahkan masyarakat Internasional, termasuk negara Indonesia. Betapa bahayanya jika generasi muda kita terpapar paham radikalisme negatif global.

Dalam menyelesaikan penulisan buku ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil demi kelancaran dari penulisan buku ini sampai dengan selesai. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Rektor UNG Dr. H. Edwart Wolok, S.Pt., M.T., yang mendukung baik moril maupun materil melalui dukungan Surat Keputusan dan penganggaran dalam melakukan survei di lokasi penelitian.
2. Kepala Perpustakaan UNG Dr. Ismet Sulila, M.Si., yang telah membantu menerbitkan buku ini melalui dana RBA Perpustakaan UNG.
3. Prof. Dr. H. Rauf Hatu, M.Si., sebagai pembanding di dalam kegiatan bedah buku, dan memberikan saran dan perbaikan pada tulisan buku ini.
4. Ketua LP3M UNG Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si., yang telah memberikan rekomendasi dalam melakukan survei terhadap objek yang dijadikan sebagai fokus penelitian.
5. Dekan FIS Dr. Zulaicha Ngiu, M.Pd., yang telah memberikan dukungan moril dan materil dalam penulisan buku ini.
6. Wakil Dekan I FIS Dr. Rahmatia Kiyai, M.Si., yang telah memberikan rekomendasi penelitian dalam mempermudah terhadap penulisan buku ini.
7. Wakil Dekan II FIS Drs. Joni Apriyanto, M.Hum., yang telah memberikan dukungan materil dalam penyusunan buku ini.
8. Ketua Jurusan PPKn Rasid Yunus, S.Pd., M.Pd., dan Sekretaris Jurusan PPKn Ramli Mahmud, S.Pd., M.A., yang telah memberikan dukungan terbitnya penulisan buku ini.
9. Kasub Perpustakaan Hans Ruchban, S.Pd., yang telah membantu pelaksanaan Bedah Buku di perpustakaan UNG.

10. Panitia Bedah Buku yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Bedah Buku (Sekertariat Panitia Bedah buku).
11. Terakhir, kepada keluarga penulis yang setia menemani dalam melaksanakan tugas di lapangan, Hj. Hartati Latif, S.Pd., Silvana Nur Rahmat Lukum, dan Silvani Nur Rahmat lukum.

Demi kesempurnaan buku ini diharapkan kepada semua pihak yang telah membaca buku ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penyempurnaan buku. Penulis menyadari masih banyak yang belum dapat dianalisis dalam melengkapi kajian dalam buku ini. Untuk kesempurnaan buku ini, akan dilakukan penulisan kembali pada episode jilid berikutnya bila ada masukan dari semua pihak. Karena penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih banyak hal yang belum dapat diakomodasi dalam menilai dan mengevaluasi pelaksanaan upaya pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam mencegah generasi muda kita terhadap pengaruh paham ideologi radikalisme. Dengan kesadaran inilah penulis sekali lagi berharap masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif guna penyempurnaan penulisan buku ini. Atas partisipasi dari semua pihak di dalam menyempurnakan penyusunan buku ini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga kontribusi dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan buku ini akan mendapatkan balasan dari Sang Pencipta.

Apa yang dituliskan dalam buku ini tidak lain membantu pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam mencegah terpaparnya generasi muda dari pengaruh paham ideologi radikalisme. Dengan berdasarkan data dan fakta di daerah Provinsi Gorontalo generasi muda kita telah terpapar paham radikalisme sekalipun masih dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman generasi muda akan pembenaran aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan terorisme global. Pengetahuan dan pemahaman awal ini akan menjadi cikal bakal aksi kegiatan teroris di daerah Provinsi Gorontalo.

Harapannya agar pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dan lembaga pendidikan formal perguruan Tinggi yang ada di daerah Gorontalo untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah generasi muda kita terpapar paham radikalisme negatif global. Jangan sampai generasi muda kita terlibat aksi-aksi gerakan terorisme global. Bila ini terjadi di daerah Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang paling aman, itu berarti pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang ada di daerah Gorontalo tidak sigap akan ancaman bahaya laten paham ideologi radikalisme negatif global.

Gorontalo, Juli 2021
Penulis

Bab I

Pendahuluan

A. Istilah Radikalisme

Istilah Radikalisme masih menjadi perdebatan bagi berbagai kalangan. Apakah radikalisme sama dengan bentuk pemikiran ekstrimisme? Ataukah radikalisme sama dengan gerakan teroris atau gerakan separatisme? Permasalahan berikutnya adalah apakah radikalisme itu merupakan fakta atau fatamorgana di Indonesia?

Bila radikalisme dianggap sebagai fakta kegiatan radikalisme seperti apa bentuknya, jangan sampai pemerintah kita salah menetapkan siapa pelaku gerakan radikalisme. Ataukah radikalisme hanya merupakan pengalihan isu pemerintah ketika pemerintah gagal dalam menyelesaikan tujuan bernegara sebagaimana apa yang menjadi tujuan berdirinya negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Dapat dikatakan bahwa kegiatan radikalisme hanya merupakan fatamorgana yang dianggap sebagai hantu bagi pemerintah yang gagal melaksanakan tujuan bernegara.

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang muncul di kalangan masyarakat umum, bahkan di kalangan perguruan tinggi. Bagi kalangan perguruan tinggi, istilah radikalisme merupakan gerakan perubahan yang mendesak negara dalam mewujudkan cita-cita negara sebagaimana yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana tujuan

pendirian negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Komitmen pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memunculkan pemikiran kritis di kalangan mahasiswa untuk mendesak pemerintah dalam mewujudkan cita-cita tujuan pendirian negara tersebut. Di mana-mana selalu ada gerakan mahasiswa melakukan aksi, baik itu melalui gerakan orasi di kampusnya maupun melalui gerakan unjuk rasa menyampaikan koreksi kepada pemerintah tentang apa yang belum dilakukan oleh pemerintah. Ada pula koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan perundang-undangan yang ada.

Bila gerakan perubahan ini dinilai sebagai gerakan radikalisme oleh pemerintah, maka pemerintah salah dalam mengimplimentasikan larangan radikalisme. Dengan kasus ini, pemerintah selalu dinilai salah bagi kalangan akademisi karena sebaiknya negara melalui pemerintah harus berhati-hati menetapkan larangan di kalangan mahasiswa maupun di kalangan para akademisi. Hal ini karena gerakan mahasiswa dan para akademisi murni dalam melakukan fungsi mekanisme *checks and balances* (pengawasan dan penyeimbang) pemerintah bila pemerintah tidak komitmen dalam melaksanakan Pancasila dan konstitusi tertulis, yakni UUD NRI 1945. Untuk itu, diperlukan batasan bagaimana melaksanakan gerakan pemerintah dalam mencegah kegiatan radikalisme di Indonesia.

Bila dilihat dari pemahaman pengertiannya, radikalisme berasal dari kata “radik”, artinya berpikir yang mendalam atau berpikir dari akarnya permasalahan. Dengan demikian, istilah radikalisme dapat diartikan sebagai gerakan perubahan menghendaki adanya tindakan cepat dalam menangani

permasalahan bangsa dan negara. Dengan melihat ini mengapa pemerintah melakukan pelarangan kepada mereka yang memiliki pemikiran yang berseberangan dengan pemerintah yang mewakili negara.

Dengan fenomena di atas, dapat dideskripsikan sesungguhnya yang dituduh radikalisme itu siapa, apakah pemerintah atau warga negara. Bila pertanyaan ini yang kita pertanyakan pelarangan tentang radikalisme dapat kita batasi. Oleh karena itu, radikalisme diperlukan bila gagasan yang digunakan untuk melakukan kritikan pada negara atas dasar konstitusi dan tidak melenceng dari dasar negara kita Pancasila sebagai dasar negara. Pemikiran kritis warga negara diharapkan dalam mengawal negara.

Dengan pemikiran kritis dalam mengkritik kebijakan negara ini sering ditafsirkan sebagai pemikiran radikal oleh negara. Inilah yang keliru pada respons negara terhadap penanganan radikalisme di Indonesia. Maka dari itu, perlu diperjelas bentuk gerakan radikalisme seperti apa yang seharusnya dilarang untuk dilakukan oleh warga negara di dalam mengimplementasikan Pasal 28 UUD NRI 1945 dalam menyalurkan pikiran dan tulisannya di depan publik. Jawabannya, bila gerakan radikalisme keluar dari *legal standing* Pancasila dan konstitusi tertulis UUD NRI 1945, gerakan itu dianggap sebagai gerakan radikalisme yang bernilai negatif atau pro dengan gerakan yang dilarang di dalam perundang-undangan. Misalnya, yang terdapat dalam KUHP tentang ujaran kebencian (*hate speech*), melakukan kegiatan jihad dengan membunuh sesama warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertentangan dengan Undang-Undang Teroris dsb.

Dengan demikian terminologi dari istilah radikalisme dapat dilihat dari dua dimensi, yakni ada radikalisme positif, ada juga gerakan pemikiran dan perbuatan radikalisme negatif.

Gerakan pemikiran radikalisme negatif melahirkan gerakan separatisme, gerakan teoris atau gerakan pandalisme, atau membentuk ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Contohnya, ideologi komunis (menghidupkan kembali partai PKI), keinginan melaksanakan sistem khilafah, masuk sebagai anggota organisasi ISIS yang membentuk negara sendiri. Bentuk pemikiran dan tindakan dari pemikiran radikalisme negatif inilah yang menjadi musuh bersama negara dan juga musuh bersama warga negara Indonesia saat ini.

Dengan jawaban yang membuat polemik dari gerakan radikalisme yang dicanangkan pemerintahan Jokowi dapat memberikan batasan siapa saja yang dianggap sebagai pelaku gerakan radikalisme negatif untuk dilakukan tindakan deradikalisasi atau penangkapan, serta penahanan sebagai wujud tindakan gerakan makar tersebut yang bertentangan dengan undang-undang di negara kita. Bagi mereka yang melakukan gerakan radikalisme pada dimensi positif, tidak harus dipersekusi atau dikriminalisasi oleh negara. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa dan para akademisi yang berseberangan dengan pemerintah tidak dapat disamakan dengan gerakan radikalisme negatif. Tidak boleh dituduh sebagai gerakan makar oleh negara karena semua pemikiran atau gerakan itu didasarkan atas landasan konstitusional. Sebagaimana yang ada pada pasal 28 UUD NRI 1945 tentang kebebasan mengeluarkan pikiran dan berorganisasi.

B. Faktor-Faktor Sosial Politik Gerakan Radikalisme

Saat ini, gerakan dalam bentuk mengontrol negara dianggap makar, seperti organisasi yang baru digagas oleh para tokoh-tokoh masyarakat, baik dari kalangan akademisi (Rocky Gerung, Dr. Rizal Ramli, Dr. Refli Harun, Prof. Dr. Din

Syamsudin, dkk.) maupun salah satu purnawirawan TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mantan Kasad pada saat mendeklarasikan organisasi KAMI (Koalisi Menyelamatkan Indonesia). Dalam pernyataan sikap, mereka menyampaikan koreksi terhadap kondisi bangsa dan kebijakan pemerintah Jokowi yang dianggap belum optimal dalam mewujudkan cita-cita pembentukan negara Republik Indonesia sesuai amanah konstitusi.

Berdasarkan kajian akademik di atas, sesungguhnya pelaku tindakan radikalisme pada dimensi negatif itu tidak hanya ada pada warga negara, tetapi juga bisa dilakukan pemerintah yang mewakili negara (oknum), dan juga bukan ada pada para ulama yang istikamah menerima ideologi Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Bagi ulama yang tidak komitmen pada ideologi Pancasila itu yang dapat dianggap sebagai gerakan radikalisme negatif. Artinya, bila oknum ulama tersebut ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah, baru dapat dianggap sebagai gerakan radikalisme negatif. Namun, sepanjang oknum ulama mengoreksi pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan negara Pancasila berdasarkan konstitusi, itu tidak dianggap sebagai gerakan radikalisme negatif. Oleh karena itu, tindakan pemerintah dalam menangani gerakan radikalisme di Indonesia harus lebih berhati-hati. Pemerintah bisa memilih dan memilah dalam melakukan tindakan pengamanan bagi mereka yang dituduh melakukan tindakan makar atau bentuk radikalisme negatif.

Bila ini tidak diperhatikan oleh pemerintah pasti akan mengganggu stabilitas sosial, politik, dan keamanan bagi negara kita yang kita bangun bersama atas dasar negara Pancasila sebagaimana yang ada dalam konstitusi UUD 1945. Dasar filosofis dari pembentukan negara pancasila adalah negara yang menghargai segala perbedaan di antara warga

negara. Negara Pancasila pun sangat menghargai kebebasan dalam membentuk organisasi dan menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Dengan catatan, pembentukan organisasi dan penyampaian pendapat di muka umum tidak bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi sebagai penjabaran dari nilai instrumental dasar negara melalui ideologi Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara.

Bagi kasus oknum ulama tentang penerimaan ideologi Pancasila sebagai dasar negara menggantikan ideologi khilafah tentang penerapan ajaran Islam secara *khafah*, ini masih menjadi polemik. Akan tetapi, Pancasila setelah melewati konsensus nasional dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh badan *konstituante* (DPR), seharusnya telah mewakili aspirasi sebagian oknum ulama yang menghendaki ideologi khilafah. Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung makna negara kita sebagai negara yang beragama, bukan negara agama atau negara teokrasi. Sebetulnya, makna ini mengamanatkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan agamanya. Tidak harus dituntut negara Republik Indonesia harus disamakan dengan negara Arab Saudi sebagai negara teokrasi. Namun, nilai-nilai keagamaan telah menjadi dasar dari kebijakan negara kita dalam melaksanakan pembangunan.

Bila polemik ini yang masih disuarakan oleh sebagian ulama untuk menghidupkan kembali piagam Jakarta, dapat dianggap oleh negara sebagai gerakan radikalisme negatif. Akan tetapi, ide mengembalikan piagam Jakarta merupakan pemikiran radikalisme dalam hal melihat kondisi sosial dan ekonomi negara kita yang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Muncullah gerakan Islam garis keras yang juga didukung oleh partai politik yang ingin mengoreksi negara saat ini yang gagal membawa kepada kesejahteraan sehingga partai

yang mendukung ide tersebut dianggap partai radikal. Padahal, pemikiran radikal yang disampaikan partai politik dan ulama tersebut itu positif. Pemikiran tersebut lahir karena ideologi Pancasila tidak konsisten dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, di negara kita masih marak kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, seperti pelaku korupsi, pelaku pengedaran miras, pelaku prostitusi, dan sebagainya. Dengan fakta-fakta sosial yang ada saat ini, para ulama ada yang menghendaki pemerintah dan lembaga legislatif meninjau kembali terhadap dasar negara kita yang bersumber dari ideologi Pancasila.

Demikian juga dengan pelaksanaan nilai sila kelima Pancasila di mana negara diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh wilayah yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Justru, pembangunan yang dilakukan oleh negara melalui kebijakan yang didasarkan pada sistem perundang-undangan tidak sesuai dengan nilai keadilan sosial. Terlahirlah gerakan radikalisme, seperti gerakan separatis OPM dan GAM di zaman Orde Baru. Saat ini pun gerakan OPM melalui bentuk kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selalu mengintimidasi rakyat Papua dengan harapan negara RI rela melepaskan provinsi Papua dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sikap radikalisme yang ditunjukkan oleh gerakan tersebut sebenarnya beralasan, tetapi kelompok OPM melalui kegiatan KKB dengan cara merusak dan mengintimidasi warga masyarakat Papua ini bertentangan dengan undang-undang. Namun, sikap protes yang mereka sampaikan kepada pemerintah ada benarnya. Kelompok OPM menuntut pemerintah mengimplementasikan sesuai dengan perintah dasar negara pada sila kelima Pancasila dan apa yang ada di dalam konstitusi UUD NRI 1945 sesuai Pasal 18 UUD NRI 1945 tentang Pelaksanaan Sistem Desentralisasi atau Otonomi

Daerah. Justru, pemerintah pusat di zaman orde baru melakukan kebijakan melalui UU pemerintahan daerah No. 5 Tahun 1974 dengan sistem sentralisasi. Inilah titik awal terjadi gerakan pemikiran radikalisme dan diwujudkan dalam tindakan gerakan separatisme melalui kelompok GAM dan OPM.

Dengan kesadaran pemerintah reformasi, kebijakan UU pemerintahan daerah yang berlangsung kurang lebih 25 tahun dicabut oleh pemerintah reformasi dan diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu UU. No 22 Tahun 1999 dengan sistem desentralisasi. Sejak diberlakukan undang-undang desentralisasi di era reformasi inilah sedikit menekan gerakan radikal yang dilakukan oleh kelompok warga negara Indonesia untuk mendirikan negara baru. Akan tetapi, saat ini, untuk wilayah Provinsi Papua masih bermasalah dalam menerima Papua bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan gerakan radikalisme di atas, keinginan Papua ingin keluar dari pangkuan ibu pertiwi negara kesatuan Republik Indonesia pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Jokowi menjawab segala apa yang diinginkan rakyat Papua, seperti pembangunan jalan tol Papua dan lagi pula Papua diperlakukan dengan UU Otsus (otonomi khusus) bagi Provinsi Papua dan pemerintah Aceh. Dengan kebijakan tersebut, rakyat Aceh dan Papua tidak lagi menyuarakan keinginan untuk mendirikan negara sendiri. Akan tetapi, untuk Papua hingga saat ini kelompok OPM dan KKB masih menyuarakan mendirikan negara baru.

Fakta-fakta sosial politik di atas menunjukkan siapa yang memulai dan memicu gerakan radikalisme berkembang di masyarakat kita. Apalagi untuk rakyat Papua diprovokasi oleh negara-negara lain yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan Papua didukung oleh

negara Australia, negara Inggris, bahkan ada indikasi negara AS pun mencoba mengutak-atik kemauan dari kelompok KKB (sayap OPM).

Dengan melihat fakta sosial politik pada kelompok KKB di atas, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi kebijakan yang disesuaikan dengan amanah dasar negara dan konstitusi. Artinya, pemerintah tidak hanya melihat gerakan separatisme tersebut sebagai bagian dari bentuk gerakan radikalisme. Pemerintah pusat harus memahami apa yang disuarakan oleh kelompok OPM melalui KKB sebagai sebuah bentuk protes bahwa pemerintah belum menyentuh sendi-sendi dasar yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Dengan kesadaran ini, pemerintah tidak salah bertindak dalam merespons gerakan radikalisme (OPM/KKB) saat ini. Kami setuju bila pemerintah Jokowi tidak melakukan apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan merespon pemikiran radikal yang dilakukan oleh kelompok garis keras Papua (KKB/OPM) dengan tindakan represif dengan menerapkan darurat militer untuk Papua. Namun, pemerintah Jokowi menjawab gerakan radikalisme warga Papua dengan tindakan yang pro dengan keinginan rakyat Papua melalui tindakan atau pendekatan kesejahteraan. Misalnya, memperkuat implementasi Otsus Papua dan membangun infrastruktur dasar yang diinginkan warga Papua dengan membangun jalan tol Papua, menyamakan harga BBM sama dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia dengan sistem satu harga BBM. Bukan hanya itu yang dilakukan pemerintah Jokowi dalam menjawab gerakan radikal OPM. Jokowi sangat getol dalam mewujudkan keadilan sosial, seperti mengangkat warga Papua sebagai menteri, dan sebagainya.

Melalui fakta sosial politik di atas seharusnya sikap negara atau pemerintah pusat kepada warga negaranya jangan salah menindak gerakan radikalisme. Bisa saja apa yang dituduhkan

oleh pemerintah kepada kelompok yang melakukan gerakan radikalisme itu ada benarnya. Sebagaimana yang terjadi pada kelompok OPM dan GAM di atas, apalagi ada WNI yang mengoreksi kebijakan pemerintah melalui media sosial, lalu berujung di kepolisian dan kejaksaan. Padahal pemikiran radikal yang mengoreksi kebijakan negara yang tidak sesuai dengan amanah dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945 tidak disamakan dengan gerakan radikalisme negatif yang harus diproses sesuai dengan perundang-undangan dalam melaksanakan perintah konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan sebagai negara kekuasaan. Implementasi negara hukum adalah pemerintah dalam menghadapi gerakan radikalisme jangan sampai bertentangan dengan konstitusi tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum. Sebagaimana yang tertuang dalam konstusi pasal 28 UUD NRI 1945. Artinya, pemerintah jangan melakukan kriminalisasi pada kelompok mahasiswa dan akademisi ketika mengoreksi dan mengkritik pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik di negara ini.

Dengan fakta sosial politik di atas, sudah saatnya kita memberikan batasan mana kelompok kegiatan radikalisme yang tidak dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dan mana yang dapat dilakukan. Fakta sosial politik di atas menjawab polemik siapa pelaku radikalisme di Indonesia apakah negara atau warga negara. Namun, fakta sosial politik di atas, baik itu negara maupun warga negara dilarang untuk melakukan gerakan radikalisme negatif yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dengan demikian, seharusnya tuduhan radikalisme negatif itu baru dapat ditindaki bila aksi dan perbuatan itu sudah merusak tatanan sosial, infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas negara, mengancam keselamatan keamanan

warga negara. Pesan yang dapat disampaikan dari identifikasi pelaku radikalisme negatif kepada seseorang baru dapat dituduh gerakan radikalisme negatif bila sudah berbuat dan berdampak kepada kehidupan sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan negara. Artinya, radikalisme bisa ada pada warga negara bila masih dalam tataran konsep atau paradigma, belum dapat dikenakan tindakan hukum. Dengan kebebasan orang berparadigma dan berpikir radikal akan membantu memperbaiki perjalanan kebijakan pemerintahan. Pemikiran radikalisme negatif yang saat ini berjalan pun belum bisa ditindaki oleh aparat karena baru sebatas ide-ide yang ada pada warga negara. Terkecuali ide negatif tadi telah dilakukan, misalnya melakukan bom bunuh diri di tempat umum. Ini yang dapat dikenakan tindakan. Oleh karena itu, perlu upaya pencegahan dini terhadap pelaku kejahatan radikalisme pada generasi muda kita yang terpapar oleh paham radikalisme negatif. Seseberapa mungkin dilakukan tindakan deradikalisasi kepada warga negara yang terpapar paham radikalisme negatif.

Dalam implementasi radikalisme di Indonesia terkadang mengalami anomali pada pelaksanaan tindakan kepada mereka yang melakukan gerakan radikalisme negatif dibandingkan bila negara dalam hal ini eksekutif dan DPR mendukung implementasi ideologi liberal. Di mana pemerintah RI sejak tahun 1967 telah menyepakati *free market* (pasar bebas) melalui penandatanganan MoU dengan WTO, IMF, dan *World Bank*, negara tidak berbuat apa-apa karena pelakunya negara. Padahal, bekerja sama dengan WTO, IMF, dan *World Bank* ini sama dengan kita mengganti sistem ekonomi Pancasila dengan sistem ekonomi liberal. Bila dibandingkan dengan warga negara yang melakukan pemikiran radikal dianggap melakukan gerakan radikalisme dan ditindaki oleh negara atau aparat hukum. Misalnya, menghidupkan ideologi komunis,

ideologi khilafah selalu dianggap sebagai gerakan radikalisme negatif. Mengapa ketika negara melakukan praktik pasar bebas tidak dikoreksi oleh pemerintah? Bisa dikatakan, sesungguhnya oknum pemerintah pun dapat dituduh sebagai pelaku gerakan radikalisme negatif.

Berdasarkan fenomena tentang apa sesungguhnya gerakan radikalisme itu, siapa pelaku radikalisme, apakah warga negara, ataukah pemerintah, semua ini harus dicari dasar pijakan dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai perbuatan yang melakukan gerakan radikalisme. Ketidakpastian batasan gerakan radikalisme di Indonesia selalu membuat polemik pada warga negara Indonesia. Akhirnya, ketika negara atau dalam hal ini pemerintah melakukan tindakan melalui organ negara TNI dan Polri, selalu berbenturan dengan gerakan mahasiswa ataupun kelompok akademisi. Terkadang, negara bertindak represif terhadap kalangan yang dianggap radikal. Padahal, kelompok itu melakukan aktivitas positif dalam mengoreksi kebijakan negara yang dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga kehidupan demokrasi di negara kita diabaikan oleh negara yang menjalankan tindakan represif tersebut.

Dengan adanya polemik pada penilaian gerakan radikalisme, di Indonesia perlu dihadirkan RUU Radikalisme. Memang ide ini sudah ada, seperti RUU Keamanan yang pernah diusulkan negara dan UU Supersif di zaman Orde Baru. Akan tetapi, semua ini ditentang oleh kalangan mahasiswa dan para akademisi karena bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 tentang Kebebasan Berserikat dan Berkumpul dalam Mengeluarkan Pikiran. Substansi RUU dan UU terlalu mengedepankan pada tindakan penahanan kepada mereka yang dianggap melakukan gerakan subversif, seperti melarang mahasiswa melakukan unjuk rasa dan melarang mengkritik kebijakan negara. Padahal, substansi RUU atau undang-undang

seharusnya menghormati prinsip negara demokrasi sebagaimana yang telah diamanatkan melalui dasar negara Pancasila dan sebagai instrumennya adalah konstitusi dan perundang-undangan.

Berangkat dari fakta-fakta sosial, politik, dan hukum di atas tentang penanganan radikalisme di Indonesia yang selalu keliru dalam tindakan penanganan, perlu dicarikan solusi dalam mengatasi gerakan radikalisme di Indonesia yang dianggap membahayakan stabilitas keamanan negara. Solusinya adalah warga negara Indonesia dibiarkan dengan kebebasan dalam melakukan koreksi kepada negara sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Bila dilihat, kesadaran hukum dan kesadaran politik warga negara saat ini sudah semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya gerakan mahasiswa dan para akademisi yang mengoreksi kebijakan negara yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, kebijakan negara yang lebih menguntungkan sepihak dengan membentuk kelompok oligarki yang hanya menguntungkan para elit-elit yang mendukung pemerintahan. Tidak menjadi masalah bila terjadi partai yang pro dengan pemerintah; yang harus dikoreksi adalah bila partai politik pro terhadap kebijakan pemerintah yang menguntungkan sepihak dan mengabaikan kesejahteraan rakyat.

Kita ketahui bahwa partai politik punya peran besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah karena semua kebijakan negara selalu atas persetujuan DPR sebagai wakil partai politik. Bila partai politik pendukung pemerintah sudah 75% atau 90% didukung oleh partai sebagai pengusung presiden, maka kebijakan ini bisa saja tidak akan berpihak kepada kepentingan rakyat, lebih merepresentasikan kepada kepentingan oligarki. Bila pengambilan keputusan di DPR RI dilakukan secara aklamasi ataupun *voting*, selalu dimenangkan kelompok mayoritas sehingga yang terjadi adalah tirani

mayoritas dalam merumuskan kebijakan negara, baik itu produk RUU maupun kebijakan pemerintah. Inilah yang menjadi sumber dari gerakan radikalisme di kalangan generasi muda khususnya mahasiswa dan di kalangan para akademisi di Indonesia. Namun, gerakan mahasiswa dan para akademisi dijawab dengan tindakan kriminalisasi oleh organ negara kepada kelompok yang melakukan kritik kepada kebijakan negara. Contohnya, oknum polisi yang melakukan penangkapan dan penahanan pada sekelompok akademisi dan mahasiswa ketika menyuarakan penolakan terhadap rancangan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, seperti penolakan terhadap RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila), RUU Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja), dan lain-lain.

Harapan kita pemerintah tidak salah melakukan tindakan penahanan kepada kelompok aktivis. Gerakan aktivis merupakan representasi dari *civil society* yang justru diharapkan oleh kelompok masyarakat, baik yang diwakili oleh organisasi kemasyarakatan maupun perorangan, harus menyuarakan koreksi kepada pemerintah bila pemerintah salah atau sengaja mengabaikan konstitusi dan mengeluarkan kebijakan. Fakta ini sudah terjadi di era reformasi, seperti RUU HIP yang diusulkan oleh Fraksi PDIP ditentang oleh ulama dan mahasiswa dan para akademisi karena RUU HIP menghendaki tumbuh kembali pemikiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 hasil pemikiran Soekarno tentang Tri Sila dan Eka Sila. Padahal, pembicaraan Pancasila sebagai ideologi negara sudah selesai dibahas dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dirumuskan melalui pembukaan UUD 1945 yang substansi dasarnya menjadi lima sila dengan dasar bernegara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang berkebudayaan seperti yang tertuang di dalam Tri Sila Usulan RUU HIP. Justru, ide tersebut kembali dihidupkan oleh

organisasi partai politik pemenang pemilu tahun 2019, yaitu partai PDIP. Keinginan partai PDIP *The Rulling Party* ini mendapat tantangan dari para mahasiswa dan akademisi dan gerakan para ulama. Yang menjadi pertanyaan mengapa partai yang jelas-jelas melakukan gerakan radikalisme tidak dibubarkan, sama dengan partai PKI ketika melakukan aksi makar, langsung ditetapkan sebagai organisasi terlarang melalui ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 larangan terhadap partai PKI di Indonesia yang saat ini belum dicabut.

Fenomena di atas sangat kontroversial bila ada warga negara yang melakukan koreksi kepada kebijakan negara yang keluar dari konstitusi, mereka ini dikriminalisasi oleh oknum negara, ditangkap, dan ditahan. Padahal, ini adalah tindakan yang positif, bukan gerakan radikalisme negatif. Artinya, bila dibandingkan dengan partai PDIP yang mengusulkan RUU HIP yang dinilai makar oleh kalangan akademisi, pemerintah tidak mengeksekusi pada partai tersebut karena partai PDIP merupakan partai *The Rulling Party* saat ini, di mana Presiden Jokowi sebagai kadernya yang diusung oleh partai *The Rulling Party* tersebut.

Harapan kita adalah pemerintah harus tegas melakukan tindakan siapa pun organisasinya, partainya, orangnya karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Inilah sebagai *trigger* munculnya gerakan radikal di kalangan perguruan tinggi yang memang perguruan tinggi diberikan hak untuk melakukan koreksi kepada negara bila negara abai terhadap konstitusi. Pesan saya, biarkan gerakan radikal yang positif berkembang di kalangan para mahasiswa, para akademisi jangan pemerintah melakukan persekusi dan kriminalisasi kepada gerakan akal sehat sebagaimana yang sering disuarakan oleh Rocky Gerung Presiden akal sehat Indonesia, dkk., aktivis.

Dengan demikian, upaya dalam mencegah gerakan radikalisme di kalangan generasi muda harus disesuaikan dengan paradigma pemikiran radikal. Belum tentu orang yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah pandangannya dianggap gerakan yang akan membahayakan stabilitas keamanan. Bisa saja kritik yang disampaikan dalam mengoreksi kebijakan pemerintah itulah yang tepat. Apalagi sistem bernegara kita mengakomodasi sistem demokrasi yang dituangkan di dalam konstitusi pada pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945. Pada ayat 1 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa negara kita bukan negara monarki, melainkan sebagai negara demokrasi di mana proses pemilihan presidennya harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan itu ada ditangan rakyat. Sehingga tidak ada salahnya bila kebijakan presiden RI akan dikontrol oleh masyarakat sebagai mekanisme dalam menjalankan fungsi *checks and balances*. Dengan demikian bila ada warga negara Indonesia mengoreksi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 dianggap syah-syah saja. Negara tidak menuduh bahwa warga negara tersebut sebagai pelaku tindakan radikal.

Demikian halnya dengan *legal standing* pada Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa negara Indonesia sebagai negara demokrasi sesuai dengan bunyi dalam undang-undang tersebut, bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dilakukan menurut undang-undang. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan bahwa rakyat memiliki hak di dalam mengoreksi kebijakan pemerintah asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, warga negara pun di dalam menyampaikan aspirasi tidak boleh mengarah kepada bentuk rasialisme, gerakan pandalisme, atau

gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis atau khilafah.

Bila yang terjadi adalah gerakan radikalisme negatif seperti yang ada di atas (ISIS, Terorisme, menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia [PKI], membentuk negara khilafah) inilah gerakan yang dianggap sebagai musuh bersama negara. Dengan demikian, kita setuju bila pemerintah konsen kepada gerakan-gerakan yang dianggap radikal negatif untuk dilakukan penahanan, bahkan tindakan yang lebih tegas lagi asalkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan UU Ham. Biasanya, atas nama demi membela diri, sering oknum aparat melakukan tindakan keras sampai-sampai kelompok atau seseorang yang dianggap radikal dapat kehilangan nyawa. Seperti yang terjadi kepada kelompok pengawal kepada pentolan FPI Habib Rijk Sihab atau panggilan HRS yang tertembak oleh oknum polisi karena dianggap membahayakan nyawa oknum aparat. Tindakan keras tersebut menyebabkan nyawa dari beberapa pengawal HRS tidak terselamatkan. Sikap ini yang harus dihindari oleh negara dalam menangani sebuah kelompok yang dituduh sebagai gerakan radikal. Artinya, kita berharap amanat konstitusi pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 Indonesia adalah negara hukum harus dijalankan oleh aparat kepolisian negara RI. Dengan tindakan oknum aparat di luar ketentuan undang-undang inilah yang memicu pemikiran radikal kepada tindakan aparat kepolisian mewakili negara.

Dengan fakta-fakta di atas menjawab pertanyaan siapakah pelaku tindakan radikal. Warga negara atau oknum penyelenggara negara. Menjawab pertanyaan tersebut bisa saja keduanya bisa dianggap melakukan tindakan radikal negatif. Bila kita sebagai warga negara atau oknum penyelenggara negara *lost control* terhadap tindakan yang kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan dalam mencegah gerakan radikalisme di Indonesia. Apa yang terjadi pada beberapa fakta

hukum di atas, harus menjadi bagian dari sebuah bentuk introspeksi dalam penanganan gerakan radikalisme di Indonesia.

Harapannya, baik itu warga negara maupun penyelenggara negara dalam menghadapi gerakan radikal di masyarakat untuk tidak salah kaprah dalam menuduh seseorang melakukan gerakan radikal negatif. Demikian juga cara dalam mengeksekusi kelompok warga negara yang dianggap melakukan gerakan radikalisme negatif. Kesalahan dalam mengidentifikasi bentuk tindakan radikalisme di masyarakat akan menjadi bom waktu dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di negara Republik Indonesia.

Dengan adanya kajian di dalam buku ini, akan memberikan gambaran yang jelas seperti apa gerakan radikalisme yang tidak dibenarkan hidup dan berkembang di negara kita. Demikian juga buku ini memberikan petunjuk untuk lebih berhati-hati aparat negara TNI/POLRI dalam mengambil tindakan tegas pada kelompok warga negara yang melakukan perilaku menyimpang yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan konstitusi.

Dalam menjawab pertanyaan siapakah pelaku tindakan radikalisme di atas, dapat kita lihat melalui beberapa ulasan berita, baik yang ada di TV swasta maupun TV negeri, bahkan ada dalam beberapa artikel di media sosial, seperti *Google* dan *Youtube* tentang pelaku radikalisme. Dalam pemberitaan di media sosial, disebutkan kelompok yang rentan terhadap gerakan radikalisme adalah kelompok usia 21–30 tahun dan kelompok usia 31–40 tahun. Mereka ini rentan menerima rayuan dan bujukan dari kelompok gerakan ISIS dan teroris yang dianggap kelompok radikal yang mengarah kepada pemikiran negatif, bahkan dapat dituduh sebagai sebuah gerakan makar. Strategi kelompok Radikal ISIS dan teroris menjanjikan umrah gratis dan memberikan uang sebesar

Rp50.000.000,00 per anggota. Dengan strategi tersebut, kelompok rentan di atas terpengaruh dengan ajakan kelompok radikal tersebut. Selain itu, strategi kelompok radikal negatif ini memengaruhi melalui kegiatan keagamaan melalui takbir akbar yang diselenggarakan oleh kelompok radikal. Kelompok radikal garis keras ini juga menyebarkan melalui media sosial, seperti *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Twitter*, bahkan lewat *YouTube* tentang ajaran radikalisme negatif tersebut (benarnews.org, laporan khusus).

Menurut Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT), di samping melalui pendekatan agama, ISIS juga menggunakan pendekatan ekonomi untuk merekrut pengikut mereka. Mereka diiming-imingi umrah dan gaji besar sampai 50 juta rupiah, ujar direktur pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Hamidun dalam dialog pencegahan paham ISIS dan terorisme di Universitas Brawijaya Malang. Menurutnya, mereka masuk melalui negara ketiga dengan modus umrah dan berlibur. Sekarang, sejumlah negara ketiga seperti Turki dan Mesir, ikut menangkalnya sehingga menyulitkan WNI yang akan berangkat ke Irak dan Suriah. Kepada berita benar, kepala BNPT, Saud Usman Nasution, mengakui bahwa penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda akibat makna jihad yang diartikan sempit. Mereka menganggap jihad hanyalah dengan berperang melawan kaum kafir. Padahal, itu hanya ada di zaman Rasulullah. Saud menyatakan penyebaran paham radikal sudah sampai ke sekolah-sekolah, perguruan Tinggi, dunia maya, bahkan penjara (benarnews.org, laporan khusus).

Dengan melihat fakta-fakta di atas, kenyataan bahwa radikalisme itu bukan fatamorgana lagi. Dia hadir di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan sampai merembet di dunia pendidikan. Untuk itu, kita sebagai WNI yang masih setia kepada ideologi Pancasila untuk lebih berhati-hati kepada gerakan radikalisme yang mengarah kepada kegiatan tindakan

negatif yang akan merusak kehidupan tatanan sosial bangsa Indonesia yang sudah komitmen dalam menjalankan model negara multikulturalisme dengan prinsip *Nation State* dengan slogan *Bhineka Tunggal Ika*. Dengan prinsip ini, negara Indonesia menolak segala tindakan radikalisme negatif, seperti ideologi ISIS dan gerakan Terorisme.

Semoga kajian di dalam buku ini akan membantu memilah-milah mana gerakan radikal yang sifatnya negatif dan mana gerakan radikal positif yang dibutuhkan dalam menegakkan negara demokrasi sebagaimana yang ada di dalam konstitusi UUD NRI 1945. Dalam buku ini akan dikaji melalui perspektif bidang keilmuan agar generasi muda kita tidak salah kaprah dalam menyikapi imbauan pemerintah dalam mencegah gerakan radikalisme di Indonesia.

Bab II

Radikalisme dan Stabilitas di Daerah Provinsi Gorontalo

A. Darurat Radikalisme yang Harus Segera Diatasi

Dalam kehidupan sekarang ini, bahaya radikalisme masih sangat *urgent* dibicarakan di belahan dunia mana pun. Ini karena ancaman paham radikalisme dapat membuat warga dunia Internasional merasa takut akan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan radikalisme. Beberapa kekhawatiran dunia saat ini terhadap gerakan radikalisme adalah gerakan terorisme dan ISIS (*Islamic Staats Irak Surya*) termasuk ideologi komunisme. Hal ini terlihat negara *Super Power* USA Amerika Serikat mengecam dengan keras aksi-aksi yang dilakukan sekelompok orang yang mengatas namakan teroris dan ISIS ketika aksi dilakukan di belahan dunia mana pun. Puluhan ribu jiwa korban akibat dari gerakan teroris dan ISIS yang terjadi saat ini. Hal ini mengundang keprihatinan masyarakat Internasional untuk mencegah masuknya aliran radikalisme masuk ke negara mereka karena sudah tentu gerakan ini akan menimbulkan efek multidimensional bagi negara yang dimasuki aliran radikalisme tersebut.

Salah satu upaya masyarakat dunia Internasional dalam menghentikan virus ideologi radikalisme adalah semua negara harus melakukan pernyataan mengutuk terhadap tindakan aksi yang dilakukan oleh organisasi radikalisme. Bagi siapa yang melindungi organisasi tersebut akan dinyatakan sebagai musuh bersama negara. Strategi inilah yang disosialisasikan kepada

masyarakat dunia Internasional agar kehidupan warga negara di masing-masing negara mendapatkan kenyamanan dalam beraktivitas di lingkungan masyarakatnya. Selain strategi kecaman bagi aksi gerakan radikalisme di atas, tindakan yang bisa dilakukan adalah memasukkan sangsi terberat bagi pelaku teroris dan ISIS dalam perundang-undangan di negara masing-masing. Pilihan *punishment*-nya adalah hukuman mati.

Bila pemerintah tidak tanggap terhadap fenomena radikalisme di Indonesia, akan membuat warga negara dan negara-negara lain untuk mengunjungi Indonesia akan berkurang. Hal ini berakibat menurunnya pendapatan negara di sektor pariwisata. Demikian halnya dengan warga negara Indonesia dengan tidak tanggapnya negara mengantisipasi mata rantai radikalisme akan membuat ketidaknyamanan dan ketenangan bagi warga negara di Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mencegah masuknya paham radikalisme di negara kita, khususnya di daerah Provinsi Gorontalo. Menurut BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), Provinsi Gorontalo berada pada posisi rawan radikalisme setelah Provinsi Aceh. Riris BNPT ini merupakan *warning* bagi kita, masyarakat di daerah serambi Madinah, ini untuk mewaspadai masuknya gerakan radikalisme di kalangan generasi muda.

Dengan rilis BNPT, sebaiknya kita di daerah lebih memahami apa sesungguhnya gerakan radikalisme tersebut karena bila dikaji secara akademik, pemikiran radikal diperlukan dalam membangun organisasi. Sama halnya kita membangun negara dan daerah. Ini karena terkadang mereka yang memiliki pemikiran radikal terhadap suatu kebijakan negara itu lebih menggunakan pemikiran akal sehatnya dalam mengkritik pemerintah sehingga ancaman radikalisme harus ada batas-batas seseorang dilarang untuk menjadi radikal. Boleh saja seseorang menjadi radikal karena ada yang tidak disetujui pada kebijakan daerah atau kebijakan negara,

misalnya pemerintah dalam hal ini mewakili negara menaikkan harga BBM, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ini juga bagian dari pemikiran radikalisme. Pertanyaannya, apakah warga negara yang berpikir kritis yang oleh pemerintah dianggap radikal tersebut dilarang dalam sistem pemerintahan kita?

Dengan contoh di atas, kita sebaiknya tidak membunuh warga negara yang memiliki pemikiran kritis terhadap kebijakan negara bila kebijakan negara tersebut dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, negara harus tunduk pada konstitusi UUD 1945 Pasal 28 di mana warga negara diberikan kebebasan dalam mengeluarkan pikiran atau pendapatnya. Namun, aturan ini sebaiknya harus dipahami bahwa ada batasan-batasan warga negara untuk tidak mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan undang-undang yang ada. Warga negara diberikan kebebasan berpendapat, tetapi pendapatnya bukan untuk mengganti ideologi negara, yakni Pancasila. Inilah batasan kita sebagai warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum supaya kita tidak dituduh sebagai orang yang terpapar radikalisme. Artinya, radikalisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya adalah melawan konsensus nasional terhadap penetapan Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk itu, marilah kita simak bagaimana sesungguhnya makna radikalisme sebagai ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia khususnya bagi generasi muda di daerah Gorontalo.

Radikalisme berasal dari kata “radikal”, yaitu kata sifat yang berarti aksi mencolok untuk menyerukan paham ekstrem agar diikuti oleh banyak orang, dibuahi kata “-isme” yang berarti ideologi. Dengan demikian, radikalisme adalah ideologi yang mempercayai perubahan menyeluruh hanya bisa dilakukan dengan cara radikal, bukan dengan cara evolusioner dan damai (kompasiana.com).

Radikalisme secara historis berawal di ranah politik oleh sayap kiri pada masa revolusi Prancis (1787-1789). Pengertian terus berkembang sehingga mencakup tidak hanya sayap kiri atau sayap kanan dalam politik, tetapi juga hingga ke bidang keagamaan (religius keagamaan). Meski tidak baru, bahkan muncul lebih dulu daripada revolusi Prancis, radikalisme keagamaan menemukan kembali momentum sejak pertengahan 1980-an ketika berbagai agama mengalami kebangkitan (*religious revivalism*) menantang modernitas sekularisme.

Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya bila kita mengetahui dulu apa makna radikal itu sendiri. Menurut KBBI, radikal memiliki makna amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan), dan maju dalam berpikir atau bertindak. Sementara itu radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, dan sikap ekstrem dalam aliran politik. Menurut ahli Sarlito Wirawan yang ditulis dalam bukunya *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi* (2012), radikal adalah bentuk afeksi atau perasaan yang positif terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrem sampai ke akar-akarnya. Sikap radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama, atau ideologi yang dianutnya.

B. Gerakan Radikalisme di Gorontalo

Melihat fenomena radikalisme pada masyarakat Gorontalo yang ditengarai oleh lembaga penanggulangan terorisme di Indonesia atau Badan Penanggulangan Keamanan Teroris (BNPT), Provinsi Gorontalo termasuk salah satu daerah rawan

teroris setelah Provinsi Aceh. Potensi radikalisme ini mungkin diduga karena Provinsi Gorontalo sebagai serambi Madinah merupakan salah satu daerah dengan jumlah pengikut agama Islam mayoritas, sama halnya dengan daerah Provinsi Aceh sebagai daerah serambi Makkah. Hal ini dianggap akan mengembangkan konsep syariat Islam sebagai penerapan Islam secara khafah, dalam arti di kedua daerah ini akan berlaku syariat Islam. Pemikiran seperti inilah yang akan berpotensi untuk mengembangkan konsep ISIS.

Indonesia pernah memiliki sejarah tentang ide pendirian negara Islam Indonesia sebagaimana yang dikembangkan oleh Karto Suwiryo dengan organisasi DII/TII sebagai embrio pendirian Negara Islam Indonesia. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang menjadi batu loncatan masuknya ideologi ISIS di kedua daerah ini dengan jumlah pengikut agama terbesar agama Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah ada potensi radikalisme di kalangan generasi muda, dapat dilihat dalam pemikiran-pemikiran generasi muda. Memang untuk mengetahui gerakan radikalisme tersebut sulit untuk dideteksi oleh alat apa pun sekalipun digunakan *lakedetektor* karena persoalan radikalisme selalu berangkat dari konsep yang ada di bawah alam sadar manusia. Radikalisme masuk tidak seperti serdadu sekutu dan Belanda datang ke Indonesia. Radikalisme masuk melalui saluran media massa dan media sosial dengan jaringan internet, atau melalui pemberitaan media resmi, seperti pemberitaan di TV swasta maupun TVRI.

Radikalisme di Indonesia dapat memengaruhi alam pikiran bawah sadar generasi muda melalui pengetahuan dan pemahaman, serta ketaatan mereka kepada sesuatu yang mereka anggap benar. Pemberitaan lewat media sosial dan saluran TV swasta dan TVRI memberikan pemahaman awal pada generasi muda terlibat dalam gerakan radikalisme.

Dengan demikian, gerakan radikalisme dapat dilihat melalui indikator radikalisme sebagai berikut.

1. Pengetahuan

Awal dari masuknya embrio radikalisme dapat dideteksi melalui seberapa besar pengetahuan generasi muda terhadap paham radikalisme. Pengetahuan radikalisme bagi generasi muda dipahami melalui sikap setuju dan tidak setuju terhadap tindakan radikal tersebut. Bila pemahaman mereka terhadap aksi radikal mendapatkan membenaran, maka dapat mengindikasikan bahwa generasi muda telah terkontaminasi oleh paham radikalisme. Ancaman radikalisme bukan hanya pada tindakan dalam melakukan aksi-aksi sabotase, tetapi mulai dapat dideteksi virus radikalisme tersebut ketika generasi muda membenarkan aksi radikalisme tersebut.

2. Pemahaman

Pemahaman yang berbeda terhadap aksi radikalisme merupakan *warning* bagi berkembang potensi radikalisme. Pemahaman yang benar terhadap tindakan radikalisme akan mengurangi aksi tersebut. Namun, bagi mereka yang memahami berbeda terhadap aksi radikalisme dalam arti bahwa radikalisme sebagai gerakan politik dalam menegakkan kebenaran dengan cara apa pun, kebenaran itu dilakukan dalam rangka menegakkan agama. Inilah yang dianggap sebagai pemicu seseorang untuk bergabung dengan radikalisme walaupun taruhannya jiwa bagi pengikutnya. Fase ini sangat berbahaya bagi perkembangan dalam mengantisipasi masuknya paham radikalisme di suatu daerah.

3. Pembenaran (*Justification*)

Potensi radikalisme dapat dilihat dari seberapa banyak generasi muda yang membenarkan tindakan radikalisme tersebut. Bila lebih banyak yang melakukan pembenaran

terhadap aksi radikalisme, mengindikasikan potensi ancaman radikalisme di daerah itu dianggap rawan terhadap berkembangnya virus radikalisme tersebut.

4. Ketaatan (*Loyalty*)

Indikator ketaatan dapat dilihat dari seberapa besar generasi muda melakukan tindakan yang diperintahkan oleh atasannya. Misalnya, dengan melakukan aksi teror melalui pemboman, sabotse, dan aksi lainnya yang merugikan kepada orang banyak. Kesetiaan ini ditunjukkan dengan tidak mengatakan kepada siapa pun bila anggota kelompok ini tertangkap oleh alat negara. Mereka bersedia mati untuk bungkam tidak akan mengatakan kelompok teman-temannya yang melakukan aksi radikalisme tersebut.

5. Tindakan Aksi (*Action*)

Indikator radikalisme yang tertinggi adalah ketika tindakan aksi radikal tersebut dilakukan oleh pengikut radikalisme. *Action* merupakan bentuk nyata dari tindakan kepatuhan seseorang pada kelompok radikal. Bila kita melihat aksi-aksi yang pernah dilakukan oleh beberapa orang yang sudah tewas dengan membawa bom bunuh diri tubuhnya dan meledakkannya. Inilah bentuk ketaatan pada organisasi radikal dengan jalan *action* pada perintah atasannya. Memang kalau dicermati semua aksi yang dilakukan sangat tidak masuk akal atau di bawah alam bawah sadar manusia namun itulah fakta bahwa aliran radikal bisa membuat orang melakukan sesuatu di luar alam bawah sadarnya.

Gerakan radikalisme yang telah masuk pada warga masyarakat Gorontalo, khususnya kepada generasi muda, dapat dibuktikan melalui hasil survei tentang pemahaman dan pengetahuan generasi muda terhadap paham radikalisme. Melalui hasil survei akan membuktikan kebenaran akan

terpaparnya generasi muda kita akan masuknya paham radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo sehingga dengan rilis BNPT bahwa generasi muda di daerah Gorontalo terpapar paham radikalisme dapat dibuktikan. Bila pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tidak konsen terhadap terpaparnya generasi muda kita kepada paham radikalisme akan membahayakan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi bagi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.

Sebagai reaksi dari rilis dari BNPT tersebut saya mencoba melakukan survei terhadap terpaparnya generasi muda terhadap paham radikalisme. Dari hasil survei melalui sebaran angket kepada kalangan generasi muda di kalangan perguruan tinggi mendapatkan indikasi apa yang dikatakan oleh BNPT bahwa generasi muda kita di daerah Provinsi Gorontalo telah terpapar adanya pemahaman radikalisme. Ini juga dibuktikan dengan adanya penangkapan kelompok teroris di daerah Kabupaten Pohuwato. Warga masyarakat Gorontalo yang terlibat gerakan teroris berjumlah tujuh orang.

Dengan adanya penangkapan dari pihak Densus 88 di daerah Kabupaten Pohuwato memberikan jawaban bahwa gerakan radikalisme negatif di daerah Provinsi Gorontalo telah masuk kewilayah Provinsi Gorontalo. Harapannya apa yang kita bahas pada bab I akan menjadi *warning* bagi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo untuk lebih aktif mewaspadaikan pengaruh paham radikalisme di kalangan generasi muda di daerah ini. Sebagai jawaban dari adanya penangkapan Densus 88 di daerah Kabupaten Pohuwato saat ini pemerintah Provinsi Gorontalo mengimbau kepada semua kepala daerah di Provinsi Gorontalo melakukan sosialisasi kepada masyarakat kita akan bahaya laten dari gerakan radikalisme negatif yang masuk di wilayah Provinsi Gorontalo.

Harapan pemerintah Provinsi Gorontalo itu dapat dilihat di setiap baliho besar yang dipampang oleh pemda di daerah

Kabupaten/Kota Gorontalo tentang peringatan masyarakat akan bahaya laten ideologi radikalisme. Bukan hanya baliho yang dipampang di setiap sudut ruas jalan, melainkan juga ditindaklanjuti oleh badan Kesbangpol di masing-masing daerah dengan cara menyosialisasikan kepada masyarakat akan bahaya laten dari paham ideologi radikalisme.

Melalui kegiatan sosialisasi pemerintah daerah akan bahaya laten paham radikalisme negatif sedikitnya dapat meminimalisasi menyebarnya paham radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo. Di samping sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah melalui badan Kesbangpol, Polri dan TNI pun mengambil bagian melakukan sosialisasi disekolah-sekolah dan di perguruan tinggi akan bahaya laten dari paham ideologi radikalisme masuk kepada generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo. Namun, upaya apa pun yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo serta peran TNI dan Polri dalam mengantisipasi masuknya bahaya laten paham Radikalisme negatif, tetap masih kecolongan. Hal itu dikarenakan yang dihadapi bukan musuh secara fisik, melainkan ideologi radikalisme (ISIS, Terorisme, Khilafah).

Semua bentuk musuh kita ini adalah ideologi sehingga melawan musuh ideologi tidak sama dengan menghadapi musuh kolonialisme. Musuh kolonialisme seperti penjajahan dari bangsa Belanda dan Jepang yang pernah menjajah negara kita ketika berhasil mengalahkan musuh-musuh penjajah bangsa kita. Saat itu, penjajahan pada negara kita sudah selesai dan diakui sebagai negara yang berdaulat sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sekalipun masih ada pendudukan tentara Belanda di Indonesia, tetapi dapat dihalau oleh TNI dan masyarakat Indonesia hingga ada pengakuan negara lain akan kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun, berbeda halnya ketika menghadapi musuh ideologi.

Sekalipun telah ada penangkapan oleh Densus 88 sampai dengan penahanan dan eksekusi mati bagi pelaku teroris, paham radikalisme tidak akan berhenti. Musuh ideologi terorisme masih tetap ada pengikutnya. Ideologi teroris berkembang pesat di kalangan generasi muda. Fakta ini terlihat di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Provinsi Sulawesi Tengah di daerah Kabupaten Poso kelompok teroris Santoso. Pelaku, bahkan pemimpinnya telah tertembak mati, tetapi pengikutnya masih tetap ada. Demikian juga di daerah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya. Gerakan teroris yang dilakukan masih tetap ada.

Dengan berkaca melalui fakta dan data tentang gerakan radikalisme yang berujung kepada tindakan teroris di daerah Gorontalo melalui penangkapan tujuh orang kelompok teroris di daerah Kabupaten Pohuwato sebagai sebuah *warning*, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo harus menaruh perhatian akan bahaya laten dari ideologi radikalisme negatif di kalangan generasi muda yang ada di daerah Gorontalo. Kami pun sebagai pemerhati sosial dalam menyikapi terpaparnya paham radikalisme di kalangan generasi muda merasa terpanggil melakukan riset di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini kalangan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di daerah Gorontalo. Adapun riset dilakukan terhadap generasi muda dengan objek mahasiswa karena bila mahasiswa yang mewakili generasi muda terpelajar terpapar akan radikalisme, itu sangat berbahaya bila dibandingkan kepada generasi muda dari kalangan bukan mahasiswa. Bila yang terpapar dari ideologi radikalisme hanya generasi muda yang tidak terpelajar, agak mudah menghalau berkembangnya embrio paham radikalisme. Dengan demikian, target dari kelompok teroris/ISIS adalah generasi muda dari kalangan mahasiswa. Hal itu karena bila kalangan mahasiswa mengakui kebenaran akan paham

radikalisme, mereka akan dapat menyebarkan paham itu kepada orang lain. Kelebihan mahasiswa adalah dapat melakukan sosialisasi paham radikalisme kepada generasi muda yang kurang terpelajar. Hal ini dinilai lebih efektif bagi kelompok teroris dalam menyebarkan paham radikalisme di kalangan generasi muda.

Dengan adanya indikasi target dari kelompok teroris/ISIS, pemerhati sosial melakukan riset kepada kalangan generasi muda di kalangan mahasiswa, ternyata menemukan jawaban dari apa yang kita khawatirkan. Hasil riset menunjukkan adanya bukti bahwa generasi muda telah terpapar dengan bahaya laten ideologi radikalisme. Ini dibuktikan di setiap pertanyaan dan pernyataan responden penelitian dari kalangan mahasiswa tidak mengetahui paham radikalisme, bahkan mereka bersimpatik kepada paham radikalisme. Memang hasil riset yang dilakukan hanya berkisar pada pengetahuan dan pemahaman akan bahaya laten ideologi radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, untuk melakukan pencegahan paham radikalisme menjadi sebuah bentuk gerakan teroris, harus dilakukan pada *mindset* generasi muda akan paham radikalisme tersebut. Upaya pencegahan kepada kelompok teroris harus dimulai dari identifikasi pengetahuan dan pemahaman generasi muda terhadap paham radikalisme. Dapat dikatakan pembentukan kelompok gerakan teroris *trigger*-nya selalu diawali dari pengetahuan dan pemahaman generasi muda akan pengakuan persetujuannya akan ideologi radikalisme yang diperkenalkan oleh kelompok teroris melalui media sosial. Bila generasi muda kita bersimpatik kepada kelompok teroris dan ISIS, itu menunjukkan bahwa generasi muda kita telah terpapar paham ideologi radikalisme.

Untuk mengkaji lebih lanjut apakah generasi muda di daerah provinsi Gorontalo telah terpapar akan paham

radikalisme, akan dibahas pada bab 3 yang akan mengulas secara detail bagaimana kondisi generasi muda kita akan bahaya laten dari ideologi radikalisme. Di bagian ini pembaca akan disuguhkan oleh hasil riset terhadap pengetahuan dan pemahaman generasi muda kita yang diwakili oleh kelompok mahasiswa di daerah Provinsi Gorontalo akan sikap mereka akan kehadiran paham radikalisme. Yang menarik ada sebagian dari kelompok mahasiswa kita yang bersimpatik apa yang menjadi musuh bersama negara dalam memberantas paham radikalisme. Untuk itu, kami berharap kepada pembaca untuk melihat mengapa generasi muda kita di daerah Provinsi Gorontalo terpapar dengan paham radikalisme.



Bab III

Pengetahuan Generasi Muda terhadap Paham Radikalisme dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah

Dalam rangka mendeteksi seberapa besar orang mendapat pengaruh aliran ideologi radikalisme dapat dilihat melalui pengetahuan generasi muda terhadap aliran ideologi radikalisme. Dengan demikian, indikator penentu seseorang terindikasi oleh aliran radikalisme adalah seketika dia (generasi muda) mengetahui maksud dan tujuan apa yang dia lakukan itu. Artinya, bila seseorang menganggap perbuatan yang dia lakukan itu adalah benar apalagi sesuai dengan perintah keyakinan agamanya sebagaimana yang diperoleh dari kelompok radikal yang memprovokasi diri seseorang, maka orang tersebut telah masuk dalam perangkap aliran radikal.

Pengetahuan merupakan kunci dari sebuah gerakan radikal dalam melakukan aksinya di negara Indonesia. Sasaran dari pengaruh pengetahuan radikal adalah generasi muda yang masih labil dirinya. Mereka inilah yang sangat rentan terhadap pengaruh ideologi radikalisme. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa pelaku bom bunuh diri di Indonesia rata-rata masih sangat muda, kira-kira umurnya baru menginjak masa remaja antara usia 15–17 tahun. Pada usia ini, seseorang mudah diberi pengetahuan radikal dalam mengikuti ajaran radikalisme yang

dibawa oleh sekelompok organisasi yang kini dianggap sebagai organisasi terlarang di Indonesia (ISIS, Teroris, dan PKI).

Gerakan radikalisme sangat berpengaruh pada ketahanan wilayah dan dapat memengaruhi ketahanan nasional suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh masuknya aliran ideologi radikalisme. Pengaruh ideologi radikalisme dapat dilihat melalui indikator ketahanan nasional, yaitu: (a) aspek ideologi; (b) aspek politik; (c) aspek ekonomi; (d) aspek sosial dan budaya, serta; (e) aspek pertahanan dan keamanan. Analisis implikasi paham radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Gorontalo dapat dilihat melalui hasil survei pada generasi muda di daerah Gorontalo sebagaimana temuan dalam penelitian sebagai berikut.

A. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengaruh radikalisme di kalangan generasi muda di Indonesia melalui seberapa besar pengetahuan generasi muda terhadap paham radikalisme. Permasalahan yang muncul bahwa paham radikalisme setelah dikenal oleh generasi muda melalui beberapa sumber, telah memengaruhi *mindset* mereka dan sebagian memberikan tanggapan positif terhadap gerakan radikalisme tersebut. Inilah yang menjadi sumber ancaman bagi bangsa dan negara saat ini. Pemahaman positif ini disebabkan oleh pengetahuan tentang gerakan radikalisme yang dipelajari melalui media sosial yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Pengetahuan generasi muda yang menilai positif tersebut menganggap bahwa gerakan radikalisme merupakan gerakan yang dibenarkan oleh keyakinan agamanya, padahal pengetahuan tersebut sangat berbeda dengan apa yang mereka dapatkan lewat media sosial. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei pada beberapa generasi

muda di daerah Gorontalo tentang pandangan mereka terhadap bahaya laten radikalisme melalui sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang dimaksud ialah: “Apakah Anda mengetahui tentang paham radikalisme?” Hasil survei ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Pengetahuan Paham Radikalisme di Kalangan Mahasiswa

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat mengetahui	25	27,17
b	Mengetahui	59	64,13
c	Ragu-ragu	6	6,53
d	Tidak mengetahui	2	2,17
e	Sangat tidak mengetahui	0	0
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekes Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Berdasarkan data hasil angket menunjukkan pengetahuan mahasiswa terhadap ideologi radikalisme sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengetahuan 91,3% responden menjawab sangat mengetahui tentang ideologi radikalisme. Dengan kata lain, pemahaman mahasiswa terhadap ideologi radikalisme sudah sangat baik. Data ini menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap radikalisme sudah diketahui oleh generasi muda, khususnya di kalangan mahasiswa UNG dan mahasiswa Poltekes Gorontalo mewakili generasi muda yang ada di Provinsi Gorontalo.

Representasi mahasiswa dalam penelitian ini dilakukan atas dasar seberapa besar pengaruh paham radikalisme di kalangan generasi muda terpelajar di daerah Provinsi Gorontalo. Bahaya paham radikalisme bagi generasi muda adalah di kalangan terpelajar karena golongan terpelajar merupakan sasaran bagi mereka yang menghendaki negara Republik Indonesia mengalami *Failed Staats*. Generasi muda terpelajar bila dikuasai ideologinya, mereka akan mengikuti ideologi radikalisme dan itu akan menambah populasi gerakan

radikalisme di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran utama bagi mereka yang mengembangkan paham radikalisme adalah golongan generasi muda terpelajar. Bagi mereka, generasi muda yang memiliki tingkat pendidikan rendah menjadi objek pelaku eksekusi kekerasan (*violence*) yang telah dipengaruhi oleh kalangan generasi muda terpelajar yang sudah menerima ideologi radikalisme tersebut.

Berdasarkan data dari kalangan mahasiswa di dua perguruan tinggi yang diambil dari mahasiswa Gorontalo ini memberikan pemahaman awal bahwa ancaman terhadap ideologi radikalisme dapat dicegah perkembangannya di daerah Gorontalo. Namun, dengan adanya mahasiswa masih ada yang gamang terhadap radikalisme antara keraguan mengetahui maksud dan tujuan radikalisme dan ketidaktahuan 8,69% memberikan *warning* bagi kita tentang kerawanan generasi muda yang dapat dipengaruhi oleh ideologi radikalisme melalui media sosial. Hal ini akan menjadi perhatian masyarakat di daerah Provinsi Gorontalo tentang bagaimana upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme di kalangan generasi muda, khususnya di kalangan mahasiswa UNG dan mahasiswa Poltekes sebagai representasi dari kalangan generasi muda terpelajar.

Data responden di atas memiliki persamaan dengan pandangan lembaga Badan Penanggulangan Terorisme di Indonesia (BNPT), bahwa daerah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan masuknya ideologi radikalisme di Indonesia setelah Provinsi Aceh. Menurut BNPT, bahaya radikalisme khususnya paham teroris dan ISIS, harus menjadi perhatian semua komponen masyarakat Gorontalo. Hal ini ditunjukkan dengan pandangan fundamentalis Islam, seperti aliran yang dibawa melalui organisasi HTI (Hibnu Tahir Indonesia yang keberadaannya telah dilarang pemerintah) dan banyak generasi muda di

Gorontalo menjadi simpatisan organisasi tersebut (hasil publikasi RRI Gorontalo, 27 November 2017).

Dalam melengkapi data hasil penelitian di atas melalui *focus group discussion* (FDG) yang diselenggarakan di UNG dengan beberapa praktisi dan akademisi, memberikan pandangan bahwa bentuk ideologi radikalisme di daerah Gorontalo masih bersifat simpatisan pada organisasi radikalisme, seperti gerakan ISIS dan Teroris masih dianggap sesuatu yang wajar. Gerakan ISIS dan Teroris merupakan sebuah bentuk protes terhadap tindakan militer Amerika di negara-negara Timur Tengah yang berbuat melampaui batas HAM. Generasi muda di daerah Gorontalo melihat ISIS dan Teroris merupakan tindakan balas dendam atas kebiadaban negara *super power* yang tidak adil dalam menegakkan keadilan di kawasan Timur Tengah.

Hasil FDG tersebut membuktikan masih ada kalangan generasi muda melakukan pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh gerakan radikalisme tersebut. Dengan demikian, sudah saatnya kita memberikan pemahaman kepada generasi muda yang ada di Gorontalo bahwa kegiatan dengan niat baik sekali pun, tetapi jika cara-cara yang dilakukan dengan strategi kekerasan (*violence*), maka itu sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Apapun alasan organisasi tersebut, kita harus mengatakan bahwa ISIS dan terorisme tidak memiliki tempat untuk mengembangkan sayap dan eksis di Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila yang sangat menolak aksi-aksi kekerasan dalam melakukan upaya perubahan.

Untuk menindaklanjuti pengetahuan generasi muda tentang bentuk gerakan radikalisme, salah satu pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah bentuk pertanyaan menyangkut teroris sebagai berikut. Pertanyaan yang dimaksud ialah: “*Apa Anda mengetahui tentang ideologi*

terorisme?” Pertanyaan tersebut mendapat tanggapan dari responden penelitian sebagaimana hasil survei di bawah ini.

Tabel 3.2 Pengetahuan Generasi Muda tentang Ideologi Terorisme

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat mengetahui	33	35,87
b	Mengetahui	49	53,26
c	Ragu-ragu	7	7,61
d	Tidak mengetahui	3	3,26
e	Sangat tidak mengetahui	0	0
	Jumlah	92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekes Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Data hasil survei di atas menunjukkan generasi muda telah mengenal dan mengetahui paham ideologi radikalisme dalam bentuk kegiatan teroris. Pengetahuan generasi muda ini belum dapat dipastikan apakah generasi muda setelah mengetahui akan memberikan dukungan kepada aksi kegiatan teroris atau akan melakukan bentuk penolakan kepada aksi kegiatan teroris bahkan mengutuk tindakan tersebut? Semua ini masih dalam tanda tanya. Untuk mengungkap fenomena tersebut, akan diketahui melalui pertanyaan penelitian selanjutnya. Pertanyaan di atas baru sebatas mengetahui apakah generasi muda telah mengetahui kegiatan radikalisme yang sering merugikan kepentingan masyarakat dan negara Republik Indonesia.

Pertanyaan tersebut telah ditanggapi responden dengan opsi “sangat mengetahui” pada paham teroris berjumlah 33 responden atau 35,87% dan yang “mengetahui” sejumlah 49 atau 53,26%. Dengan demikian, generasi muda di Provinsi Gorontalo telah mengetahui bentuk kegiatan teroris yang meresahkan masyarakat saat ini. Memang hal ini sangat positif bila generasi muda kita telah mengetahui paham teroris. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah pengetahuan akan teroris tidak diimbangi dengan sikap penolakan pada ideologi

tersebut, dalam arti generasi muda akan bersimpatik kepada tindakan aksi kegiatan teroris. Faktanya, masih ada generasi muda yang bersimpatik, bahkan menjadi bagian dalam kegiatan aksi teroris. Contohnya yang terjadi di pulau Jawa yang sebagian besar pelaku bom bunuh diri adalah dari kalangan generasi muda.

Untuk mengantisipasi sikap generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo untuk tidak bersimpatik kepada kegiatan teroris, pemerintah daerah harus aktif dalam menyosialisasikan efek dari kegiatan radikalisme. Ternyata, apa yang dikhawatirkan tersebut terungkap dalam hasil survei ini, yakni masih ada kalangan generasi muda yang ragu terhadap kegiatan teroris. Generasi muda tidak dapat membedakan teroris yang anti pada pancasila atau kegiatan tersebut adalah perbuatan dalam rangka menegakkan agama yang memiliki aliran fundamentalisme sehingga aksi teroris tidak dianggap perbuatan yang bertentangan dengan keyakinan responden penelitian. Sikap ini ditunjukkan oleh responden sejumlah tujuh orang atau 7,61% yang memilih opsi “ragu-ragu”.

Berbeda dengan sikap responden yang menyatakan dengan opsi tidak mengetahui. Sikap ini dianggap generasi muda masih dapat diajak untuk memahami lebih lanjut akan negatif dari kegiatan teroris tersebut. Dengan sikap ketidaktahuan generasi muda akan bahaya paham teroris, membuat kita, khususnya pemerintah daerah, harus lebih giat melakukan kegiatan sosialisasi terhadap penolakan aksi kegiatan teroris yang bertentangan dengan ajaran agama mana pun. Bahwa teroris bukan bentuk kegiatan jihad sebagaimana yang dipahami oleh mereka yang melakukan aksi bom bunuh diri tersebut. Responden yang memilih sikap “tidak mengetahui” berjumlah tiga orang atau 3,26% inilah yang menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai 3,26% yang memilih sikap tidak mengetahui ini akan bersimpatik dengan

mereka yang memiliki ideologi teroris ketika ada yang mengajak mereka menjadi bagian dari teroris.

Untuk menindaklanjuti bagaimana sikap generasi muda setelah mengetahui bentuk kegiatan teroris bila mereka bertemu dengan orang yang mengajak mereka masuk dalam kelompok teroris atau menerima informasi melalui media sosial, maka pertanyaan penelitian diarahkan kepada bentuk pertanyaan: *“Bila ada seseorang yang mengajak Anda untuk bergabung dengan ideologi terorisme, bagaimanakah sikap Anda?”* Pertanyaan penelitian ini mendapat respon dari responden penelitian sebagaimana hasil survei di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 3.3 Ajakan bergabung dengan organisasi Terorisme di Kalangan Generasi Muda

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	2	2,17
b	Setuju	2	2,17
c	Ragu-ragu	19	20,65
d	Tidak setuju	6	6,53
e	Sangat tidak setuju	63	68,48
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekkes Negeri Gorontalo Periode Juni-Agustus Tahun 2018.

Hasil survei di atas menunjukkan generasi muda di daerah Gorontalo masih ada yang bersedia bergabung dengan gerakan teroris setelah mereka mengetahui keberadaan gerakan tersebut. Responden yang menjawab “sangat setuju” dan “setuju” berjumlah empat orang atau 4,34%. Sikap generasi muda tersebut dianggap rawan dalam menciptakan stabilitas di daerah sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dalam mengantisipasi generasi muda agar tidak terlibat dalam bentuk partisipasi melakukan aktivitas bom bunuh diri sebagaimana yang terjadi di daerah Jawa. Keterlibatan generasi muda baru

sebatas simpatik pada gerakan teroris melalui sikap setuju dan sangat setuju.

Kekhawatiran terhadap gerakan teroris akan memengaruhi pemikiran generasi muda, salah satunya pilihan opsi “ragu-ragu” dalam pertanyaan penelitian. Responden yang memilih opsi ragu-ragu bila seandainya ada seseorang mengajak bergabung dengan kelompok teroris ada sejumlah 19 orang responden atau 20,65%. Pilihan opsi ragu-ragu pada responden penelitian merupakan sesuatu yang dianggap rawan. Artinya, bagi responden yang memilih sikap opsi ragu-ragu dapat berpotensi terlibat dalam gerakan teroris alam pikirannya. Mungkin juga akan mengarah kepada aktivitas teroris bila tidak dicegah oleh pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi akan bahaya laten gerakan radikal, seperti kegiatan teroris yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Terlepas dari kekhawatiran kita akan pengaruh ideologi teroris di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo, masih ada generasi muda yang sangat tidak setuju dan tidak setuju bila ada yang mengajak mereka bergabung dengan kelompok teroris. Ini membuktikan efektivitas sosialisasi kepada generasi muda akan bahaya laten ideologi radikalisme dalam bentuk kegiatan teroris. Opsi yang diberikan responden dalam penelitian ini berjumlah 63 responden atau 68,48% untuk yang sangat tidak setuju, serta 6 orang responden atau 6,53% untuk yang tidak setuju.

Untuk menelusuri lebih lanjut mengapa generasi muda ada yang bersimpatik dengan gerakan teroris, maka pertanyaan penelitian diarahkan dalam bentuk pertanyaan: *“Setujukah Anda bila ideologi terorisme disamakan dengan kegiatan jihad dalam pandangan Islam?”* Pertanyaan ini mendapat tanggapan dari responden sebagaimana hasil survei di bawah ini.

Tabel 3.4 Persepsi Ideologi Terorisme Disamakan dengan Kegiatan Jihad di Kalangan Generasi Muda.

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	5	6,43
b	Setuju	0	0
c	Ragu-ragu	19	21,64
d	Tidak setuju	33	35,87
e	Sangat tidak setuju	35	38,04
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Hasil survei di atas menunjukkan keberpihakan generasi muda terhadap ideologi teroris karena ada sebagian yang menyamakan gerakan teroris membawa misi agama, khususnya bagi penganut agama Islam. Mereka beranggapan bahwa melakukan bom bunuh diri kepada pihak-pihak yang dianggap lawan dan musuh merupakan perbuatan dalam menegakkan agama (jihad) padahal pemahaman tersebut keliru dalam pandangan Islam. Jihad dalam pandangan Islam adalah kewajiban yang harus dilakukan dalam menegakkan syariat di jalan Allah dengan cara-cara damai. Jihad dapat dilakukan dengan cara perang bila ada kelompok yang menzalimi Islam di medan perang.

Berbeda dengan pandangan jihad bagi gerakan teroris di Indonesia yang melakukan aksi bom bunuh diri pada fasilitas publik, bahkan sasarannya aparat hukum, seperti polisi, warga negara Amerika, dan sekutu Amerika yang ada di Indonesia sebagai turis mancanegara. Pandangan tersebut sama sekali bertentangan dengan pandangan Islam dalam melakukan kegiatan Jihad sebagaimana yang dianjurkan dalam agama. Agama Islam adalah agama *rahmatan lilalamin*, bukan agama yang membawa malapetaka bagi golongan yang berbeda agama dengan Islam. Semua kegiatan teroris berkedok jihad dengan cara melakukan bom bunuh diri adalah perbuatan yang sesat dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Menyikapi hasil survei di atas di mana ada beberapa generasi muda yang menyamakan teroris dengan gerakan jihad, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam *mindset* generasi muda yang harus mendapat sentuhan pendidikan yang benar. Jumlah responden yang mewakili generasi muda dalam penelitian ini berjumlah 5 orang responden atau 6,43% yang memilih opsi “sangat setuju” bila kegiatan aksi teroris di Indonesia disamakan dengan kegiatan Jihad. Selebihnya, responden memilih opsi “ragu-ragu”, yaitu 19 orang responden atau 21,64%. Jawaban responden ini menunjukkan adanya kerawanan pada generasi muda karena pilihan ragu-ragu berpotensi menjadi bagian dari kelompok teroris bila kelompok ini tidak mendapat informasi yang benar tentang keberadaan gerakan teroris.

Namun, di tengah-tengah kecemasan kita akan bahaya laten pengaruh gerakan teroris yang akan memengaruhi perilaku generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo, masih ada sebagian besar generasi muda yang tidak setuju bila gerakan teroris disamakan dengan gerakan jihad. Jumlah responden yang memilih opsi “tidak setuju” berjumlah 33 orang responden atau 35,87% dan yang memilih opsi “sangat tidak setuju” sejumlah 35 orang responden atau 38,04%. Hasil ini sangat positif dalam rangka melakukan pencegahan gerakan teroris di kalangan generasi muda. Dengan sebagian besar generasi muda di daerah Gorontalo yang tidak sependapat bila gerakan teroris disamakan dengan gerakan jihad, maka ini akan tertular kepada yang menyatakan opsi setuju dan memilih opsi ragu-ragu dalam penelitian ini.

B. Pemahaman (*Comprehension*)

Indikator pemahaman dapat dilihat dari reaksi dari apa yang diketahui seseorang. Reaksi seseorang merupakan refleksi dari pengetahuan yang diperoleh dari informasi yang diterima seseorang. Terkadang, reaksi seseorang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pesan dari pengetahuan yang sesungguhnya. Inilah yang disebut dalam pengetahuan sebagai interpretasi. Interpretasi setiap orang bisa berbeda. Namun, pesan ilmu pengetahuan tidak bisa dibedakan dengan apa yang menjadi tujuan pengetahuan tersebut. Berdasarkan kajian pemahaman tersebut, maka seseorang terkadang keliru dalam menafsirkan pesan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pemahaman seseorang harus mendapatkan petunjuk dari para ahli yang lebih kompeten dalam memberikan penafsiran terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan kepada setiap orang yang mempelajari pengetahuan supaya memahami makna yang sesungguhnya dari apa yang dia pelajari tersebut.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka sesungguhnya pengetahuan harus diperoleh dari lembaga formal, seperti perguruan tinggi yang mengajarkan tentang makna yang sesungguhnya dari pengetahuan tersebut. Pendidikan formal tersebut sebagai sarana masyarakat dalam mempelajari pengetahuan yang ideal. Selain itu, pengetahuan juga dapat dikaji melalui pendidikan nonformal dan pendidikan informal atau secara autodidak. Akan tetapi, semua ini harus diimbangi melalui kajian pengetahuan yang formal agar pesan dari ilmu pengetahuan tidak melenceng dari makna yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tersebut.

Bila dikaitkan dengan fenomena ideologi radikalisme di kalangan generasi muda di Indonesia yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia disebabkan ilmu pengetahuan yang diterima kalangan generasi muda dari sumber informal tidak

dikaji melalui mekanisme pendidikan formal sehingga generasi muda kita melakukan aksi-aksi kekerasan. Ada dengan cara meledakkan tempat-tempat fasilitas umum. Ada juga yang nekat melakukan tindakan bunuh diri dengan menggunakan bom rakitan. Semua fenomena ini terjadi karena pemahaman terhadap ilmu pengetahuan yang keliru dan akhirnya menghasilkan paham radikalisme tersebut.

Dalam menindaklanjuti penelusuran terhadap fenomena generasi muda terhadap pengaruh ideologi radikalisme, maka diajukan pernyataan yang sifatnya ingin mengetahui seberapa besar pemahaman generasi muda terhadap paham radikalisme. Adapun pernyataannya adalah: *“Berdasarkan kajian paham radikalisme merupakan bentuk ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, gerakannya mengutamakan kekerasan (violence) pembunuhan atau dengan cara menghilangkan nyawa lawannya (put to dead) dalam melakukan perubahan (changes).”* Hal ini mendapat tanggapan dari responden penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.5 Pemahaman Ideologi Radikalisme Berdasarkan Kajian Paham Radikalisme Merupakan Bentuk Ideologi yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila, Gerakannya Mengutamakan Kekerasan (Violence) Pembunuhan atau dengan Cara Menghilangkan Nyawa Lawannya (Put to Dead) dalam Melakukan Perubahan (Changes)

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	3	3,26
b	Setuju	15	16,31
c	Ragu-ragu	35	38,04
d	Tidak setuju	3	3,26
e	Sangat tidak setuju	36	39,13
Jumlah		92	100 %

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekes Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Bila melihat data hasil survei di atas, ternyata tingkat pengetahuan generasi muda yang sangat tinggi tidak diimbangi oleh tingkat pemahaman terhadap pengetahuan

yang mereka terima melalui sumber informasi nonformal maupun informal (media sosial) sesuai dengan konsep jihad sebagaimana yang diajarkan dalam keyakinan agama Islam. Hal ini dapat diamati dari tanggapan responden yang menyatakan “sangat tidak setuju” dengan pernyataan penelitian sebesar 36 atau 39,13% dan pernyataan “tidak setuju” sebesar 3 orang responden atau 3,62%. Pernyataan responden yang menyatakan tidak setuju tersebut mengandung makna bahwa mereka tidak mau menyatakan bahwa aksi-aksi radikalisme yang dilakukan di luar negeri di kawasan Timur Tengah dan di negara Indonesia bukan merupakan tindakan yang salah. Namun, apa yang dilakukan dianggap sebagai sesuatu yang diinginkan oleh keyakinan agamanya. Pernyataan ini dapat diamati melalui tanggapan responden terhadap pertanyaan yang mengungkap mengapa generasi muda kita sebagian besar memberikan reaksi positif atas pernyataan penelitian yang mengorek terhadap pemahaman generasi muda terhadap ideologi radikalisme di Indonesia.

Namun, yang unik dalam penelitian ini adalah responden yang tidak memberikan tanggapan atau “ragu-ragu” dalam menentukan sikapnya terhadap paham radikalisme, yaitu sebesar 35 atau 38,04%. Bisa saja sikap keraguan ini akan memberikan pembenaran terhadap aksi-aksi teroris sebagai bagian dari aksi radikalisme di Indonesia. Bisa juga yang masih ragu dalam menentukan sikap dapat diajak oleh pemerintah melalui lembaga pendidikan formal untuk tidak melakukan pembenaran pada aksi-aksi gerakan radikalisme tersebut. Idealnya, generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo harus memberikan penilaian negatif terhadap aksi-aksi terorisme di Indonesia.

Bila dalam penelitian ini menunjukkan pemahaman responden yang bervariasi terhadap paham radikalisme, hal ini merupakan *warning* bagi pemerintah daerah untuk lebih giat

lagi memberikan sosialisasi akan bahaya laten gerakan radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, responden yang menyatakan “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” adalah 39 orang atau 42,39%. Harapannya, generasi muda yang memiliki sikap anti terhadap gerakan radikalisme dapat memberikan pengaruh bagi kalangan generasi muda yang dalam pemikirannya menganggap bahwa gerakan radikalisme adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama (jihad). Semua ini dapat diantisipasi bila generasi muda yang ada di Gorontalo mendapat sentuhan pendidikan formal dalam mengkaji keberadaan gerakan radikalisme. Salah satu wujud dari keberhasilan pendidikan formal tersebut dilakukan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian tidak hanya ditujukan pada gerakan teroris dan keanggotaan ISIS (*Islamic Staats Irak Surya*). Namun, gerakan radikalisme pun melihat seberapa besar indikasi paham komunis masuk dalam alam pikiran mahasiswa sebagai representasi generasi muda terpelajar. Mengapa hal ini menjadi bagian dari pertanyaan penelitian? Jawabannya, karena akhir-akhir ini disinyalir bahaya laten komunis memengaruhi gerakan mudah PKI. Isu komunisme masih menjadi masalah bangsa dan negara saat ini karena gerakan G30SPKI telah melukai dan mencederai sejarah bangsa Indonesia. Gerakan tersebut telah membuat putra-putra terbaik bangsa dihabisi oleh keganasan ideologi komunisme. Para tokoh agama dibunuh oleh gerakan komunisme yang salah satu misi mereka adalah mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Apa yang menjadi misi gerakan komunis sangat bertentangan dengan ajaran Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Larangan terhadap Berkembangnya Ideologi Komunisme. Namun,

kenyataannya, ideologi ini masih tetap eksis disebagian masyarakat Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Di daerah Gorontalo, banyak masyarakat yang menjadi simpatisan dan pengurus Partai Komunis Indonesia. Hal itu karena Partai Komunis Indonesia merupakan partai besar pada tahun 1955 pemilu pertama diselenggarakan di Indonesia dari sepuluh partai yang ikut kontestan pemilu saat itu. Masuknya dalam partai empat terbesar membuat simpatisan dan pengikutnya pun sampai di wilayah Sulawesi Utara, salah satunya Gorontalo.

Untuk menelusuri apakah gerakan radikalisme berupa keberpihakan kepada Partai Komunis Indonesia di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo, maka dibuatlah pertanyaan kepada responden tentang: *“Apakah Anda mengetahui tentang paham komunisme?”*. Pertanyaan tersebut mendapat tanggapan responden sebagai berikut.

Tabel 3.6 Pemahaman Generasi Muda tentang Paham Komunisme

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat mengetahui	9	9,78
b	Mengetahui	78	84,78
c	Ragu-ragu	3	3,26
d	Tidak mengetahui	1	1,09
e	Sangat tidak mengetahui	1	1,09
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekes Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Data hasil survei menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan generasi muda pada gerakan radikalisme berupa seruan keterlibatan dengan paham komunisme. Artinya, adanya sekelompok orang eks PKI yang ingin mengembangkan kembali ideologi komunisme telah diketahui dan dipahami oleh generasi milenial saat ini. Terbukti dengan responden menyatakan “sangat mengetahui” 9 orang atau 9,78% dan 78

atau 84,78% menyatakan “mengetahui” tentang ideologi radikalisme. Ini bisa menjadi modal mencegah bahaya laten komunisme di kalangan generasi muda yang ada di daerah Provinsi Gorontalo.

Dari 92 responden penelitian sebagai sampel penelitian, ada satu responden atau 1,09 menjawab “tidak tahu” dan satu responden atau 1,09 menjawab “sangat tidak tahu” tentang arti ideologi komunisme. Data ini menunjukkan masih ada generasi muda di daerah Gorontalo yang tidak mengetahui akan adanya ideologi komunisme. Dua orang sebagai sampel dari populasi generasi muda kita, setengah dari jumlah penduduk Gorontalo itu merupakan jumlah yang mengkhawatirkan. Artinya, 2% saja dari dua juta penduduk Gorontalo akan menjadi ancaman stabilitas bagi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.

Ketidaktahuan dan keraguan mengenai ideologi komunisme merupakan potensi terjadinya kerawanan di daerah Gorontalo akan bangkit dan berkembangnya paham komunisme di bumi serambi Madinah. Komunisme sangat bertentangan dengan adat masyarakat Gorontalo yang agamais. Komunis yang ateis bertolak belakang dengan sendi dasar masyarakat Gorontalo “*adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah*”. Generasi muda yang gamang ini berjumlah 3 orang atau 3,26% “ragu-ragu”, “tidak tahu” 1 orang atau 1,09 %, dan “sangat tidak tahu” 1 orang atau 1,09%.

Berdasarkan data hasil survei tentang fenomena generasi muda di daerah Gorontalo di atas memberikan gambaran kepada pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi di daerah Gorontalo untuk tidak berhenti melakukan pendidikan bela negara kepada generasi muda. Hal ini dilakukan untuk mencegah generasi muda agar tidak terpengaruh oleh paham radikalisme yang menjadi musuh bersama negara. Dalam menindaklanjuti pertanyaan penelitian tentang pengetahuan generasi muda pada paham ideologi komunisme, maka perlu

ada pertanyaan lanjutan dalam hal menelusuri indikasi generasi muda dipengaruhi paham komunisme. Lanjutan pertanyaan penelitian yang diajukan kepada responden adalah: *“Bagaimanakah sikap Anda bila negara Indonesia menggunakan ideologi Komunisme?”* Pertanyaan tersebut mendapat tanggapan dari responden sebagaimana yang ada pada tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7 Persepsi Generasi Muda bila Ideologi Pancasila Diganti dengan Ideologi Komunisme

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	5	5,43
b	Setuju	5	5,43
c	Ragu-ragu	8	8,70
d	Tidak setuju	37	40,22
e	Sangat tidak setuju	37	40,22
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekes Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Hasil survei di atas menunjukkan adanya bahaya laten yang memengaruhi jiwa dan pikiran generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo. Sekalipun data ini tidak menjadi representasi jumlah generasi muda di daerah Gorontalo yang populasinya kurang lebih separuh dari jumlah generasi tua, data ini bisa menjadi ukuran stabilitas di daerah Provinsi Gorontalo.

Data di atas menunjukkan sejumlah 5 orang atau 5,43% menyatakan “setuju” dan yang menyatakan “sangat setuju” pun 5 orang atau 5,43% bila ideologi Pancasila diganti dengan ideologi komunisme. Hasil penelitian ini menunjukkan ideologi komunisme masih memberikan pengaruh pada generasi muda di daerah Gorontalo. Pernyataan setuju pada hasil penelitian ini senada dengan hasil pertanyaan pada tingkat pengetahuan generasi muda pada ideologi komunisme. Artinya, fenomena

ini perlu mendapat perhatian kita semua, khususnya bagi pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

Demikian halnya dengan generasi muda yang masih gamang di dalam menyatakan sikap apakah menerima atau menolak. Mereka yang gamang ini berjumlah 8 orang atau 8,70%. Sikap seperti ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan di daerah Gorontalo. Biasanya, sikap mengambang dapat menjadi lahan bagi tumbuhnya ideologi komunisme di kalangan generasi muda. Untuk mengantisipasi berkembangnya paham ideologi komunisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo, sudah saatnya pemerintah daerah memberikan sosialisasi tentang larangan berkembangnya ideologi komunisme.

Hal lain yang menjadi perhatian kita bersama dan patut diapresiasi adalah pernyataan responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap pergantian ideologi pancasila dengan ideologi komunisme. Responden yang menyatakan “sangat tidak setuju” berjumlah 37 atau 40,22% dan yang menyatakan “tidak setuju” pun berjumlah 37 atau 40,22% generasi muda.

Berdasarkan data hasil survei di atas menunjukkan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo masih dianggap aman terhadap bahaya laten komunisme sebagai bagian dari gerakan radikalisme. Walaupun sebanyak 80,44% menolak akan adanya pergantian ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme, pemerintah daerah harus tetap mewaspadaai adanya bahaya laten komunisme di daerah Provinsi Gorontalo. Kewaspadaan ini dilihat dari hasil survei yang menyatakan “setuju” dan “sangat setuju” berjumlah 10,86% terhadap pergantian ideologi pancasila dengan ideologi komunisme.

Untuk menggali lebih lanjut tentang fenomena radikalisme khususnya paham komunisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo ditelusuri melalui pertanyaan:

“Bagaimanakah sikap Anda bila negara mencabut tentang ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang larangan pembentukan Organisasi PKI atau Partai Komunis di Indonesia?” Pertanyaan ini dapat mengungkap apakah generasi muda memahami kebijakan negara RI melarang organisasi PKI untuk hidup dan berkembang di negara kita. Bila responden penelitian tidak mengetahui kebijakan negara RI melalui sosialisasi di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal, ini merupakan sebuah kekhilafan kita semua untuk lebih mengingatkan kepada masyarakat bahwa ketetapan MPRS No XXV 1966 belum dicabut oleh pemerintah. Ini membuktikan bahwa negara kita sama sekali melarang orang yang menghidupkan kembali Partai Komunis di Indonesia. Bila generasi muda tidak sampai tersentuh oleh informasi tersebut, sudah saatnya kita mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak menghendaki kembalinya paham radikalisme, khususnya ideologi komunisme melalui Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk berkembang dan bangkit kembali di bumi pertiwi Indonesia.

Untuk melihat seberapa besar generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo mengetahui dan memahami tentang larangan organisasi PKI berdasarkan ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966, dapat dilihat melalui hasil survei di bawah ini.

Tabel 3.8 Persepsi Generasi Muda bila Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Larangan Organisasi Komunisme (PKI) di Negara Indonesia Dicabut oleh Pemerintah.

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	3	3,27
b	Setuju	6	6,52
c	Ragu-ragu	36	39,13
d	Tidak setuju	5	5,43
e	Sangat tidak setuju	42	45,65
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Berdasarkan hasil survei tentang pengetahuan generasi muda terhadap ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 terhadap larangan organisasi PKI di Indonesia, responden yang “sangat setuju” dicabutnya ketetapan tersebut berjumlah 3 orang generasi muda atau 3,27% dan yang “setuju” berjumlah 6 orang generasi muda atau 6,52%. Data ini menunjukkan bahwa generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo ada yang tidak mengetahui isi ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 terhadap larangan pembentukan organisasi PKI. Jawaban setuju dan sangat setuju pun dapat menjadi perhatian pemerintah dan perguruan tinggi tentang alasan persetujuan responden. Alasan ini bisa saja berarti generasi muda di Provinsi Gorontalo telah terindikasi oleh adanya paham komunisme. Apapun jawaban responden di atas akan menjadi perhatian kita semua dalam mencegah kembalinya paham komunisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo.

Fenomena lain dari generasi muda kita pada paham radikalisme melalui pertanyaan di atas adalah jawaban yang “sangat tidak setuju” dan “tidak setuju” bila ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 itu dicabut. Hal ini membuktikan bahwa masih ada generasi muda yang memahami kebijakan negara tentang alasan pemberlakuan ketetapan tersebut. Responden yang menjawab “sangat tidak setuju” berjumlah 42 generasi muda atau 45,65% dan yang menjawab “tidak setuju” berjumlah 5 orang generasi muda atau 5,43%. Data ini menunjukkan kerawanan bagi generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo karena total yang bersikap tidak menerima akan pencabutan ketetapan tersebut hanya total 51,08%. Artinya, separuh dari responden menyetujui pencabutan ketetapan tersebut.

Lebih unik lagi, hasil survei menunjukkan generasi muda yang tidak memberikan pernyataan sikapnya, dalam arti ada keraguan di dalam menerima bila opsi pencabutan itu

dilakukan oleh pemerintah. Memang pencabutan ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah, tetapi untuk mengetahui sikap generasi muda terhadap indikasi generasi muda yang ada di Provinsi Gorontalo telah dipengaruhi alam pikirannya oleh paham radikalisme seperti ideologi komunisme, maka pertanyaan tersebut harus menjadi strategi dalam penelitian ini. Namun, pengandaian pertanyaan tersebut mendapat respons bervariasi dari responden penelitian, di antaranya yang setuju dengan pertanyaan tersebut.

Keunikan hasil survei pertanyaan ini adalah responden yang memberikan reaksi dan menanggapi dengan sikap keraguannya pada pertanyaan di atas berjumlah 36 orang generasi muda atau 39,13%. Jumlah ini sangat besar bila dilihat dari ancaman stabilitas daerah Gorontalo. Gejala keraguan responden dapat dilihat dan dianalisis menjadi setuju atau responden tidak mau menyatakan sikap karena takut akan ketahuan jiwa dan pikiran yang ada pada diri responden. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena opsi keraguan menunjukkan adanya sikap setuju atau simbol bahaya laten akan adanya ideologi komunisme di kalangan generasi muda.

Dalam mencegah kembalinya paham komunisme di Indonesia dapat dilakukan melalui pemutaran kembali film G30SPKI. Namun, upaya ini di zaman Presiden Jokowi tidak dilakukan secara nasional. Penayangan film G30SPKI hanya dilakukan di kantor-kantor TNI, seperti di Kodim di masing-masing wilayah kerja TNI. Hal ini karena penayangan film tersebut dianggap membuka luka lama kebiadaban PKI yang akan menimbulkan kecemasan bagi masyarakat. Alasan lainnya karena film ini lebih mengultuskan pemimpin orde baru dan fakta yang ditayangkan tidak objektif penuh dengan kekerasan.

Bagi kita yang pernah menonton film G30SPKI, sebenarnya dengan tayangan film ini dapat mencegah kembalinya paham komunisme di Indonesia. Akan tetapi, bagi mereka yang beralasan lain, sebaliknya justru penayangan film tersebut akan mengembalikan kita untuk membenci kepada anak cucunya PKI. Fenomena ini ada benarnya. Namun, dengan tidak ditayangkan kembali pemutaran film G30SPKI generasi muda kita tidak akan mengenal sejarah kelam perjalanan bangsa ini, di mana bangsa Indonesia pernah mengalami gerakan revolusi PKI tetapi gagal.

Untuk mengetahui tanggapan generasi muda akan pentingnya film G30SPKI, dapat kita lihat melalui hasil survei di bawah ini.

Tabel 3.9 Penayangan Film G30SPKI Setiap Tanggal 30 September Dapat Mencegah Bangkitnya Paham Komunis di Indonesia.

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	21	22,83
b	Setuju	62	67,39
c	Ragu-ragu	9	9,78
d	Tidak setuju	0	0
e	Sangat tidak setuju	0	0
Jumlah		92	100 %

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Data hasil survei di atas menunjukkan generasi muda merespons positif bila tayangan film G30SPKI ditayangkan kembali secara nasional. Ini karena film tersebut dapat mencegah masuknya paham komunisme di kalangan generasi muda di daerah Gorontalo. Responden yang menyatakan “sangat setuju” berjumlah 21 generasi muda atau 22,83% dan yang “setuju” berjumlah 62 orang generasi muda atau 67,39%.

Responden yang masih ragu apakah dengan penayangan film G30SPKI dapat mencegah masuknya paham komunisme (PKI) di daerah Provinsi Gorontalo atau justru membangkitkan

kembali G30SPKI, atau malah mereka yang bersimpatik dengan PKI tidak mau luka lama diungkit lagi. Semua ini masih merupakan fenomena unik. Jawaban riilnya hanya mereka yang tahu. Jumlah responden yang meragukan bila tayangan film G30SPKI ditayangkan secara nasional adalah 9 orang generasi muda atau 9,78 %.

Untuk menggali lebih lanjut, seharusnya tayangan yang ada dalam film G30SPKI dilakukan revisi pada tayangan yang sifatnya kekerasan dan lebih ditonjolkan pada paham seperti apa komunisme itu. Pesan film tersebut diperbaiki dengan tidak menonjolkan tindakan pembersihan kepada PKI, serta tidak menayangkan pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh PKI. Untuk mengetahui generasi muda menerima revisi film dengan tidak menghilangkan fakta sejarah, pertanyaan penelitian diarahkan pada: *“Beberapa pihak mengatakan bahwa tayangan film G30SPKI sangat sarat dengan bentuk kekerasan sehingga tayangan kekerasan dalam film tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi kejiwaan penonton, yaitu dengan menghilangkan potongan adegan kekerasan tersebut. Apakah sensor terhadap adegan kekerasan masih dapat menyampaikan pesan bahwa PKI tidak pantas untuk dihidupkan di negara kita? Bagaimanakah sikap Anda dengan pernyataan tersebut?”*

Pertanyaan ini mendapat respons dari responden yang dapat dilihat melalui tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Sensor terhadap Adegan Kekerasan Masih Dapat Menyampaikan Pesan bahwa PKI Tidak Pantas untuk Dihidupkan di Negara Kita

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	5	5,43
b	Setuju	12	13,04
c	Ragu-ragu	40	43,48
d	Tidak setuju	32	34,78
e	Sangat tidak setuju	5	5,43
Jumlah		92	100 %

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Berdasarkan hasil survei di atas ternyata responden lebih besar memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju bila tayangan film G30SPKI itu dilakukan penyensoran pada tayangan fakta sejarah sesungguhnya sekalipun dalam tayangan tersebut lebih pada fakta sejarah kekerasan. Di mana fakta sejarah sesungguhnya PKI telah melakukan penculikan dan pembunuhan kepada tujuh jenderal TNI putra terbaik bangsa. Demikian juga dengan gerakan pembersihan yang dilakukan oleh Mayjen Soeharto saat mendapat mandat dari Presiden Soekarno dalam operasi pembersihan gerakan 30 September 1965. Responden yang menyatakan “sangat tidak setuju” berjumlah 5 orang atau 5,43% dan “tidak setuju” berjumlah 32 orang atau 34,78%. Alasan mereka ialah bila tayangan ini dilakukan penyensoran, pesan PKI sebagai organisasi yang lebih mementingkan tindakan kekerasan tidak akan sampai kepada generasi muda. Pada akhirnya, generasi muda akan gamang melihat apakah gerakan G30SPKI merupakan organisasi yang tidak pantas untuk dihidupkan di negara Republik Indonesia yang berdasarkan ideologi Pancasila. Hal ini ditunjukkan data hasil survei responden yang “ragu” atas penyensoran terhadap tayangan film tersebut, yakni berjumlah 40 orang generasi muda atau 43,48%. Jumlah yang besar tersebut berarti keraguan atas rencana penyensoran film G30SPKI. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk tidak melakukan revisi pada fakta sejarah yang ada dalam film G30SPKI.

Bila ada responden yang menyatakan persetujuannya terhadap sensor tersebut pun dapat juga dibenarkan karena tayangan kekerasan dapat juga memengaruhi kejiwaan anak-anak untuk menjadi karakter sebagaimana pesan film tersebut. Alasan lain mereka menyetujui sensor tersebut karena mengganggu upaya rekonsiliasi eks PKI dan anak cucu PKI. Artinya, tayangan tersebut bisa saja membuka luka lama kedua

belah pihak, baik korban kebiadaban PKI maupun orang tuanya yang mengalami operasi pembersihan terhadap G30SPKI. Mungkin inilah alasan yang menjadi dasar responden memberikan pernyataan sikap menyetujui akan penyensoran terhadap tayangan kekerasan dalam Film G30SPKI 1965. Responden yang memberikan pernyataan “sangat setuju” berjumlah 5 orang atau 5,43% dan yang menyatakan “setuju” berjumlah 12 orang atau 13,04%.

C. Sikap (*Attitude*)

Indikator *attitude* dapat dilihat bahwa sikap menunjukkan eksistensi seseorang akan pengaruh pengetahuan dan pemahaman yang telah dianalisis berdasarkan logika pengetahuan. Dengan pernyataan sikap seseorang terhadap ideologi radikalisme yang berkembang dan menjadi fenomena di luar negeri khususnya di kawasan Timur tengah dan di tanah Jawa (Indonesia) dengan aksi-aksi melakukan teror bahkan melakukan tindakan pengrusakan dan meledakkan diri dengan target supaya menimbulkan korban kepada pihak-pihak yang menghalangi aksi gerakan radikalisme (seperti Polri dan TNI) mereka bersikap positif pada aksi tersebut. Artinya, gerakan mereka dianggap benar sebagai wujud dari sikap protes pada negara dalam menegakkan agama yang tidak sesuai dengan keyakinan gerakan teroris sebagai bagian dari ideologi radikalisme.

Pernyataan ini dapat diamati melalui survei kepada generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo dengan pertanyaan sebagai berikut: “*Bila ada yang mengajak Anda untuk bergabung dengan organisasi radikalisme, bagaimanakah sikap Anda?*”

Tabel 3.11 Ajakan Bergabung dengan Organisasi Radikalisme di kalangan Generasi Muda

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	3	3,26
b	Setuju	2	2,17
c	Ragu-ragu	6	6,52
d	Tidak setuju	27	29,35
e	Sangat tidak setuju	54	58.70
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekes Negeri Gorontalo Periode Juni-Agustus Tahun 2018.

Data hasil survei di atas menunjukkan ada pengaruh radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo dari kalangan terpelajar. Hal ini ditunjukkan oleh responden yang menyatakan “sangat setuju” sejumlah 3 orang atau 3,26% dan “setuju” sejumlah 2 orang atau 2,17%. Pernyataan sikap generasi muda ini merupakan awal dari embrio paham radikalisme merasuki jiwa dan pikiran generasi muda yang sebentar lagi akan memengaruhi perilaku generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo.

Dalam kajian ketahanan nasional, sikap seseorang yang memberikan dukungan kepada aksi radikalisme dianggap dianggap rawan atau klasifikasi tidak aman. Sikap ini sebetulnya merupakan ancaman bagi pemerintah terhadap generasi muda di daerah Gorontalo. Hal tersebut karena bila generasi muda terpelajar telah menyatakan sikap memberikan dukungan pada aksi kegiatan radikalisme, ia dapat memengaruhi perilaku generasi muda di lingkungan sekitar yang alam pemikirannya telah terindikasi paham radikalisme. Memang di dalam undang-undang terorism, seseorang dapat dikenakan tindakan hukum bila telah melakukan aksi teroris, berupa menyimpan dan membuat bahan peledak yang akan digunakan dalam aksi-aksi teroris. Namun, dalam upaya preventif terhadap gerakan radikalisme tersebut, pemerintah harus melakukan tindakan deradikalisme di kalangan generasi

muda yang telah terindikasi dalam jiwanya dan pemikirannya melakukan membenaran aksi-aksi radikalisme. Ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga memberikan ruang kepada sekelompok orang yang sering melakukan aksi teroris di wilayah Indonesia.

Namun, yang unik dalam hasil survei ini adalah responden yang bersikap ragu terhadap gerakan aksi-aksi teroris sebagai bagian dari misi radikalisme di Indonesia. Mereka berjumlah 6 orang atau 6,52%. Sikap keraguan terhadap aksi-aksi teroris di Indonesia memiliki potensi akan memberikan dukungan kepada aksi radikalisme. Sikap keraguan ini disebabkan oleh karena tidak mau ketahuan memberikan dukungan kepada aksi gerakan teroris sebagai bagian dari misi radikalisme atau sikap keraguan menunjukkan ketidaktahuan terhadap misi gerakan radikalisme. Keraguan akan ketidaktahuan akan gerakan radikalisme masih dapat dibina melalui kegiatan sosialisasi kepada generasi muda akan larangan generasi muda terlibat dalam kegiatan radikalisme tersebut. Dengan demikian, sikap gamang generasi muda merupakan *warning* bagi lembaga pendidikan formal dalam menyosialisasikan gerakan radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 di kalangan generasi muda di Provinsi Gorontalo.

Namun, yang menggembirakan dalam hasil survei ini adalah sebagian besar generasi muda dari kalangan mahasiswa memberikan pernyataan sikap sangat tidak setuju pada gerakan aksi-aksi terorisme sebagai bagian dari misi radikalisme di Indonesia. Responden yang menyatakan “sangat tidak setuju” berjumlah 54 generasi muda atau 58,70% dan yang menyatakan “tidak setuju” berjumlah 27 generasi muda atau 29,35%. Hasil survei terhadap fenomena radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo memberikan gambaran kepada kalangan perguruan tinggi

untuk lebih optimal dalam membina generasi muda melalui perbaikan kurikulum perguruan tinggi tentang bahaya laten gerakan radikalisme di Indonesia. Bentuk wujud dari gerakan tersebut melalui penerapan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan memasukan materi bahaya laten radikalisme bagi generasi muda Indonesia.

Dalam menindaklanjuti penelusuran sikap generasi muda terhadap fenomena radikalisme maka pertanyaan penelitian diarahkan kepada bentuk pertanyaan sebagai berikut: *“Bila ideologi negara kita diganti dengan organisasi ISIS, bagaimanakah sikap Anda?”* Pertanyaan ini diberikan kepada responden untuk mengetahui lebih jauh sikap generasi muda di daerah Gorontalo akan adanya indikasi radikalisme sebagaimana rilis dari badan penanggulangan teroris yang berpusat di ibu kota negara Indonesia, di mana Provinsi Gorontalo dianggap lima daerah yang dianggap rawan berkembangnya gerakan radikalisme sesudah Provinsi Aceh. Untuk mengetahui fenomena radikalisme di kalangan generasi muda, dapat dilihat melalui hasil survei di bawah ini.

Tabel 3.12 Pergantian Ideologi Pancasila dengan Ideologi dari Organisasi ISIS

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	4	4,35
b	Setuju	1	1,09
c	Ragu-ragu	4	4,35
d	Tidak setuju	16	17,39
e	Sangat tidak setuju	67	72,83
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni-Agustus Tahun 2018.

Tabel 3.12 di atas menunjukkan sikap generasi muda bila ideologi negara diganti dengan ideologi radikalisme seperti ideologi yang dibawa dari Timur Tengah dengan mengatasnamakan ISIS (*Islamic Staats Irak Surya*). Ideologi ini

identik dengan ideologi yang pernah dicita-citakan oleh Karto Suwiryo di daratan tanah Jawa dan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Gerakan ini dapat ditumpas oleh pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia yang tidak menghendaki ideologi Pancasila diganti dengan ideologi Agama. Hal ini juga pernah terjadi di saat pemerintah Indonesia menetapkan ideologi negara, di mana terjadi perbedaan *The Founding Fathers* tentang Piagam Jakarta dan Pancasila. Namun, perbedaan pendapat ini menghasilkan konsensus nasional dengan diterimanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Dalam fenomena radikalisme di kalangan generasi muda, Indonesia mulai terkontaminasi dengan gerakan ideologi ISIS di negara Timur Tengah di Negara Irak dan Surya yang mengatasnamakan perjuangan menegakkan Islam dalam meraih cita-cita politik sekelompok orang di negara Timur Tengah. Memang tidak ada yang salah bila syariat Islam dijadikan ideologi negara. Namun, kegiatan untuk menegakkan syariat Islam tidak sesuai dengan syariat Islam yang sesungguhnya. Hal ini ditunjukkan oleh organisasi ISIS dalam bentuk gerakan terorisme dalam merubah ideologi yang sudah menjadi konsensus nasional di negara tersebut. Aksi ISIS dilakukan dengan tindakan kekerasan (*violence*) untuk memaksa negaranya mengubah ideologinya. Semua tindakan terorisme sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Hasil survei di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo menunjukkan ada 4 responden atau 4,35% yang menyatakan “sangat setuju”u bila ideologi negara Pancasila diganti dengan Ideologi ISIS. 1 responden atau 1,09% menyatakan “setuju”. Data ini mengindikasikan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo telah terkontaminasi oleh gerakan radikalisme.

Selain hasil survei menunjukkan adanya sikap rawan di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo yang terkontaminasi oleh ideologi radikalisme, masih ada sebagian besar generasi muda di daerah Gorontalo yang masih memiliki pendirian dalam mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Responden ini berjumlah 67 orang atau 72,83% menyatakan “sangat tidak setuju” dan yang menyatakan “tidak setuju” berjumlah 16 responden atau 17,39%.

Responden yang masih gamang dalam menentukan pilihan apakah setuju ideologi Pancasila diganti dengan ideologi ISIS di Indonesia NII (Negara Islam Indonesia) sebesar 4,35% atau 4 orang. Jumlah ini menunjukkan agar pemerintah daerah dan lembaga pendidikan sesegera mungkin memberikan sosialisasi pada generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo akan pentingnya pemahaman ideologi pancasila.

Untuk mendalami penelusuran sikap generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo tentang sikap mereka terhadap gerakan radikalisme, maka pertanyaan dalam penelitian ini mengorek keterangan lebih dalam tentang sikap generasi muda terhadap gerakan radikalisme. Pertanyaan yang diajukan adalah: *“Organisasi ISIS (Islamic Staats Irak Surya) merupakan sebuah gerakan tauhid dalam rangka menegakkan agama Islam. Bagaimanakah sikap Anda dengan pernyataan tersebut?”* Pertanyaan ini mendapat tanggapan dari responden yang dapat dilihat melalui tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13 Pembenaran Gerakan ISIS dengan Gerakan Tauhid

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	3	3,26
b	Setuju	5	5,43
c	Ragu-ragu	4	4,35
d	Tidak setuju	21	22,83
e	Sangat tidak setuju	59	64,13
Jumlah		92	100 %

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni-Agustus Tahun 2018.

Bila melihat data hasil survei di atas, generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo terindikasi alam pikirannya (*mindset*) salah kaprah dalam menerima informasi tentang gerakan teroris sebagai bagian dari misi radikalisme di Indonesia. Hal ini ditunjukkan beberapa responden yang menyamakan gerakan radikalisme berupa aksi-aksi terorisme di Indonesia disamakan dengan gerakan jihad sebagaimana menjadi tuntutan agama Islam dalam menegakkan tauhid. Data ini merupakan hasil analisis berdasarkan jawaban responden yang menjawab “sangat setuju” sejumlah 3 generasi muda di daerah Gorontalo atau 3,26 % dan menjawab “setuju” sejumlah 5 generasi muda dari 92 responden sebagai sampel dalam penelitian ini.

Berdasarkan data hasil survei ini mengingatkan kita semua di daerah Provinsi Gorontalo sebagai daerah serambi Madinah dengan prinsip “adat bersendikan *syaraa*, *syaraa* bersendikan kitabullah”. Jihad dalam pandangan Islam adalah sebagai kegiatan membela agama Islam dalam menegakkan syariat dengan cara-cara menghormati rasa kemanusiaan yang berbeda agama. Ini dilihat dari salah satu dalil Alquran “*lakum dinukum waliyadin*” (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Artinya, syariat Islam sangat toleran menghormati perbedaan keyakinan, Islam agama *rahmatan lil alamin*, agama yang humanis. Apa yang dilakukan oleh gerakan teroris yang mengatasnamakan agama Islam sesungguhnya telah lari jauh dari syariat Islam yang sama kita yakini. Oleh karena itu, gerakan radikalisme berupa aksi terorisme di mana pun berada merupakan gerakan yang bertentangan dengan keyakinan syariat Islam.

Fenomena generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo terhadap gerakan radikalisme, seperti aksi-aksi gerakan teroris, tidak semua generasi muda yang bersimpatik pada gerakan radikalisme tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh data hasil survei

generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo yang menolak, bahkan mengutuk gerakan teroris disamakan dengan gerakan jihad. Sejumlah 59 atau 64,13% generasi muda menyatakan “sangat tidak setuju” dan yang “tidak setuju” 21 atau 22,83% generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan data tersebut, generasi muda yang diklasifikasikan sebagai kategori aman di dalam ukuran ketahanan nasional ini memberikan tanggapan penolakan bila gerakan teroris disamakan dengan gerakan jihad merupakan hasil dari sosialisasi pendidikan, baik itu oleh pemerintah daerah maupun hasil belajar dari lembaga pendidikan formal. Kesadaran generasi muda akan penolakan aksi terorisme di Indonesia sebagai wujud dari ketahanan wilayah di daerah Provinsi Gorontalo masih dikatakan aman terhadap ancaman gerakan radikalisme. Namun, pemerintah daerah jangan kecolongan pada sikap generasi muda yang sebagian menyamakan dengan gerakan jihad. Oleh karena itu, generasi muda yang menyamakan gerakan teroris dengan jihad harus dilakukan program deradikalisasi agar mereka yang bersimpatik kepada organisasi ISIS dan teroris tidak akan melakukan gerakan partisipasi sebagai wujud keterlibatan dengan gerakan radikal.

Hal itu tidak mustahil terjadi. Di daerah Jawa, beberapa generasi muda melakukan aksi-aksi radikalisme karena otaknya sudah menjadi teroris, seperti yang terjadi di Surabaya depan kantor polda di pos jaga. Beberapa pemuda dengan mengendarai motor melakukan aksi teroris di depan polisi yang melakukan penjagaan di pos pintu masuk polda Surabaya. Apa yang terjadi di daerah Jawa tidak terjadi di daerah Provinsi Gorontalo. Bila keinginan dan harapan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah kuat, maka kejadian aksi-aksi teroris yang pelakunya generasi muda tidak akan terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo.

Ada suatu keunikan dalam data hasil survei pada pertanyaan di atas, yaitu beberapa responden mengambang dalam menjawab pertanyaan. Hal ini ditunjukkan data generasi muda yang kebingungan memberikan jawaban pada pertanyaan penelitian padahal pertanyaan penelitian ini mengorek keterangan langsung dari responden terhadap sikap generasi muda. Kegamangan generasi muda dalam menjawab penelitian ini merupakan sebuah pertanyaan mengapa generasi muda tidak dapat menyatakan sikap positif pada pertanyaan penelitian. Entah disebabkan oleh karena ketidaktahuannya, atau mengetahui, tetapi tidak ingin menyatakan sikapnya pada opsi penelitian. Namun, fenomena ini dapat generalisasi sebagai ancaman bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan formal untuk lebih giat memberikan sosialisasi kepada generasi muda di daerah Gorontalo akan ancaman gerakan radikalisme bagi kelangsungan negara dalam membangun hubungan harmonis atau kebinekaan sebagaimana yang tertuang dalam ideologi Pancasila dengan semboyan *bhineka tunggal ika*.

Responden yang gamang di dalam menjawab pertanyaan penelitian ada empat orang generasi muda atau 4,35% menjawab “ragu-ragu”. Keraguan responden dalam penelitian ini harus menjadi perhatian kita semua dalam rangka menjaga stabilitas daerah dari ancaman gerakan radikalisme. Keraguan responden menjadi jawaban akan pentingnya memberikan upaya preventif dalam mencegah masuknya aliran ideologi radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo. Dalam kajian ketahanan nasional, generasi muda yang gamang terhadap sikapnya pada aliran radikalisme merupakan lahan bagi provokator teroris dalam mengajak generasi muda bergabung dalam gerakan radikalisme. Oleh karena itu, kegamangan atau keraguan dalam penelitian ini dianggap sebagai ancaman, artinya generasi muda tersebut

dianggap rawan dalam melakukan atau bergabung dengan gerakan teroris. Untuk mencegah generasi muda tidak terlibat dalam gerakan radikalisme diperlukan proses deradikalisasi dengan cara memberikan pemahaman akan larangan gerakan radikalisme tumbuh berkembang di negara Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila.

Dalam menelusuri sikap dan perilaku generasi muda mengetahui dan memahami gerakan radikalisme pada penelitian ini diperlukan pertanyaan ketegasan sikap generasi muda terhadap fenomena radikalisme di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, bentuk pertanyaan penelitian diarahkan kepada: *“Radikalisme merupakan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimanakah sikap Anda terhadap pernyataan tersebut?”* Pernyataan ini mendapat tanggapan dari responden dapat dilihat melalui tabel 3.14 di bawah.

Tabel 3.14 Radikalisme Merupakan Sikap yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	30	32,61
b	Setuju	34	36,95
c	Ragu-ragu	4	4,35
d	Tidak setuju	3	3,26
e	Sangat tidak setuju	21	22,83
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Berdasarkan data hasil survei ini menunjukkan bahwa sikap generasi muda kita dianggap rawan dalam merespons pertanyaan penelitian ini. Hal itu karena pertanyaan ini sesungguhnya pertanyaan yang sifatnya penegasan kepada generasi muda tentang sikap mereka. Artinya, harapan dari penelitian ini responden memberikan tanggapan persetujuan atas pertanyaan penelitian. Fenomena ini merupakan sesuatu yang harus diterima sebagai fakta sosial di mana masih ada kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo yang

masuk klasifikasi rawan berkembangnya paham radikalisme dalam alam pikiran dan jiwanya. Memang di daerah Provinsi Gorontalo belum ada aksi gerakan radikalisme, seperti aksi-aksi teroris, aksi komunis, aksi ISIS. Namun, pemikiran mereka adalah radikal. Ini dianggap rawan karena memiliki potensi keikutsertaan dengan organisasi radikal. Walaupun pernyataan sikap telah ada, tetapi gerakan partisipasi pada gerakan radikalisme belum terjadi di daerah Provinsi Gorontalo.

Dengan demikian, pemerintah daerah Gorontalo dan perguruan tinggi harus melakukan upaya preventif pada *mindset* generasi muda kita yang dianggap rawan agar sikap mereka menjurus pada kegiatan partisipasi gerakan radikal. Bila dilihat dari teori perilaku menyimpang, seseorang berpotensi melakukan tindakan radikal apabila alam pikiran dan jiwanya sudah melakukan pembenaran pada aksi-aksi radikalisme. Inilah yang dijadikan pintu masuk (*trigger*) para provokator teroris untuk mengajak generasi muda bergabung dengan kelompok radikal di Indonesia. Hal ini terbukti dari sebagian besar pelaku bom bunuh diri adalah dilakukan oleh kalangan generasi muda yang alam pikiran dan jiwanya telah terkontaminasi oleh aliran radikal.

Kerawanan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo terlihat dari tanggapan responden yang menyatakan sikap “sangat tidak setuju” berjumlah 21 orang generasi muda atau 22,83% dan yang menyatakan “tidak setuju” berjumlah 3 orang generasi muda atau 3,26% pada pernyataan penelitian. Pilihan lain yang dianggap rawan adalah memberikan sikap karaguan kepada sesuatu yang sudah pasti pelanggaran memberikan pernyataan gamang, yaitu sejumlah 4 orang generasi muda atau 4,35%. Hasil survei ini mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk lebih giat melakukan upaya deradikalisasi kepada generasi muda yang memiliki sikap

sangat tidak setuju, tidak setuju, dan ragu-ragu pada penelitian ini. Walaupun angka ini tidak menjadi angka yang besar, tetapi populasi generasi muda di daerah Gorontalo separuh dari generasi tua. Jadi, perlu perhatian khusus kepada generasi muda kita agar tidak masuk dalam aliran radikal.

Sekalipun dalam hasil survei ini menunjukkan adanya kerawanan pada generasi muda kita terhadap bahaya laten radikalisme. Namun, kita pun bergembira pada responden yang bersikap sangat setuju dan setuju bila ideologi radikalisme dikatakan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hal ini berarti generasi muda kita yang memilih sikap positif ini menjadi harapan generasi berikutnya. Pepatah mengatakan, bila generasi hari ini rusak, maka generasi selanjutnya pun akan mengalami yang sama bahkan lebih rusak dari generasi hari ini.

Responden yang bersikap positif pada pernyataan di atas berjumlah 30 generasi muda atau 32,61% menyatakan “sangat setuju” dan yang menyatakan “setuju” 34 orang generasi muda atau 36,95%. Semua terjadi karena pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi melakukan sosialisasi pada generasi muda sehingga dari hasil survei penelitian masih menggembirakan akan adanya tingkat kesadaran generasi muda terhadap bahaya laten paham radikalisme.

Untuk menggali lebih dalam lagi sikap generasi muda terhadap bahaya laten radikalisme dapat dilakukan melalui pernyataan penelitian tentang: *“Pembentukan organisasi ISIS (Islamic Staats Irak Surya) bila didukung oleh kalangan generasi muda di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bagaimanakah sikap Anda dengan pernyataan tersebut?”* Pernyataan ini lebih dikhususkan kepada sikap gerakan radikalisme pada organisasi ISIS sebagai bagian dari gerakan radikalisme global yang pengaruhnya sampai kepada generasi

muda di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh kasus-kasus peledakan bom bunuh diri di daratan Jawa dengan menggunakan simbol bendera ISIS.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh radikalisme global di kalangan generasi muda di daerah Gorontalo dapat dilihat melalui hasil survei di bawah ini.

Tabel 3.15 Pembentukan Organisasi ISIS (*Islamic Staats Irak Surya*) Bertentangan dengan Nilai-Nilai Falsafah Bangsa, yakni Pancasila

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	9	9,78
b	Setuju	22	23,91
c	Ragu-ragu	19	20,65
d	Tidak setuju	17	18,48
e	Sangat tidak setuju	24	26,08
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Bila melihat hasil survei di atas menunjukkan generasi muda yang ada di daerah Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap pengaruh radikalisme. Hal ini akan menjadi ancaman bagi ketahanan wilayah di daerah ini walaupun baru sebatas pernyataan sikap responden yang tidak menyalahkan aksi radikalisme bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sikap seperti inilah yang perlu kita waspadai pada generasi muda kita. Bila alam pikiran dan jiwanya telah memilih sikap tidak setuju dan sangat tidak setuju pada pertanyaan penelitian yang sifatnya mengorek pengetahuan dan pemahaman generasi muda akan bahaya laten paham radikalisme akan mendorong generasi muda kita dapat terlibat pada gerakan radikalisme, bila ada yang mengajak mereka masuk dalam kelompok radikal tersebut seperti bergabung dengan kelompok ISIS dan teroris.

Responden yang bersikap seperti ini berjumlah 24 orang generasi muda atau 26,08% yang menyatakan “sangat tidak setuju” pada pernyataan penelitian dan responden yang “tidak

setuju" berjumlah 17 orang generasi muda atau 18,48%. Jumlah ini sangat banyak bila dihitung dari jumlah populasi generasi muda yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo. Artinya, responden yang dijadikan sampel hanya 92 generasi muda saja telah terindikasi alam pikiran mereka dengan paham radikalisme sekalipun bentuk pernyataan tidak menanyakan alasan mereka bersikap seperti itu. Memang dalam survei tersebut pertanyaan maupun pernyataan tidak ditujukan secara langsung guna menghindari responden merasa takut dengan memberikan pernyataan tersebut. Untuk mengungkap apa sesungguhnya yang ada dibenak responden, pertanyaan penelitian perlu diperluas lagi hingga responden penelitian dapat mengungkap fakta yang sebenarnya mengapa mereka memilih sikap negatif seperti pada hasil temuan penelitian ini.

Hal lain yang unik dalam hasil survei ini adalah responden yang menyatakan sikap keraguan. Keraguan menunjukkan adanya kegamangan generasi muda kita akan pemahaman dan pengetahuan ideologi radikalisme. Responden merasa bimbang apakah ideologi radikalisme tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila atau justru hal ini adalah merupakan perintah agama sebagaimana yang diwajibkan dalam nilai sila pertama Pancasila berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pemahaman menyimpangnya adalah dianggap ISIS dan terorisme merupakan perwujudan dalam rangka menegakkan tauhid sesuai dengan amanah sila pertama. Mungkin inilah yang menjadikan responden yang memilih ragu-ragu dalam pertanyaan penelitian ini.

Responden yang memiliki sikap keraguan pada pernyataan penelitian ini berjumlah 19 orang generasi muda atau 20,65%. Sikap ini pun dapat dianggap rawan karena generasi muda yang tidak punya sikap yang pasti untuk menyatakan sesuai dengan harapan pertanyaan penelitian akan

dijadikan target oleh sekelompok orang yang tergabung dalam gerakan radikal, seperti ISIS dan terorisme.

Di balik kecemasan kita pada generasi muda di daerah Gorontalo yang mungkin memiliki sikap ketidakpastian, masih ada secerca harapan kepada generasi muda kita yang ada di Provinsi Gorontalo memiliki kesadaran bela negara yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh sikap responden yang menyatakan persetujuannya bahwa gerakan ISIS dan sejenisnya ini bertentangan dengan ideologi Pancasila. Artinya, apa pun alasan gerakan radikalisme, tetap tidak sesuai dengan falsafah negara kita, yakni Pancasila. Hal ini karena pancasila sangat mengedepankan rasa kemanusiaan dalam melakukan perubahan bukan dengan tindakan kekerasan. Responden yang menyatakan persetujuannya terhadap pertanyaan penelitian berjumlah 22 orang generasi muda atau 23,91% dan yang menyatakan setuju 9 orang atau 9,78%.

Apa yang ada dalam hasil survei di atas menunjukkan kepada kita semua khususnya pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi untuk lebih fokus kepada pembinaan generasi muda melalui kegiatan sosialisasi kepada generasi muda kita terhadap penolakan sikap pemerintah pada kegiatan radikalisme apa pun bentuknya, baik itu gerakan ISIS, teroris, maupun PKI. Semua ini menjadi perhatian kita semua untuk melakukan pencegahan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bila responden masih gamang dengan pertanyaan di atas, dapat didekatkan lagi dengan pertanyaan yang dapat mudah dimengerti dan dipahami oleh responden. Pertanyaan peneliti selanjutnya adalah: *"Pernyataan di atas tentang pembentukan ISIS bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan. Bagaimana sikap Anda dengan pernyataan tersebut?"* Hal ini

mendapat tanggapan dari responden penelitian sebagaimana yang ada dalam tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16 Ideologi ISIS Bertentangan dengan Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Demokrasi, dan Nilai Keadilan yang Ada dalam Falsafah Pancasila

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	33	35,87
b	Setuju	20	21,74
c	Ragu-ragu	18	19,57
d	Tidak setuju	20	21,74
e	Sangat tidak setuju	1	1,1
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekes Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Hasil survei di atas menunjukkan responden penelitian ini ada indikasi potensi dalam alam pikirannya radikal. Artinya, jawaban yang diberikan oleh responden merupakan sikap yang ada dalam alam pikirannya yang telah terkontaminasi paham radikal. Ini dibuktikan dari hasil survei responden yang menyatakan sangat tidak setuju bila organisasi ISIS (*Islamic Staats Irak Surya*) yang pengikutnya sudah tersebar di tanah Jawa dinyatakan gerakannya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka masih menganggap bahwa gerakan ISIS yang melakukan tindakan kekerasan dengan cara meledakkan bom bunuh diri merupakan sebuah sunah atau menjadi kewajiban anggota dan simpatisan ISIS di Indonesia. Mereka berjumlah 20 orang generasi muda memilih sikap “tidak setuju” atau 21,74% dan “tidak setuju” 1 orang generasi muda atau 1,1%.

Hasil survei responden di atas menunjukkan adanya kerawanan pada generasi muda kita dari sudut alam pemikirannya. Biasanya, keterlibatan seseorang dengan organisasi radikal selalu dimulai dari *mindset* pemikiran seseorang. Artinya, mudah bagi anggota radikalisme mengajak seseorang bila seseorang tersebut melakukan pembenaran kepada aksi-aksi yang dilakukan oleh organisasi radikalisme.

Dengan kondisi generasi muda yang telah memilih sikap sangat tidak setuju dan tidak setuju pada pernyataan penelitian ini harus dilakukan upaya pembinaan pada generasi muda tersebut. Caranya adalah pemerintah dan lembaga perguruan tinggi tidak henti-hentinya mengadakan kegiatan sosialisasi kepada generasi muda yang ada di daerah Gorontalo. Sosialisasi tidak hanya diberikan secara parsial, tetapi komprehensif kepada semua generasi muda kita. Untuk kita yang berada di perguruan tinggi akan melakukan diskusi melalui kegiatan FDG tentang fenomena radikalisme di kalangan generasi muda yang akan dilakukan di Universitas Negeri Gorontalo. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa kita akan bahaya laten paham radikalisme di kalangan generasi muda di Indonesia.

Bagi responden yang memilih ragu-ragu dalam pernyataan penelitian ini menunjukkan adanya sikap kegamangan. Artinya, dapat diartikan setuju atau tidak setuju pada pernyataan penelitian ini. Kondisi seperti ini merupakan sikap yang mudah terpengaruh oleh kelompok radikal. Ketidaklabilan jiwa dan pikiran generasi muda dalam menentukan sikap tersebut menjadikan lahan subur bagi berkembangnya paham radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo. Responden yang memilih sikap keraguan dalam pernyataan penelitian di atas berjumlah 18 orang generasi muda atau 19,57%.

Data hasil survei di atas memberikan *warning* kepada pihak pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi untuk mengantisipasi masuknya paham radikalisme bagi generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo. Bila pemerintah daerah lengah melihat fenomena generasi muda kita yang nyata memberikan sikap dukungannya kepada gerakan radikal seperti ISIS dengan mengembangkan ideologi kekerasan dalam melakukan perubahan. Biasanya, gerakan radikal selalu

menggunakan kekerasan untuk melakukan perubahan atau mereka melakukan aksi-aksi teroris bila berbeda konsep pembangunan dengan pemerintah yang sah. Fenomena ini akan menambah jumlah anggota radikalisme bila kita tidak segera berbuat dalam meluruskan kembali pemahaman generasi muda kita.

Namun, di balik kekhawatiran kita terhadap generasi muda akan pengaruh radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo masih ada beberapa keberhasilan kita dalam melakukan upaya sosialisasi kepada generasi muda akan adanya bahaya laten paham radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo. Hal ini ditunjukkan oleh responden yang memilih sikap sangat setuju dan setuju bahwa aksi-aksi gerakan radikalisme, seperti ISIS, bertentangan dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan rasa keadilan masyarakat. Sejumlah 33 orang generasi muda atau 35,87% memilih sikap “sangat setuju” dan 20 orang generasi muda atau 21,74% memilih sikap “setuju”. Responden yang menyatakan kesepakan dengan pernyataan di atas ini dinilai aman dalam menciptakan stabilitas di daerah Provinsi Gorontalo.

Untuk mendalami alam pikiran generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo, pertanyaan yang lebih spesifik guna mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi di dalam jiwa dan pikiran generasi muda kita khususnya di daerah Provinsi Gorontalo. Pertanyaan yang diajukan adalah: *“Gerakan terorisme seperti yang terjadi di Indonesia di masa Dr. Azhari dan Santoso warga negara Malaysia merekrut M. Rozi, Nurdin M. Top dkk., di Indonesia merupakan gerakan yang anti terhadap nilai Pancasila. Bagaimanakah sikap Anda dengan pernyataan tersebut?”* Pertanyaan ini mendapat tanggapan dari responden penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.17 Gerakan Terorisme yang Dibawa oleh Dr. Azhari dan Noerdin M. Top dari Negara Malaysia Merupakan Gerakan yang Anti terhadap Nilai Pancasila

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	25	27,17
b	Setuju	20	21,74
c	Ragu-ragu	7	7,61
d	Tidak setuju	21	22,83
e	Sangat tidak setuju	19	20,65
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Berdasarkan data hasil survei di atas menunjukkan generasi muda di daerah Gorontalo belum mengetahui informasi yang utuh tentang keberadaan gerakan teroris yang dibawa oleh Dr. Azhari, seorang warga negara Malaysia, yang melakukan perekrutan pada generasi muda di Indonesia. Akhirnya, beberapa generasi muda bangsa Indonesia terlibat dalam gerakan radikalisme yang memporak-porandakan Kota Jakarta dan Bali sebagai tempat wisata Internasional dan penghasil devisa negara dalam menggenjot APBN dari sektor pariwisata. Artinya, Dr. Azhari dapat memengaruhi *mindset* generasi muda kita untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri atas dasar ideologi teroris dimaknai sebagai gerakan jihad. Ini adalah propaganda Dr. Azhari yang ingin negeri kita tidak lagi dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan domestik. Aksi-aksi yang dilakukan oleh generasi muda kita yang terlibat dalam gerakan teroris telah merugikan kita negara RI.

Untuk membuktikan bahwa generasi muda yang ada di daerah Gorontalo salah kaprah atas penilaian tersebut, dapat dilihat dari hasil survei di atas. Responden yang memilih sikap “sangat tidak setuju” berjumlah 19 orang atau 20,65% dan “tidak setuju” berjumlah 21 orang atau 22,83%. Data ini menunjukkan responden menganggap semua yang dilakukan oleh Dr. Azhari di Indonesia merupakan perintah agama atas dasar jihad. Jadi, apa yang dilakukan oleh kelompok teroris itu tidak berentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Memang dalam penelitian ini tidak mengungkap apa alasan mereka memilih sikap tidak setuju. Akan tetapi, di awal penelusuran dengan beberapa pertanyaan yang mendahului-nya telah mempertanyakan sikap akan pengetahuan dan pemahaman generasi muda terhadap gerakan radikalisme. Mereka bersikap mengetahui dan memilih sikap tidak menyalahkan gerakan radikalisme sebagaimana yang menjadi harapan penelitian ini, yaitu menolak dan mengutuk aksi-aksi gerakan teroris di Indonesia. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Inilah fenomena generasi muda kita yang ada di daerah Provinsi Gorontalo. Gerakan radikalisme ini harus dicarikan jalan keluarnya agar generasi muda kita tidak melakukan pembenaran terhadap aksi-aksi gerakan teroris yang mengatasnamakan agama dengan misi jihad.

Pilihan keraguan pada pernyataan penelitian di atas dapat juga menjadi ancaman bagi wilayah Provinsi Gorontalo. Generasi muda berpotensi terpengaruh oleh gerakan radikal, seperti gerakan terorisme yang dibawa oleh Dr. Azhari dan Noerdin M. Top dari negara Malaysia. Ini terbukti setelah kedua tokoh teroris tersebut telah dihukum mati, tetapi pengaruhnya masih tetap hidup dan berkembang. Fakta tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya generasi muda yang bersedia melakukan bom bunuh diri di daerah DKI Jakarta, Jawa, Surabaya dll. Di Sulawesi, ada gerakan yang dipimpin oleh Santosa dan pengikutnya yang berada di pegunungan Sulawesi Tengah (Poso) yang sampai hari ini masih menjadi ancaman bagi Indonesia.

Fenomena yang menarik dari gerakan ini adalah pemimpinnya telah tertangkap dan dieksekusi namun pengikutnya generasi muda bertambah selnya. Ini yang menarik untuk dikaji oleh pemerintah dan perguruan tinggi mengapa ideologi radikalisme masih tetap ada dan menjadi ancaman bagi stabilitas daerah dan berpengaruh bagi

ketahanan nasional. Dengan demikian, pilihan keraguan bagi responden yang berjumlah 7 orang generasi muda atau 7,61% harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Memang angka ini sangat sedikit bila dilihat dari sampel 92 orang generasi muda. Namun, bila data sampel diperluas sejumlah populasi generasi muda di daerah Gorontalo, kurang lebih setengah dari jumlah generasi tua, akan bertambah banyak. Bisa saja angka yang memiliki kebingungan dalam menentukan sikap naik 100 kali lipat. Kita tidak hanya mempersoalkan angka banyak yang memilih sikap gamang. Namun, sudah dapat dipastikan kegamangan generasi muda yang ada di daerah Provinsi Gorontalo akan menjadi sumber ancaman stabilitas daerah dan berpengaruh kepada ketahanan nasional bila kita tidak segera meluruskan *mindset* dari generasi muda sebagai generasi emas masa depan bangsa ini.

Namun, kekhawatiran di atas tertutupi dengan keberhasilan generasi muda kita yang masih konsisten terhadap keyakinan pada ideologi Pancasila. Inilah yang disebut geberasi emas bangsa ini sebagai generasi penerus yang akan setia kepada ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 (konstitusi). Mereka inilah diharapkan dapat memberikan virus kebaikan kepada sesama generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo yang alam dan jiwa pikirannya telah dirasuki oleh ideologi radikalisme, seperti ISIS dan gerakan terorisme global.

Generasi emas yang dijarah lewat hasil penelitian ini adalah responden yang memilih sikap sangat setuju dan setuju bila gerakan yang dibawa oleh pentolan terorisme global selnya Osama bin Laden dari negara Afganistan adalah sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945. Responden yang memilih sikap “sangat setuju” berjumlah 25 orang generasi muda atau 27,17% dan yang memilih “setuju” berjumlah 20 orang generasi muda atau

21,74%. Data ini harus lebih ditingkatkan lagi persentasenya untuk menjadi maksimal 100% sehingga Provinsi Gorontalo bebas dari ancaman gerakan radikalisme global yang akan mengancam stabilitas nasional dan memberikan pengaruh kepada kondisi ketahanan nasional.

Untuk lebih menegaskan kembali apakah generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo ini tidak terindikasi oleh gerakan radikalisme global, maka pertanyaan harus dapat menggali apa yang alam pikiran dan jiwa dari generasi muda. Pertanyaan yang diajukan adalah: *"Bagaimanakah sikap anda bila anggota Teroris oleh negara dijatuhi hukuman mati?"* Pertanyaan ini mengorek sikap yang ada di dalam lubuk hati responden apakah generasi muda setuju dengan harapan penelitian yang bersikap menyetujui pernyataan penelitian ini atau tidak. Harapan pada penelitian ini adalah memilih sikap setuju karena apa yang dilakukan oleh teroris merupakan kejahatan besar dan masuk dalam kategori *ekstra ordinere craim* atau juga melanggar *Human Rights* pelanggaran *Genoside*. Biasanya, kejahatan teroris selalu yang menjadi korbannya adalah sekelompok orang yang berbeda ideologi dengan teroris sehingga harapan penelitian mereka pelaku aksi-aksi terorisme global lebih pantas dijatuhi hukuman mati.

Namun, terkadang pilihan responden memilih sikap tidak setuju karena dasar *Human Rights* sebagai negara demokrasi, maka hukuman mati tidak diakui, yang ada hukuman seumur hidup. Inilah yang menjadi sikap mereka tidak setuju. Akan tetapi, dalam hukum nasional, kita masih memberlakukan hukuman mati agar memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan kejahatan yang sama. Memang bila ditelaah dengan ideologi Pancasila, hukuman mati tidak senapas dengan nilai sila pertama dan sila kedua yang sangat menghormati hak asasi manusia. Artinya, hak untuk menghidupkan dan mematikan itu adalah hak sang pencipta sehingga hukuman mati

merupakan pilihan yang dilematis oleh hakim sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan dengan rasa keadilan masyarakat. Bila pelaku bom bunuh diri tidak pernah menghormati hak asasi manusia atas korban bom bunuh diri puluhan dan ratusan nyawa melayang oleh pelaku satu orang atau dua dan tiga orang, sangat pantas bila pelakunya dieksekusi mati.

Dalam kajian hukum Islam, mereka yang melakukan pencurian dipotong tangannya. Mereka yang membunuh orang juga mendapatkan hukuman mati sebagai akibat dari perbuatannya. Memang ini sangat adil. Namun, dalam negara RI yang memiliki ideologi Pancasila, sumber hukum positif hukum pidana bersumber dari jabaran nilai-nilai ideologi Pancasila ini masih dapat kita bicarakan lagi. Bukan berarti hukum Islam bertentangan dengan nilai universal keduniawian. Namun, dalam hukum Islam, sanksi di dunia merupakan kelanjutan dari hukuman di akhirat. Artinya, kita yang beragama Islam sangat setuju dengan hukuman itu, tetapi kita sebagai negara berideologi Pancasila harus juga mempertimbangkan agama lain. Semua ini telah diakomodasi oleh ideologi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di negara kita yang menjunjung tinggi negara multikultural dan multireligius.

Data hasil survei pada pernyataan penelitian di atas dapat kita lihat melalui tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18 Sikap Anda bila Anggota Teroris oleh Negara Dijatuhi Hukuman Mati

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	63	68,48
b	Setuju	16	17,39
c	Abstain	5	5,43
d	Tidak setuju	5	5,43
e	Sangat tidak setuju	3	3,27
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekes Negeri Gorontalo Periode Juni-Agustus Tahun 2018.

Berdasarkan data hasil survei di atas, yang memilih sikap “sangat setuju” berjumlah 63 orang generasi muda atau 68,48% dan memilih sikap “setuju” 16 orang generasi muda atau 17,39%. Ini membuktikan ada keinginan generasi muda kita tidak menghendaki adanya para pelaku teroris di Indonesia karena perbuatan teroris sangat tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sikap responden penelitian ini perlu kita apresiasi karena sebagian besar memilih sikap sepakat bila pelaku teroris dihukum mati. Hukuman ini dilakukan sebagai pesan kepada mereka yang ingin melakukan bom bunuh diri menjalankan misi organisasinya. Total responden yang sepakat atas pernyataan penelitian adalah 79%. Hal ini sangat menggembirakan karena sebagian besar generasi muda memilih sikap sepakat atas pemberlakuan hukuman mati atas pelaku teroris di Indonesia.

Sikap positif generasi muda di atas tidak membuat kita terlena dengan capaian sikap responden yang menyatakan kesepakatan. Berdasarkan data hasil survei di atas, masih ada generasi muda kita tidak sepakat terhadap pemberlakuan hukuman mati. Sikap ini tidak dapat diungkap lewat penelitian ini, tetapi dapat diprediksi berdasarkan hasil survei yang mendahului pertanyaan ini, yang menunjukkan adanya kerawanan bila generasi muda memilih tidak sepakat. Jumlah responden yang memilih sikap “sangat tidak setuju” adalah 3 orang generasi muda atau 3,27% dan “tidak setuju” berjumlah 5 orang generasi muda atau 5,43%.

Berdasarkan data hasil survei ini pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus dapat menjelaskan kepada generasi muda akan bahaya terorisme sebagai akibat dari ideologi radikalisme. Bila kita berdebat pemberlakuan hukuman mati dalam perspektif hukum Pancasila tidak akan menemukan titik temu karena hukum Pancasila mengakomodasi rasa keadilan masyarakat. Artinya, bila kita mendasari pada hukum liberal

yang mendasarkan kepada *Human Rights*, pemberlakuan hukuman mati dianggap melanggar hak hidup seseorang. Namun, untuk hukum Pancasila lebih dititikberatkan kepada rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, bagi masyarakat kita jangan sampai melakukan aksi-aksi yang dapat menghilangkan banyak warga negara yang kehilangan nyawanya akibat dari aksi terorisme di Indonesia. Bila kita mendasarkan kepada rasa keadilan masyarakat, bagi mereka yang keluarganya menjadi korban aksi terorisme, mereka tidak setuju kalau pelaku teroris hanya mendapat *punishment* hukuman seumur hidup di lembaga pemasyarakatan, sedangkan keluarganya jiwanya direnggut dengan cara-cara yang sangat tidak berperikemanusiaan oleh pelaku teroris.

Perdebatan penerapan sanksi ini jangan didekati dengan perspektif *Human Rights* ideologi liberal. Namun, harus dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh gerakan teroris. Dengan demikian, maksud pemberlakuan hukuman mati bertujuan untuk menghindari orang yang dengan seenaknya membunuh orang atas dasar ideologi sesat sebagaimana yang diyakini oleh gerakan teroris.

Bila kita berdebat dengan pemberlakuan hukuman mati berdasarkan ideologi Pancasila, maka kita menempatkan dulu apakah perbuatan gerakan terorisme itu dengan pendekatan pemahaman Pancasila sebagai sebuah sistem. Artinya, bila aksi terorisme dinilai bersarkan nilai ketuhanan, maka perbuatan aksi teroris yang mengambil nyawa orang yang tidak tahu akan tujuan teroris itu sangat bertentangan dengan nilai ketuhanan yang menjadi ajaran Pancasila. Mereka yang mengakui keyakinan agamanya tidak pernah mengajarkan seseorang untuk menghilangkan nyawa seseorang karena berbeda pandangan dengan keyakinan teroris.

Sifat-sifat ketuhanan yang ada dalam nilai Pancasila berlaku secara universal di seluruh belahan dunia ini, kecuali mereka yang menganut ideologi komunisme yang ateis tidak meyakini akan adanya Sang Khalik. Hampir semua negara yang memiliki ideologi komunis melakukan sesuatu tidak mempertimbangkan pendekatan agama. Berbeda dengan kita yang memiliki ideologi Pancasila. Dalam sila pertama mengandung makna negara meyakini dan mengakui hak-hak warga negaranya dalam menganut keyakinan agamanya. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh gerakan teroris, yakni melakukan aksi-aksi kekerasan sampai dengan menghilangkan nyawa banyak orang, sangat bertentangan dengan nilai ketuhanan. Hal ini karena Sang Khalik memiliki sifat-sifat humanis dalam melihat perbuatan umatnya.

Satu contoh yang dekat Tuhan tidak pernah mencabut nyawa seseorang yang tidak mengakui adanya dirinya. Namun, Tuhan akan tetap menunggu akan tiba saatnya ajal datang kepada orang yang tidak meyakini akan eksistensinya. Lihatlah negara komunis dan Firaun legenda perjalanan manusia yang zalim dan tidak mengakui akan keesaan Sang Khalik. Negara komunis tetap ada dan Firaun meninggal karena Allah telah menghendaki kematiannya, bukan dengan cara-cara teroris menghilangkan nyawa orang yang tidak berdosa. Semua ini adalah sifat pemurahnya Sang Khalik. Akan tetapi, sekalipun tidak percaya dengan Sang Khalik, pasti kita akan menemui kematian dengan cara-cara Sang Khalik mengambil nyawa kita dengan rasa kemanusiaan. Tidak seperti teroris mengambil jiwa orang yang berbeda keyakinan dengan ideologi teroris.

Kesimpulan dari makna di atas adalah dalam Pancasila, khususnya sila pertama, sangat tidak setuju bila ideologi radikalisme dianut oleh generasi muda. Bagi Pancasila, pemberlakuan hukuman mati tidak menjadi halangan bagi

negara Pancasila. Hal ini karena perbuatan teroris sangat bertentangan dengan nilai ketuhanan yang memiliki rasa pemurah dan pengasih kepada umatnya.

Bila aksi-aksi teroris didekati dengan nilai kemanusiaan, maka aksi terorisme dinilai sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan sebagaimana yang menjadi ajaran Pancasila, khususnya sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Artinya, tepat bila pemberlakuan hukuman mati itu dilakukan kepada aksi teroris demi menghormati rasa kemanusiaan para korban-korban gerakan teroris. Menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku bom bunuh diri sebagai anggota teroris tidak dianggap bertentangan dengan rasa kemanusiaan sebagaimana yang menjadi landasan *Human Rights* ajaran ideologi liberal dan ideologi komunisme, bahwa negara memberlakukan hukuman mati melanggar prinsip kemanusiaan. Negara Pancasila menempatkan hukuman mati sebagai konsekuensi dari perbuatan pelaku teroris yang banyak menghilangkan nyawa ketika aksi bom bunuh diri dilakukan. Tidak manusiawi juga bila kita tidak berlaku adil pada rasa kemanusiaan para korban-korban aksi gerakan radikalisme berupa kegiatan teroris melalui aksi bom bunuh dirinya.

Bila didekati dengan nilai Pancasila sila ke 3 “Persatuan Indonesia”, pemberlakuan hukuman mati bagi anggota teroris akan dapat mengurangi kegelisahan masyarakat Indonesia. Di negara liberal pun sangat menghormati rakyatnya. Negara harus mampu menciptakan stabilitas keamanan bagi warga negaranya (*freedom from want*), apalagi dengan negara Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila yang sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dengan kata lain, bila ada warga negara di Indonesia yang melakukan upaya menciptakan instabilitas di masyarakat, patut untuk diberi *punishment*. Bila itu aksi teroris yang menimbulkan banyak korban, maka patut mendapatkan sanksi terberat, seperti hukuman mati.

Dalam penerapan hukum Internasional, pelaku terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa dengan sanksi yang khususnya juga, biasanya hukuman mati. Terorisme, korupsi, dan narkoba diklasifikasikan sebagai kejahatan *ekstra ordinare craim* (kejahatan berat). Dengan demikian, hukuman mati bagi pelaku teroris bukan sesuatu hukuman yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ketiga. Pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku teroris bukan sesuatu yang melanggar HAM, melainkan perwujudan dari rasa keadilan bagi keluarga korban-korban aksi terorisme. *Punishment* bagi pelaku teroris sebagaimana yang ada dalam KUHP bertujuan untuk mencegah perbuatan aksi-aksi teroris. Selain itu, *punishment* melindungi warga negara dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang tidak ada hubungannya dengan keinginan kelompok radikal.

Sila keempat Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permuasyawaratan perwakilan” bila dikaitkan dengan pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku teroris sangat sesuai. Hal ini karena hukuman mati bagi pelaku teroris sangat bijak bila ini dimasukkan dalam KUHP. Perbuatan teroris sangat bertentangan dengan nilai demokrasi yang ada pada sila keempat. Keputusan politik DPR menetapkan hukuman mati bagi pelaku teroris karena ancaman teroris sangat berbahaya bagi kelangsungan negara. Untuk itu, hasil musyawarah anggota dewan Republik Indonesia (DPR RI) tepat bila hukuman mati dikenakan bagi pelaku teroris yang meresahkan, serta merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sikap generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo tentang tekadnya tidak menerima aliran radikal dapat ditelusuri dengan pertanyaan lanjutan. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan *punishment* hukuman mati sebagai alternatif dalam membaca sifat kegamangan generasi muda terhadap pelaku

teroris di Indonesia, dengan menurunkan setingkat dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Pertanyaan ini diberikan kepada responden guna mengetahui sikap generasi muda sanksi diberikan hanya menjadi hukuman seumur hidup. Pertanyaan yang diajukan adalah: *“Bila pilihan punishment atau sanksi itu diberikan pada pelaku atau otak terorisme, sebaiknya negara tidak melakukan hukuman mati. Namun, dengan hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Bagaimanakah sikap Anda?”* Pertanyaan ini mendapat tanggapan responden bervariasi yang dapat dilihat dari tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.19 Punishment Berupa Hukuman Seumur Hidup atau 20 Tahun Penjara

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	4	4,35
b	Setuju	33	35,87
c	Abstain	4	4,35
d	Tidak setuju	44	47,82
e	Sangat tidak setuju	7	7,61
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekes Negeri Gorontalo Periode Juni-Agustus Tahun 2018.

Hasil survei di atas menunjukkan bahwa komitmen generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo akan penolakan paham radikalisme sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survei responden penelitian yang menyatakan “tidak setuju” berjumlah 44 atau 47,82% dan “sangat tidak setuju” berjumlah 7 orang generasi muda atau 7,61%. Penolakan responden pada pernyataan ini menunjukkan betapa generasi muda menilai hukuman mati sudah sangat tepat bagi pelaku terorisme di Indonesia. Mereka tidak menginginkan bila tahanan teroris hanya mendapatkan hukuman seumur hidup. Sikap responden penelitian ini sangat baik dalam menangkai berkembangnya paham fundamentalisme Islam yang merusak citra Islam di mata dunia Internasional.

Selanjutnya, ada pula responden penelitian yang menjawab “sangat setuju” berjumlah 4 orang atau 4,35% dan “setuju” 33 responden atau 35,87%. Hal itu menunjukkan bahwa generasi muda masih menginginkan kesadaran bagi pelaku teroris untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kepribadian ideologi Pancasila. *Punishment* bagi pelaku teroris hanya dikenakan 20 tahun penjara untuk upaya penyadaran bagi pelaku teroris. Pada dasarnya, generasi muda kita memiliki sikap tidak setuju dengan keberadaan gerakan radikalisme di Indonesia.

Namun, sikap responden yang memilih sikap keraguan dalam menyatakan sikap terhadap pernyataan penelitian sejumlah 4 orang atau 4,35%. Ini yang menjadi fenomena dalam penelitian ini. Sikap tersebut perlu dikaji apakah generasi muda kita ada perasaan memberikan dukungan kepada pelaku teroris. Semua ini menjadi misteri bagi penelitian yang menjadi penelusuran kita dalam mengkaji apa sesungguhnya yang ada dalam pribadi mereka. Apa pun hasilnya, penelitian ini memberikan *warning* bagi kita untuk mewaspadaai adanya bahaya gerakan radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo.

Untuk penelusuran lebih lanjut terhadap sikap generasi muda terhadap gerakan radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo, maka pertanyaan penelitian diarahkan kepada otak pelaku dari terorisme. Pertanyaan yang diajukan adalah: *“Pantaskah para pelaku atau otak dari organisasi teroris di Indonesia dilakukan dengan cara hukuman mati oleh hakim di pengadilan?”* Pertanyaan ini mendapat respons yang positif dari generasi muda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20 Hukuman Mati bagi Para Pelaku atau Otak dari Organisasi Teroris di Indonesia

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat pantas	63	68,47
b	Pantas	24	26,09
c	Abstain	4	4,35
d	Tidak pantas	0	0
e	Sangat tidak Pantas	1	1,09
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Berdasarkan hasil survei di atas menunjukkan sikap generasi muda sangat konsisten terhadap penolakan gerakan radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo. Hal ini ditunjukkan oleh responden penelitian yang memilih sikap sangat pantas berjumlah 63 orang atau 68,47%. Sementara itu, sejumlah 24 orang atau 26,09% generasi muda memilih sikap pantas terhadap hukuman mati bagi otak pelaku teroris. Artinya, sikap generasi muda kita konsisten terhadap bentuk penolakan pada gerakan radikalisme bila masuk kewilayah Provinsi Gorontalo.

Ada juga responden yang memilih sikap keraguan terhadap otak pelaku terorisme bila dihukum mati. Artinya, bila ada sikap kegamanan generasi muda terhadap sanksi yang diberikan kepada otak pelaku terorisme bila dikenakan hukuman mati. Hal itu menunjukkan ada perasaan simpatik atau dilema bila hukuman mati bagi pelaku teroris dapat memberikan efek jera atau bertentangan dengan *Human Rights*. Mereka yang gamang pada pertanyaan di atas berjumlah 4 orang atau 4,35%. Akan tetapi, ada juga responden yang tidak setuju dengan pemberlakuan hukuman mati terhadap otak pelaku teroris di Indonesia, yaitu berjumlah 1 orang atau 1,09%. Sikap ini harus menjadi perhatian kita semua jangan sampai generasi muda kita bersimpatik kepada gerakan radikalisme. Semua ini perlu penelusuran lebih lanjut mengapa generasi

muda kita tidak memiliki sikap yang tegas pada pernyataan penelitian.

Untuk menindaklanjuti sikap generasi muda kepada bentuk gerakan radikalisme selain gerakan teroris yang berafiliasi dengan terorisme global di bawah komando Osama bin Laden sebagai tokoh inspirator teroris di Indonesia, pertanyaan penelitian pun ingin mengetahui sikap generasi muda kita dengan bentuk organisasi ISIS di bawah komando Muktar Albagdadi di Surya yang ingin menggulingkan pemerintah yang sah di negara Surya dengan melakukan aksi-aksi teroris sebagai pengembangan Islam fundamentalisme melawan pemerintah yang syah. Namun, semua bentuk radikalisme ini mendapat dukungan dan pengaruh dari gerakan radikalisme global di Indonesia. Faktanya, beberapa generasi muda kita melakukan aksi gerakan teroris dengan membawa simbol ISIS meledakkan diri di tempat-tempat umum dan menimbulkan korban jiwa.

Dengan melihat fenomena di atas, maka pertanyaan penelitian diarahkan kepada bentuk pertanyaan sebagai berikut: *“Bagi simpatisan ISIS (Islamic Staats Irak Surya) negara memberlakukan punishment atau sanksi yang sama dengan bentuk radikalisme teroris. Bagaimanakah sikap Anda dengan pernyataan tersebut?”* Pertanyaan ini mendapat tanggapan dari responden penelitian seperti yang ada pada tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21 Simpatisan ISIS (Negara memberlakukan *Punishment* atau Aanksi yang Sama dengan Bentuk Radikalisme Teroris.

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	11	11,96
b	Setuju	36	39,13
c	Abstain	5	5,43
d	Tidak setuju	22	23,91
e	Sangat tidak setuju	18	19,57
Jumlah		92	100 %

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekes Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Data hasil survei di atas menunjukkan adanya ancaman bagi generasi muda kita yang tidak dapat menyamakan gerakan teroris yang dibawa oleh ajaran Osama bin Laden di Timur tengah negara Afganistan dengan gerakan teroris yang dibawa oleh Muktar Albagdadi di Surya yang pengikutnya mendapat dukungan dari sebagian kecil masyarakat Indonesia. Faktanya, banyak aksi-aksi yang dilakukan oleh sebagian generasi muda kita mengatasnamakan gerakan jihad ISIS. Ancaman bagi daerah Provinsi Gorontalo karena data hasil survei menunjukkan adanya indikasi generasi muda kita sulit membedakan gerakan ISIS dan teroris ajaran Osama bin Laden. Ini dibuktikan dari data survei responden penelitian memilih sikap tidak setuju bila anggota ISIS di bawah komando Abdul Muin sebagai perwakilan pentolan ISIS yang ada di Indonesia mencari dukungan kalangan generasi muda di Indonesia dilakukan hukuman yang sama dengan teroris simpatisan Osama bin Laden. Responden yang memilih “tidak setuju” berjumlah 22 atau 23,91% dan yang memilih sikap “sangat tidak setuju” berjumlah 18 atau 19,57%. Sikap generasi muda yang memilih sikap sangat tidak setuju dan dan tidak setuju pada pemberlakuan hukuman mati ini menunjukkan adanya kerawanan bagi ketahanan wilayah di daerah Provinsi Gorontalo.

Namun, di tengah-tengah kecemasan kita pada sikap generasi muda yang memilih sikapnya yang seakan-akan pro pada gerakan ISIS, masih ada sebagian dari mereka yang memiliki sikap evaluasi pada gerakan tersebut. ISIS disamakan dengan gerakan teroris sebelum adanya pengaruh ISIS di kalangan generasi muda. Sikap ini ditunjukkan oleh pernyataan responden yang sangat menyetujui bila mereka yang tergabung dalam kelompok ISIS disamakan dengan gerakan teroris pengaruh pemikiran Osama bin Laden. Mereka ini memilih sikap setuju dan sangat setuju bila anggota ISIS

dilakukan hukuman mati. Responden yang menyatakan “setuju” berjumlah 36 orang atau 39,13% dan sikap “sangat setuju” berjumlah 11 orang atau 11,96%. Harapan baik itu lagi-lagi terbentur oleh sikap mereka yang masih gamang terhadap pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku teroris dari anggota ISIS. Mereka berjumlah 5 orang atau 5,43%. Pilihan abstain oleh responden menunjukkan keraguan perihal kelompok ISIS sama dengan gerakan teroris yang di bawah pengaruh Osama bin Laden atau tidak. Artinya, ISIS dianggap sebagai gerakan tauhid dalam menjalankan perintah jihad untuk memerangi lawan-lawan ISIS yang mengganggu perjuangan ISIS. Sikap abstain pada pernyataan penelitian di atas memberikan kesan dan harapan bagi pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk mengadakan sosialisasi atas gerakan radikalisme yang bertentangan dengan ajaran ideologi Pancasila. Bahwa semua agama di Indonesia yang menentang keberadaan gerakan ISIS di Indonesia.

Untuk menelusuri pengaruh radikalisme dalam bentuk organisasi ISIS di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo, perlu pertanyaan penelitian sebagai berikut: *“Bentuk radikalisme ISIS di Indonesia lebih pada cara deradikalisasi oleh negara. Artinya, bagi simpatisan ISIS hanya melalui proses pembinaan negara untuk dikembalikan kepada internalisasi nilai pancasila. Setujukah Anda bila pilihan negara hanya dengan melakukan deradikalisasi pada simpatisan ISIS?”* Pertanyaan tersebut mendapat tanggapan bervariasi dari responden penelitian yang dapat diamati melalui tabel 3.22 berikut.

Tabel 3.22 Bentuk *Punishment* Radikalisme ISIS di Indonesia Lebih pada Cara Deradikalisasi oleh Negara

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	3	3,26
b	Setuju	6	6,52
c	Abstain	66	71,74
d	Tidak setuju	8	8,70
e	Sangat tidak setuju	9	9,78
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekkes Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Fenomena unik terjadi dalam hasil survei di atas. Sejumlah 66 responden atau 71,74% memilih sikap “abstain”. Keunikan di sini adalah responden belum setuju bila pelaku ISIS hanya mendapatkan sanksi berupa sosialisasi wawasan kebangsaan. Mereka tidak menyetujui bila negara mengambil sikap hanya dengan memberlakukan program deradikalisasi saja tanpa hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati bagi anggota ISIS atau simpatisan ISIS. Bagi simpatisan ISIS, mungkin proses deradikalisasi masih sangat pantas. Akan tetapi, bagi anggota ISIS yang telah melakukan kegiatan teroris sampai dengan mengorbankan jiwa banyak orang, sanksi deradikalisasi tidak berbanding dengan perbuatan yang dilakukannya.

Hasil survei di atas menunjukkan generasi muda kita menghendaki para pelaku teroris dari anggota ISIS diperlakukan hukuman yang sama dengan gerakan teroris sebelumnya. Hukuman yang telah dilakukan pada teroris di bawah pengaruh gerakan Osama bin Laden dapat dilakukan pada anggota ISIS binaan Abdul Muin selnya Muktar Albagdadi di Irak dan Surya. Responden yang “tidak setuju” ini berjumlah 8 orang atau 8,70% dan responden memilih sikap “sangat tidak setuju” 9 orang atau 9,78%. Sikap tidak setuju dan sangat tidak setuju memberikan pengaruh yang positif bagi generasi muda kita yang ada di daerah Provinsi Gorontalo. Sikap ini menunjukkan konsistensinya generasi muda menolak

adanya gerakan teroris, baik itu dari kelompok Muktar Albagdadi ISIS maupun simpatisan kelompok teroris Osama bin Laden. Kedua organisasi fundamentalis tersebut sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Untuk mencegah kelompok ini, pemerintah harus tegas dengan memberlakukan hukuman yang setinggi-tingginya hingga pemberlakuan hukuman mati. Akan tetapi, tidak dengan jalan program deradikalisasi bagi pelaku teroris kelompok ISIS.

Untuk melihat fenomena gerakan radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo, tidak hanya dilihat dari kelompok teroris Osama bin Laden dan gerakan teroris ISIS, tetapi harus dilihat juga dari gerakan bahaya laten ideologi komunisme. Komunisme di Indonesia dilakukan oleh organisasi PKI yang secara resmi diberi ruang oleh pemerintah orde lama mendirikan partai komunis. Hal ini ditunjukkan ketika pemilu pertama tahun 1955 diadakan. Partai Komunis Indonesia mendapat empat terbesar dari sepuluh kontestan partai yang ikut pemilu saat itu. Ini membuktikan bahwa simpatisan PKI dan anggotanya jumlahnya sangat banyak, bahkan sampai berkembang di daerah Gorontalo. Hal tersebut ditunjukkan oleh daftar masyarakat Gorontalo sesuai skrining orde baru terdaftar dalam data pemerintah melalui dinas Kesbangpol dan data yang ada di BIN, serta TNI masyarakat yang menjadi pengikut setia partai komunis ini.

Memang awal pra kemerdekaan partai ini tidak dilarang oleh negara karena saat itu bangsa Indonesia ingin menjadi negara yang berdaulat. Sampai berdirinya negara tanggal 17-18 Agustus 1945 organisasi PKI diperkenankan untuk mengembangkan partainya. Namun dengan adanya gerakan 30 september 1965 PKI melakukan kudeta kepada pemerintah yang syah dan melakukan gerakan revolusi dengan membunuh 7 Jenderal sebagai putra terbaik bangsa ini dan para ulama, sejak itulah gerakan PKI dinyatakan sebagai organisasi

terlarang dengan dikukuhkannya melalui ketetapan MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang larangan terhadap organisasi PKI di Indonesia. Kebijakan ini sangat tepat karena fungsi negara adalah melakukan monopoli bila ada ideologi yang meresahkan masyarakat dan mengancam eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia, maka negara berkewajiban melarang paham tersebut.

Dengan adanya ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 ini memberikan larangan kepada semua warga negara Indonesia menghidupkan kembali organisasi PKI di Indonesia. Inilah sejarah mengapa negara melarang organisasi PKI untuk hidup dimasyarakat. Alasan ini tepat karena semua gerakan PKI yang didasarkan kepada ideologi komunisme sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila yang mengedepankan humanis dalam semua kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan. Komunisme lebih mengedepankan revolusi dalam melakukan perubahan sehingga gerakan revolusi melalui kegiatan kudeta kepada pemerintah yang syah dianggap suatu kegiatan yang syah dalam melakukan revolusi untuk kegiatan kenegaraan. Gerakan G 30 September 1965 merupakan gerakan revolusi dengan cara ideologi komunisme yang mengedepankan *violence* (kekerasan) dalam mencapai tujuannya.

Untuk menelusuri gerakan PKI dimasyarakat di daerah Provinsi Gorontalo kita dapat lihat kepada sikap generasi muda. Generasi muda merupakan lanjutan dari generasi sebelumnya. Artinya bila generasi muda kita saat ini telah terkontaminasi oleh gerakan PKI yang menjadi musuh bersama masyarakat dan negara karena telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Dapat kita telesuri pada sikap generasi muda saat ini.

Berdasarkan survei penelitian kepada generasi muda terdapat pengaruh dari ideologi yang telah menjadi musuh bersama orde baru dan masyarakat itu. Hal ini dapat ditelusuri

dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “*Setujukah Anda bila simpatisan komunisme negara memberlakukan punishment atau sanksi yang sama dengan bentuk kegiatan radikalisme teroris?*” Hal ini mendapat tanggapan bervariasi dari responden penelitian sebagaimana ditunjukkan oleh data hasil survei di bawah ini.

Tabel 3.23 Sikap terhadap Simpatisan Komunisme Negara Memberlakukan Punishment atau Sanksi yang Sama dengan Bentuk Radikalisme Teroris

Ops	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	4	4,35
b	Setuju	45	48,91
c	Abstain	37	40,22
d	Tidak setuju	4	4,35
e	Sangat tidak setuju	2	2,17
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni-Agustus Tahun 2018.

Ada yang menarik fenomena radikalisme khususnya pada gerakan komunis (PKI) di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo terlihat dari hasil survei di atas masih ada generasi muda kita yang tidak setuju bila mereka yang menjadi anggota PKI dan simpatisan PKI di Indonesia diberlakukan hukuman mati disamakan dengan anggota teroris. Memang gerakan dukungan kepada PKI di Indonesia tidak boleh diperlakukan sama dengan teroris karena mereka yang terlibat dalam gerakan komunis saat ini hanya simpatik kepada gerakan tersebut bukan melakukan aksi yang sama dengan tahun 1965. Bila kegiatan itu telah menjurus kepada gerakan revolusi ini yang tidak dapat diijinkan untuk terjadi dimasyarakat kita. Sehingga dari data survei di atas ada sikap yang tidak setuju atas pemberlakuan hukuman mati bagi pengikut ideologi komunisme. Mereka ini berjumlah 4 orang atau 4,35% “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju” berjumlah 2 orang atau 2,17%. Pilihan tidak setuju masih dapat dimengerti. Namun, bila persetujuan itu mengarah kepada bentuk

dukungan kepada tumbuh dan berkembangnya kembali partai komunis di Indonesia itu yang tidak ditoleransi.

Memang apabila dikaji secara akademik organisasi PKI dilarang oleh negara karena melakukan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan yang syah, namun juga ada juga sekelompok masyarakat yang memberontak kepada negara dengan keinginan mendirikan negara Islam seperti gerakan Karto Suwiryo, gerakan DII/TII di bawah komando Kahar Muzakar Sulawesi Selatan melakukan hal yang sama dengan tujuan memberontak kepada negara, tetapi negara tidak memberlakukan ketetapan seperti yang terjadi kepada PKI. Ini yang membuat generasi muda kita sedikitnya bersimpatik dengan PKI karena mereka menganggap negara tidak adil memberlakukan sanksi kepada musuh negara.

Untuk menjawab kebingungan generasi muda saat ini, dapat kita jelaskan bahwa kesalahan organisasi PKI berbeda dengan organisasi DII/TII sebagaimana yang diinginkan oleh Kahar Muzakar. PKI gerakannya tidak berperikemanusiaan sedangkan gerakan DII/TII dan gerakan karto Suwiryo hanya menginginkan negara ini berlandaskan kepada hukum agama Islam sebagai landasan bernegara. Islam tidak melakukan gerakan *violence* dalam merubah suatu tatatanan masyarakat sebagaimana ajaran teroris. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Namun gerakan ini pun ditolak di Indonesia sejak piagam Jakarta dijadikan sebagai dasar negara ditolak berdasarkan konsensus nasional. Sehingga kesalahan gerakan PKI dengan gerakan DII/TII yang sama-sama melakukan pemberontakan tidak bisa disamakan dengan PKI yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Piagam Jakarta bukan dasar negara yang bertentangan dengan nilai Pancasila, tetapi tidak diterima karena ada beberapa daerah yang tidak menghendaki negara didasarkan kepada hukum agama Islam sekalipun Islam agama mayoritas dinegeri ini. Dengan hasil

konsensus tersebut semua agama merasa menerima dengan dasar negara Pancasila.

Dengan latar belakang sejarah di atas, maka untuk organisasi PKI negara tepat melakukan fungsi monopoli karena organisasi PKI sangat bertentangan dengan dasar negara berbeda dengan DII/TII. DII/TII tidak dikeluarkan ketetapan MPRS tentang larangan secara formal, tetapi kehadirannya dilarang oleh negara. Contoh kasus ketika generasi masuk kepada organisasi NII sama halnya apa yang diinginkan oleh gerakan teroris pemerintah melarang bahkan akan melakukan penangkapan bila ada sekelompok pemuda melakukan pembentukan organisasi NII ini.

Berangkat dari fenomena pro dan kontra terhadap gerakan komunisme di Indonesia yang berkiblat atas paham komunisme, marxisme dan lenisme di negara-negara komunis di atas, maka masih ada sekelompok generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo yang pengetahuan dan pemahaman serta ketaatannya kepada pancasila. Sehingga ketika disedorkan pertanyaan penelitian di atas mereka memilih sikap sangat setuju dan setuju bila pengikut PKI itu diperlakukan yang sama dengan sanksi kepada gerakan ISIS dan teroris. Pendapat ini dikemukakan oleh sejumlah 45 responden atau 48,91% dan sikap “sangat setuju” berjumlah 4 responden atau 4,35%. Responden yang bersikap setuju dan sangat setuju adalah mereka yang memahami sejarah perjalanan negara ini dari bentuk gerakan komunisme di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila.

Namun, bagi responden yang menyatakan sikap tidak setuju dan sangat tidak setuju pada pernyataan penelitian di atas menunjukkan kebenciannya bila negara menganggap organisasi PKI menjadi musuh negara. Mereka ini berjumlah 4 orang responden atau 4,35% dengan sikap “tidak setuju” bila anggota PKI diberikan *punishment* hukuman mati dan “sangat

tidak setuju” berjumlah 2 orang responden atau 2,17%. Pernyataan sikap responden ini masih perlu ditelusuri lebih lanjut apa yang mendorong mereka tidak setuju. Apakah disebabkan karena ketidaktahuan atau pemahaman kepada organisasi PKI sebagaimana yang diatur dalam ketetapan MPRS No. XXV tahun 1965 ataukah memberikan dukungan kepada organisasi PKI ini. Bila hal ini terjadi sudah saatnya pemerintah daerah dan Perguruan Tinggi memberikan sosialisasi tentang mengapa pemerintah mengeluarkan ketetapan MPRS No. XXV tahun 1965 dan sampai saat ini ketetapan MPRS ini belum dilakukan pencabutan.

Ada yang menarik cara orde baru memperlakukan simpatisan PKI maupun anggota PKI kepada anak dan turunan PKI. Di mana keturunan dari anggota PKI dilarang oleh pemerintah orde baru masuk ke dalam birokrasi (PNS/TNI dan POLRI) dan bahkan tidak diberikan ijin dalam melakukan usaha (wiraswasta). Kalau ini menjadi bahan pertimbangan responden masih dapat kita telorir karena seharusnya negara tidak dapat memperlakukan kepada anak dan keturunan anggota PKI dalam kegiatan politik dan pemerintahan serta dibidang wiraswasta. Karena semua ini menyalahi konstitusi pada pasal 27 UUD NRI 1945 di mana setiap warga negara bersamaan kedudukan didepan hukum dan pemerintahan.

Apa pun jawaban dan alasan responden terhadap pertanyaan penelitian di atas harus disikapi oleh pemerintah daerah secara bijak. Karena ideologi itu tidak dapat dibunuh bersama dengan orang yang menciptakan. Ideologi komunis (PKI) tetap akan hidup dimasyarakat bila diberikan ruang untuk berkembang. Untuk itu upaya dalam melakukan pencegahan harus dengan cara pemerintah tidak henti-hentinya memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa organisasi PKI sangat bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945.

Namun, ada juga responden yang gamang terhadap pilihan opsi pada pernyataan penelitian di atas artinya sikap responden memilih abstain sejumlah 37 orang atau 40,22%. Data hasil survei ini menunjukkan bahwa responden memiliki keraguan akan ideologi komunisme apakah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau justru ideologi komunis dapat mempercepat cita-cita negara dalam mewujudkan kesejahteraan.

Fenomena kegamangan kepada generasi muda terhadap bentuk-bentuk ideologi radikal harus menjadi perhatian kita semua khususnya dalam mencegah menyebarnya ideologi radikal di kalangan generasi muda kita khususnya di daerah Provinsi Gorontalo.

Untuk menjawab kebingungan generasi muda terhadap sanksi apa yang pantas diberikan bila generasi muda kita yang mengikuti ideologi PKI atau simpatisan kepada ideologi komunis, maka pertanyaan penelitian harus juga dapat mengakomodasi jawaban yang ada dilubuk hati generasi muda kita, bila ada keluarganya atau di lingkungan masyarakat ada yang bersimpatik dengan ideologi tersebut. Untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran generasi muda tentang sikapnya kepada ideologi komunis, maka pertanyaan penelitian diarahkan kepada pernyataan sebagai berikut: *“Bentuk radikalisme komunisme simpatisan PKI di Indonesia lebih pada cara deradikalisasi oleh negara. Artinya, bagi simpatisan PKI hanya melalui proses pembinaan negara untuk dikembalikan kepada internalisasi nilai Pancasila. Setujukah Anda bila pilihan negara hanya dengan melakukan deradikalisasi pada simpatisan PKI?”* Pernyataan penelitian direspons oleh responden dengan variasi jawaban yang dapat kita lihat pada hasil survei di bawah ini.

Tabel 3.24 Bentuk Radikalisme Komunisme Simpatisan PKI di Indonesia Lebih pada Cara Deradikalisasi oleh Negara

Ops	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	1	1,09
b	Setuju	4	4,35
c	Abstain	31	33,70
d	Tidak setuju	44	47,82
e	Sangat tidak setuju	12	13,04
Jumlah		92	100 %

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekes Negeri Gorontalo Periode Juni-Agustus Tahun 2018.

Berdasarkan hasil survei di atas menunjukkan responden penelitian sebagian besar menyatakan ketidaksetujuannya bila para simpatisan dan anggota PKI diberikan cara deradikalisasi untuk mengembalikan mereka kepada sikap anti kepada organisasi PKI. Bagi mereka simpatisan PKI dan anggota PKI dianggap sebagai musuh bersama rakyat dan negara. Padahal simpatisan PKI dan menjadi anggota PKI saat ini mungkin mereka bergabung dengan organisasi itu dikarenakan ketidaktahuan mereka kepada organisasi tersebut. Dengan demikian jalan untuk melindungi warga negara yang bergabung dengan organisasi itu dengan jalan deradikalisasi. Responden yang menyatakan “tidak setuju” berjumlah 44 orang atau 47,82% dan “sangat tidak setuju” berjumlah 12 orang atau 13,04%.

Responden yang menyatakan persetujuannya program deradikalisasi bagi mereka yang terlibat sebagai anggota terhadap organisasi PKI dan yang simpatik pada organisasi PKI adalah 4 orang responden atau 4,35% menyatakan “setuju” program deradikalisasi dan 1 orang atau 1,09 yang menyatakan sikap “sangat tidak setuju”. Namun, ada juga responden yang memilih sikap abstain terhadap pernyataan penelitian. Sikap ini menunjukkan adanya keraguan apakah cara deradikalisasi dapat mengembalikan seseorang kembali kepada sikap yang menunjukkan seseorang akan mengamalkan ideologi Pancasila

dan konstitusi UUD NRI 1945 atau sebaliknya. Responden yang memilih sikap abstain berjumlah 31 orang atau 33,70%.

Berdasarkan hasil survei di atas menunjukkan sebagian besar generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo memiliki sikap positif. Artinya generasi muda kita tidak menghendaki adanya gerakan radikal di dalam mengelola negara. Yang terpenting negara ini dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita untuk mewujudkan negara sejahtera dan rakyat pun sejahtera dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Pancasila dalam mewujudkan negara sejahtera tidak dengan cara-cara mengabaikan kepentingan masyarakatnya. Ini sangat berbeda dengan ideologi radikalisme yang selalu menggunakan kekerasan dalam mencapai cita-citanya.

Untuk menegaskan apakah generasi muda menolak akan paham radikalisme melalui penelitian ini akan ditanyakan pertanyaan penelitian yang dapat menyimpulkan apa yang ada di dalam alam pikiran dan lubuk hati generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo maka pertanyaan penelitian harus dapat menggantinya sehingga bentuk pertanyaan penelitian diarahkan kepada sikap dasar responden. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada responden sebagai berikut: *“Gerakan radikalisme seperti ISIS (Islamic Staats Irak Surya), terorisme, dan komunisme bila masuk ke negara Republik Indonesia akan membawa pengaruh negatif pada aspek ideologi dan sangat merusak tatanan hidup generasi muda. Ideologi radikalisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Bagaimanakah pandangan Anda dengan pernyataan tersebut?”* Pertanyaan ini mendapat respons bervariasi dari responden penelitian yang dapat kita lihat melalui data hasil survei pada tabel 3.25 di bawah ini.

Tabel : 25 Gerakan Radikalisme Seperti ISIS (*Islamic Staats Irak Surya*), Terorisme, dan Komunisme bila Masuk ke negara Republik Indonesia Akan Membawa Pengaruh Negatif pada Aspek Ideologi dan Sangat Merusak Tatanan Hidup Generasi Muda

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	33	35,87
b	Setuju	18	19,57
c	Ragu-ragu	9	9,78
d	Tidak setuju	31	33,69
e	Sangat tidak setuju	1	1,09
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekkes Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Fenomena radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo di kalangan generasi muda sangat mengkhawatirkan kita karena ketika pernyataan penelitian atau pertanyaan penelitian diarahkan kepada bentuk pertanyaan yang mudah dimengerti dan dipahami oleh responden karena pertanyaan penelitian ini sudah diuraikan pada pertanyaan sebelum pertanyaan penutup pada penelitian ini, responden memberikan ketegasan sikapnya bahwa generasi muda di daerah Gorontalo telah terindikasi dimasuki virus radikalisme di otak dan jiwanya (*mindset*) sekalipun bentuk simpatik kepada ideologi radikalisme belum mengarah dalam bentuk partisipasi artinya belum ada kalangan generasi muda kita yang ada di Provinsi Gorontalo melakukan aksi-aksi teroris sebagaimana yang terjadi di pulau Jawa yang hampir setiap bulan dan tahun terjadi aksi partisipasi para simpatisan gerakan radikalisme. Berita terakhir generasi muda kita melakukan aksi bom bunuh diri di depan Poltabes Surabaya dua orang anak mudah dan satu anaknya meledakkan diri di depan pos jaga Poltabes Surabaya ketiganya tewas bersama dengan sasaran polisi yang menjaga di pos Poltabes Surabaya. Sungguh tragedi yang memillukan bagi generasi muda yang berjuang di jalan yang sesat tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945.

Berdasarkan hasil survei di atas responden yang dianggap rawan otak dan jiwanya dalam penelitian ini ada sejumlah 31 responden atau 33,69% yang menyatakan “tidak setuju” dan yang menyatakan “sangat tidak setuju” 1 orang atau 1,09%. Data ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menangani generasi muda kita untuk tidak melakukan partisipasi pada bentuk kegiatan radikalisme di daerah Gorontalo. Sekalipun baru sebatas alam pikiran dan jiwa dari generasi muda di daerah ini terindikasi radikal yang membenarkan apa yang menjadi temuan BNPT di beberapa daerah di Indonesia Provinsi salah satu dari lima daerah rawan teroris setelah provinsi Aceh dapat dibuktikan lewat hasil survei di atas ternyata 32 responden atau 34,78% menyatakan “menolak” bila gerakan radikalisme dituduh sebagai sebuah gerakan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Bila generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo populasi sampelnya dilipatkan 100 kali dari jumlah responden yang menjadi sampel penelitian mungkin yang terindikasi generasi muda yang radikal ada sekitar lebih kurang 3.200 dari 9.200 generasi muda kita telah terkontaminasi sebagai generasi radikal bukan generasi emas. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus giat melakukan sosialisasi dalam bentuk pemberian materi lewat kurikulum PKN di sekolah-sekolah, lewat sosialisasi ditingkat kecamatan dan desa di mana generasi muda kita berada. Dengan cara ini akan memudahkan pemerintah untuk mencegah masuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Gorontalo.

Demikian halnya dengan pertanyaan sifatnya meminta ketegasan sikap responden terhadap apa yang mereka pahami dalam ideologi radikalisme di Indonesia yang menjadi musuh bersama negara dan rakyat Indonesia yang berlandaskan kepada ideologi Pancasila. Untuk mengetahui sikap responden

yang mewakili generasi muda terpelajar di daerah Gorontalo, maka pertanyaan penelitian diajukan kepada responden penelitian adalah sebagai berikut: *“Gerakan radikalisme seperti ISIS (Islamic Staats Irak Surya), terorisme, dan komunisme bila masuk ke negara Republik Indonesia akan membawa pengaruh negatif bagi kehidupan politik generasi muda karena Ideologi radikalisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimanakah pandangan Anda dengan pernyataan tersebut?”* pertanyaan ini mendapat respons dari responden penelitian yang dapat kita lihat melalui tabel 3.26 di bawah ini.

Tabel 3.26 Gerakan Radikalisme Seperti ISIS (Islamic Staats Irak Surya), terorisme, dan Komunisme bila Masuk ke Negara Republik Indonesia Akan Membawa Pengaruh Negatif bagi Kehidupan Politik Generasi Muda karena Ideologi Radikalisme Sangat Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila

Ops	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	8	8,70
b	Setuju	42	45,64
c	Ragu-ragu	21	22,83
d	Tidak setuju	18	19,57
e	Sangat tidak setuju	3	3,26
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni-Agustus Tahun 2018.

Berdasarkan data hasil survei di atas menunjukkan bahwa adanya kerawanan kepada generasi muda di daerah Gorontalo tentang bahaya laten radikalisme yang memengaruhi pola pikir generasi muda di daerah Gorontalo. Sebagaimana data hasil survei dari responden penelitian yang menyatakan tidak setuju kepada ideologi radikalisme dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam ideologi Pancasila dan merusak tatanan politik di Indonesia. Mereka ini berjumlah 18 orang responden atau 19,57% dan yang menyatakan “sangat tidak setuju” berjumlah 3 orang responden atau 3,26%.

Demikian halnya dengan responden yang bersikap ragu-ragu dalam menentukan sikap apakah ideologi radikalisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan merusak tatanan

demokrasi di Indonesia. Kegamangan generasi muda yang mewakili responden terpelajar dari kalangan mahasiswa ini dianggap rawan dalam ilmu ketahanan nasional. Karena kegamangan dan keraguan generasi muda akan mudah terjerumus kepada dukungan paham yang mengarah ke bentuk kegiatan radikal. Mereka ini berjumlah 21 responden atau 22,83%. Apa yang menjadi hasil dari penelitian ini memberikan *warning* bagi kita khususnya kalangan perguruan Tinggi dan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada generasi muda di daerah Gorontalo dalam bentuk kegiatan sosialisasi kepada generasi muda di daerah ini. Mulai dari tingkat desa dan kelurahan sampai tingkat kecamatan sebagai daerah teritorial pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang bentuk-bentuk kegiatan radikalisme yang menjadi musuh bersama negara dan masyarakat yang ada di Indonesia.

Dengan kegiatan sosialisasi yang intens yang dilakukan oleh pemerintah daerah dikombinasikan dengan kurikulum sekolah dasar dan perguruan tinggi yang memasukan dalam kajian materinya gerakan radikalisme di sektor pendidikan formal akan membantu meminimalisasi pengaruh gerakan radikal yang masuk melalui sumber internet.

Bila antispasi masyarakat Gorontalo dalam menghadapi pengaruh globalisasi khususnya kegiatan radikalisme (ISIS, teroris, dan komunis) semakin intens, akan mengerem lajunya pengaruh globalisasi di kalangan generasi muda yang ada di Gorontalo. Namun, bentuk kecemasan kita terhadap gerakan radikalisme yang memengaruhi pola pikir dan pola sikap generasi muda yang ada di Provinsi Gorontalo, masih ada secercah harapan positif kepada generasi muda kita. Hal ini ditunjukkan oleh sikap responden yang memilih sikap setuju dan sangat setuju bila ideologi radikalisme merupakan bentuk ideologi yang sama sekali bertentangan dengan filsafat. Di

mana ideologi radikalisme sangat tidak tepat bila dikategorikan sebagai filsafat radikalisme. karena ideologi ini tidak berpihak kepada kepentingan orang banyak. Sehingga aksi-aksi yang dilakukannya penuh dengan intrik-intrik kekerasan dalam melakukan aksinya. Dengan pemikiran seperti ini maka generasi muda kita memilih sikap setuju berjumlah 42 responden atau 45,64% dan memilih sikap “sangat setuju” berjumlah 8 orang responden atau 8,70%.

Berdasarkan sikap di atas generasi muda kita masih sebagian besar memilih sikap menolak bentuk kegiatan radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Ini yang dikatakan generasi emas masa depan bangsa ditentukan oleh generasi mudanya sebagai pelanjut tongkat estapet kepemimpinan bangsa. Bila generasi muda kita terpengaruh oleh kegiatan radikalisme akan mengancam semangat persatuan dan kesatuan yang dibangun lewat bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga itu diharapkan kepada kita semua untuk mencegah masuknya paham radikal di kalangan generasi muda kita dengan cara mewaspadaikan semua kegiatan aksi-aksi yang datang dari pengaruh media sosial maupun hubungan kontak person dengan mereka yang tergabung dalam kelompok radikal di Indonesia seperti ISIS dan teroris. Bentuk ideologi ini memang tidak memberikan bentuk seperti organisasi resmi namun melalui gerakan bawah tanah sel-sel ini akan sampai kepada generasi muda kita. Untuk itu tindakan preventif sangat perlu kita lakukan guna mengantisipasi masuknya paham radikal di kalangan generasi muda di daerah Gorontalo.

Untuk menindaklanjuti pertanyaan penelitian yang akan menegaskan sikap generasi muda kita apakah mereka bersimpatik dengan gerakan radikalisme atau tidak maka pertanyaan penelitian diarahkan kepada sikap memilih bergabung dengan Pemerintah daerah yang menolak bentuk

kegiatan radikal yang merugikan kepentingan masyarakat. Dan bagi mereka yang menolak opini kebenaran di dalam pertanyaan penelitian ini dianggap mereka yang bermasalah dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga pertanyaan penelitian diarahkan kepada sebagai berikut: *“Gerakan radikalisme seperti ISIS (Islamic Staats Irak Surya), terorisme, dan komunisme bila masuk ke negara Republik Indonesia akan membawa pengaruh negatif pada aspek ekonomi karena Ideologi radikalisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimanakah pandangan Anda dengan pernyataan tersebut?”* Pertanyaan ini mendapat tanggapan bervariasi dari responden penelitian sebagaimana yang dapat kita lihat melalui tabel 3.27.

Tabel 3.27 Gerakan Radikalisme seperti ISIS (Islamic Staats Irak Surya), Terorisme, dan Komunisme Bila Masuk ke Negara Republik Indonesia Akan Membawa Pengaruh Negatif pada Aspek Ekonomi karena Ideologi Radikalisme Sangat Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	7	7,61
b	Setuju	55	59,78
c	Ragu-ragu	21	22,83
d	Tidak setuju	7	7,61
e	Sangat tidak setuju	2	2,17
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni-Agustus Tahun 2018.

Berdasarkan data hasil survei di atas menunjukkan generasi muda di daerah Gorontalo menyatakan sikap positif terhadap pengaruh ideologi radikalisme pada aspek ekonomi. Di mana responden yang menyatakan “sangat setuju” ada berjumlah 7 orang responden atau 7,61% dan yang menyatakan “setuju” ada berjumlah 55 responden atau 59,78%. Inilah respons positif dari generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh mereka kalangan generasi muda terpelajar dari mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dan mahasiswa Poltekas Negeri Gorontalo. Respons positif ini akan berdampak baik dalam upaya pencegahan gerakan radikalisme

di Provinsi Gorontalo. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dan Perguruan Tinggi dalam upaya mencegah masuknya gerakan ideologi radikal di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo.

Namun, di tengah-tengah kegembiraan kita pada kalangan generasi muda di daerah Gorontalo ada beberapa kekhawatiran kita kepada generasi muda di daerah ini. Di mana sebagian kecil generasi muda kita masih gamang dalam menentukan pilihan opsi pertanyaan penelitian dalam menjastifikasi gerakan radikalisme di daerah ini. Artinya, responden tidak dapat memberikan jawaban yang pasti terhadap pertanyaan penelitian.

Berbeda dengan responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju pada pertanyaan penelitian. Jawaban “tidak setuju” sebesar 7 orang responden atau 7,61% dan “sangat tidak setuju” ada 2 responden atau 2,17% ini menunjukkan generasi muda kita rentan pikiran dan aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Karena mereka ini akan lebih mudah dipengaruhi oleh gerakan komunis yang menjadi musuh bersama negara dan masyarakat Indonesia.

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo kepada generasi muda adalah gerakan sosialisasi akan bahaya laten ideologi komunis yang banyak menodai perjalanan sejarah kelam di Indonesia. Ideologi komunis mulai tumbuh sejak gerakan kemerdekaan pada tahun 1920 bersama dengan organisasi Serikat Islam Indonesia. Namun gerakan PKI melakukan upaya kudeta ditahun 1926 sampai 1927 namun gagal. Kemudian diulangi lagi pada tahun 1948 namun gagal gerakannya. Usaha PKI untuk melakukan kudeta diulangi lagi pada tanggal 30 September 1965 dengan melakukan kudeta dengan jalan melakukan penculikan kepada para Jenderal (7 Jenderal). Sejak saat itulah partai komunis

Indonesia dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui ketetapan MPRS No. XXV 1966 yang hingga saat ini tap tersebut masih tetap berlaku di Indonesia.

Untuk memastikan generasi muda kita apakah telah terpengaruh oleh gerakan radikalisme dapat kita telusuri kembali dengan pertanyaan penelitian yang dapat mengungkap pikiran dan tindakan generasi muda melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut: *“Gerakan radikalisme seperti ISIS (Islamic Staats Irak Surya), terorisme, dan komunisme bila masuk ke negara Republik Indonesia akan membawa pengaruh negatif pada aspek sosial budaya dan tatanan hidup generasi muda. Bagaimanakah pandangan Qnda dengan pernyataan tersebut?”* Pertanyaan penelitian ini mendapat tanggapan yang berpariasi dari responden penelitian yang dapat kita lihat melalui hasil survei di bawah ini.

Tabel 3.28 Gerakan Radikalisme Seperti ISIS (Islamic Staats Irak Surya), Terorisme, dan Komunisme bila Masuk Ke Negara Republik Indonesia Akan Membawa Pengaruh Negatif pada Aspek Sosial Budaya dan Tatanan Hidup Generasi Muda

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	33	35,87
b	Setuju	34	36,96
c	Ragu-ragu	7	7,61
d	Tidak setuju	15	16,30
e	Sangat tidak setuju	3	3,26
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekes Negeri Gorontalo Periode Juni-Agustus Tahun 2018.

Berdasarkan hasil survei di atas menunjukkan sikap generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo masih ada yang pemikirannya tidak membenarkan bila gerakan radikalisme dinyatakan sebagai bentuk gerakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana pada pernyataan penelitian gerakan radikal akan berpengaruh negatif pada aspek sosial budaya bila diterapkan atau dilaksanakan dalam organisasi kemasyarakatan. Responden yang menyatakan sikap “tidak

setuju" pada pernyataan penelitian ini berjumlah 15 responden atau 16,30% dan yang menyatakan "sangat tidak setuju" berjumlah 3 responden atau 3,26%.

Namun, dari hasil survei pula dapat diketahui pengaruh ideologi radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo tidak mendapat tempat dihati dan pikiran generasi muda untuk berkembang di Indonesia. Hal ini ditunjukkan pernyataan sikap responden yang setuju dengan pertanyaan penelitian berjumlah 34 responden atau 36,96% dan menyatakan "sangat setuju" berjumlah 33 responden atau 35,87%. Mereka inilah generasi muda yang dianggap memiliki ketahanan diri yang sangat kuat. Artinya, sikap mereka perlu dibanggakan untuk menjadi tameng dalam menghadapi bahaya laten berkembangnya ideologi radikal di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo.

Analisis tentang pengaruh paham radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo tidak hanya dilihat dari bentuk pernyataan sikap mereka yang setuju dan sangat setuju saja, namun juga generasi muda yang gamang dalam menentukan sikap terhadap pernyataan penelitian pun menjadi bagian analisis dalam penelitian ini. Mereka yang memiliki sikap ragu pada pernyataan penelitian di atas memiliki pengaruh negatif. Responden yang memilih sikap keraguan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang responden atau 7,61%. Dari hasil survei ini memberikan *warning* bagi pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menyosialisasikan tentang penolakan paham radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Gorontalo. Bila daerah Gorontalo bebas dari pengaruh gerakan radikalisme di kalangan generasi muda.

Untuk menindaklanjuti penelusuran sikap generasi muda akan pengaruh gerakan radikalisme, maka perlu pertanyaan penelitian dikembangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang dapat menggali apa yang ada dalam alam pikiran

generasi muda. Sehingga pertanyaan penelitian diarahkan kepada bentuk pertanyaan sebagai berikut: *“Gerakan radikalisme seperti ISIS (Islamic Staats Irak Surya), terorisme, dan komunisme bila masuk ke negara Republik Indonesia akan membawa pengaruh negatif pada aspek keamanan dan merusak tatanan hidup generasi muda. Bagaimanakah pandangan Anda dengan pernyataan tersebut?”* Pertanyaan penelitian ini mendapat tanggapan bervariasi dari responden penelitian sebagaimana hasil survei di bawah ini.

Tabel 3.29 Gerakan Radikalisme Seperti ISIS (Islamic Staats Irak Surya), Terorisme, dan Komunisme bila Masuk ke Negara Republik Indonesia Akan Membawa Pengaruh Negatif pada Aspek Keamanan dan Merusak Tatanan Hidup Generasi Muda.

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	29	31,53
b	Setuju	35	38,04
c	Ragu-ragu	7	7,61
d	Tidak setuju	15	16,30
e	Sangat tidak setuju	6	6,52
Jumlah		92	100%

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Bila dilihat dari hasil survei terhadap sikap generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo tentang ketegasan dalam memilih opsi pernyataan penelitian di atas menunjukkan adanya kerawanan kepada *mindset* dalam pikiran generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo. Hal ini ditunjukkan oleh sikap generasi muda memilih opsi “tidak setuju” berjumlah 15 responden atau 16,30% dan memilih sikap “sangat tidak setuju” berjumlah 6 responden atau 6,52%. Generasi muda kita tidak sependapat bila ideologi radikalisme seperti ISIS, teroris, dan komunisme akan berpengaruh negatif bagi aspek keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini artinya, generasi muda bersimpatik dengan aliran radikalisme yang selama ini meresahkan masyarakat bangsa dan negara RI. Bagi mereka apa yang dilakukan oleh organisasi radikalisme

memberikan pengaruh positif bagi kelangsungan sistem pemerintahan di Indonesia.

Untuk mencegah pandangan sesat generasi muda kita yang memilih opsi tidak setuju dan sangat tidak setuju pada opsi pertanyaan penelitian di atas harus mendapatkan terapi pendidikan ideologi Pancasila yang benar melalui pendekatan sosialisasi dimasyarakat bahwa bentuk kegiatan ideologi radikalisme sesungguhnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan aspek humanisme dalam setiap melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan. Radikalisme dalam melakukan perubahan selalu dengan pendekatan kekerasan bahkan revolusi dengan cara-cara kudeta dalam mengganti pemerintahan. Istilah dalam KUHP selalu melakukan pendekatan makar dalam menggulingkan pemerintahan yang sah. Sebagaimana yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 dengan membunuh tujuh orang Jenderal yang menjadi putra terbaik bangsa saat itu. Demikian halnya dengan ISIS dan teroris selalu menggunakan aksi kekerasan dalam mencapai tujuannya seperti aksi Bom Bali dan beberapa aksi kegiatan bom bunuh diri yang dilakukan di tempat-tempat fasilitas umum.

Demikian halnya pilihan opsi ragu-ragu dalam hasil survei di atas, keraguan responden penelitian menunjukkan pengetahuan dan pemahaman generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo dianggap dalam aspek ketahanan nasional rentan sebagai ancaman stabilitas daerah. Mengapa responden yang memilih sikap keraguan dalam memilih opsi pertanyaan penelitian di atas sangat mudah akan dipengaruhi oleh adanya ideologi radikalisme bila ada yang mengajak mereka dalam kegiatan radikalisme. Responden yang memilih keraguan terhadap pengetahuan radikalisme ini berjumlah 7 responden atau 7,61%.

Di balik kecemasan kita semua baik itu kalangan perguruan Tinggi maupun pemerintah daerah kepada generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo ternyata masih sebagian besar pemahaman dan pengetahuan generasi muda kita dianggap tangguh dalam menghadapi godaan ideologi radikalisme. Hal ini ditunjukkan sikap tegas generasi muda terhadap pertanyaan penelitian dengan sikap opsi “sangat setuju” berjumlah 29 responden atau 31,53% dan memilih opsi “setuju” pada pertanyaan penelitian berjumlah 35 responden atau 38,04%. Responden yang memilih opsi sangat setuju dan setuju atas pertanyaan penelitian di atas perlu mendapat apresiasi kita semua karena mereka inilah yang nantinya akan menyosialisasikan di kalangan generasi muda terhadap alasan penolakan kepada paham radikalisme bila masuk di wilayah daerah Provinsi Gorontalo.

Untuk mengakhiri pertanyaan penelitian pada objek fenomena radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo, maka pertanyaan penelitian diarahkan kepada aspek ketahanan nasional dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut: *“Gerakan radikalisme seperti ISIS (Islamic Staats Irak Surya), terorisme, dan komunisme bila masuk ke negara Republik Indonesia akan membawa pengaruh negatif pada aspek pertahanan negara. Bagaimanakah pandangan Anda dengan pernyataan tersebut?”* Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari responden penelitian sebagaimana hasil survei di bawah ini.

Tabel 3.30 Gerakan Radikalisme Seperti ISIS (*Islamic Staats Irak Surya*), Terorisme, dan Komunisme bila Masuk ke Negara Republik Indonesia Akan Membawa Pengaruh Negatif pada Aspek Pertahanan Negara

Opsi	Jawaban	Jumlah	Persentase
a	Sangat setuju	34	36,95
b	Setuju	26	28,26
c	Ragu-ragu	8	8,70
d	Tidak setuju	18	19,57
e	Sangat tidak setuju	6	6,52
Jumlah		92	100 %

Sumber Data Primer: Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Poltekas Negeri Gorontalo Periode Juni–Agustus Tahun 2018.

Berdasarkan hasil survei di atas menunjukkan generasi muda kita khususnya kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo masih ada yang bersimpatik kepada gerakan radikalisme. Apakah bentuk dukungan ini terjadi dengan ketidak pahaman generasi muda akan bahaya gerakan radikalisme atautkah hal ini menjadi opsi responden yang tidak mau dinyatakan bahwa bentuk kegiatan radikalisme bertentangan dengan aspek ketahanan nasional dilihat dari dimensi pertahanan negara. Mereka menginginkan bentuk radikalisme bukan sebagai ancaman pada aspek pertahanan negara, namun merupakan sebuah gerakan untuk memperbaiki sistem pemerintahan di negara kita yang dianggap tidak berhasil dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dibentuknya negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan alinea ke empat. Kegiatan radikalisme bagi sebagian generasi muda dianggap sesuatu yang wajar. Namun, semua ini masih dalam prediksi peneliti mengapa masih ada kalangan generasi muda kita yang memberikan dukungan kepada gerakan radikalisme yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Fenomena paham radikalisme di atas dapat dilihat pada hasil opsi yang diberikan oleh responden penelitian dengan memilih opsi “tidak setuju” berjumlah 18 orang atau 19,57%

dan responden yang memilih opsi “sangat tidak setuju” berjumlah 6 orang responden atau 6,52%. Responden generasi muda ini dikategorikan rawan dalam pendekatan ketahanan nasional karena responden tersebut berpotensi menjadi anggota gerakan radikalisme di daerah. Artinya, kerawanan akan terjadi bila pemerintah daerah tidak merespons dengan melakukan kegiatan sosialisasi akan bahaya laten gerakan radikalisme bagi kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo.

Kerawanan tersebut juga ditandai oleh generasi muda yang memilih opsi ragu-ragu dalam pernyataan penelitian ini. Di mana ada sejumlah 8 orang responden yang memilih sikap “ragu” dalam pertanyaan penelitian. Mereka inipun dapat dianggap memiliki kerawanan terhadap ideologi radikalisme bila ada yang memengaruhi atau mengajak responden untuk bergabung dengan kelompok radikal di daerah Provinsi Gorontalo. Penanganan kegamangan generasi muda akan ideologi radikalisme dilakukan melalui pendekatan sosialisasi yang intens kepada generasi muda di daerah ini supaya kegamangan tersebut akan berubah menjadi sikap yang anti kepada gerakan radikalisme.

Kecemasan kita terhadap generasi muda yang ada di daerah ini tertutupi dengan sikap generasi muda kita yang memilih opsi setuju dan sangat setuju dengan pernyataan penelitian. Sikap ini sangat positif dalam mencegah masuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo. Kesadaran generasi muda akan bahaya laten radikalisme sebagai sebuah bentuk keberhasilan dari sosialisasi yang selama ini diberikan oleh pemerintah daerah maupun pendidikan formal baik ditingkat SLTA dan Perguruan tinggi yang memberikan pemahaman akan ideologi Pancasila. Hal ini ditunjukkan oleh responden yang memberikan opsi “setuju” berjumlah 26 responden atau 28,26%

dan yang memilih opsi “sangat setuju” berjumlah 34 responden atau 36,95%.

Berdasarkan hasil survei secara keseluruhan dari 30 pertanyaan yang diedarkan melalui angket kepada responden generasi muda dari kalangan mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo dan mahasiswa Poltekes Gorontalo menunjukkan adanya pengaruh negatif dari bentuk ideologi radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo. Untuk menindaklanjuti hasil survei tentang fenomena paham radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo pemerintah daerah dan Perguruan Tinggi yang ada di daerah ini harus segera berbuat dalam mengantisipasi menyebarnya sel gerakan radikal di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan itu diwujudkan melalui pembahasan dalam kurikulum pendidikan tentang sub pokok materi Ideologi radikalisme diajarkan di semua jenjang pendidikan formal. Dan bagi pemerintah daerah untuk sesegera mungkin melakukan kegiatan sosialisasi sampai kepada tingkat lurah dan desa. Agar generasi muda tersentuh akan pengetahuan mengapa bentuk kegiatan radikalisme dilarang untuk berkembang di negara kita khususnya di daerah Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan data hasil riset pada tahun 2018 tentang kondisi generasi muda akan terpapar paham radikalisme terjawab sudah melalui hasil riset, sekalipun data tersebut dilakukan pada tahun 2018. Namun, hasil riset ini telah membuktikan gambaran tentang kondisi bahaya laten radikalisme telah masuk di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo. sekalipun hanya sebatas pengetahuan, pemahaman dan sikap generasi muda akan bahaya laten paham radikalisme. Akan tetapi, fakta dan data tentang kondisi radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo

dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal di dalam upaya melakukan kegiatan deradikalisme kepada generasi muda yang terpapar dengan adanya paham ideologi radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Gorontalo.

Hasil riset ini sebagai *trigger* atau pintu masuk akan berkembangnya kelompok gerakan terorsisme. Ini sudah dibuktikan dengan adanya penangkapan tujuh orang warga kabupaten Pohuwato oleh densus 88 yang terlibat sebagai jaringan kelompok terorisme dan penangkapan kelompok teroris di provinsi Sulawesi Selatan yang telah dibawa ke Jakarta. Dengan adanya penangkapan kelompok gerakan teroris di Gorontalo membuktikan adanya korelasi dengan hasil riset yang dilakukan pada tahun 2018. Aktivitas gerakan teroris di daerah Provinsi Gorontalo ditemukan pada tahun 2020 artinya dua tahun setelah data hasil riset yang membuktikan pernyataan BNPT bahwa daerah Provinsi Gorontalo merupakan daerah rawan berkembangnya paham radikalisme.

Dengan adanya hasil riset yang menunjukkan bahwa generasi muda kita di daerah ini telah terpapar akan paham radikalisme menjadi solusi akan pembinaan bagi generasi muda di daerah ini segera dilakukan tindakan deradikalisasi oleh pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Artinya, permasalahan dalam riset tersebut tidak mengabaikan fakta dan menyembunyikan fakta bahwa tudingan BNPT bahwa provinsi Gorontalo menjadi lima daerah yang rawan akan pengaruh gerakan radikalisme negatif seperti organisasi ISIS, dan organisasi teroris ada benarnya. Dan klimaks dari hasil riset dan tuding BNPT tersebut dibuktikan dengan tertangkapnya kelompok teroris di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2020. Demikian kajian pengetahuan dan pemahaman generasi muda akan bahaya laten paham radikalisme yang dibahas pada bagian bab III di atas. Dan untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor apa yang menyebabkan generasi

muda terpapar dalam paham radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo akan diulas dibab berikutnya. Untuk itu, kepada pemerhati sosial tentang penanggulangan paham radikalisme dan pemerintah daerah mari sama-sama kita mengkaji dan menganalisis mengapa generasi muda kita di daerah Gorontalo dapat terpapar paham radikalisme.

Kita ketahui kejahatan teroris dan pembentukan organisasi ISIS, kebangkitan kembali PKI sebagai bentuk larangan di negara Indonesia. Untuk itu kita perlu melakukan kajian mengapa paham radikalisme itu bisa masuk ke wilayah Provinsi Gorontalo. Padahal aparat sangat ketat melakukan penjagaan di daerah perbatasan, tetapi ideologi radikalisme ini dapat memasuki wilayah daerah Gorontalo yang selama ini kita menganggap daerah Provinsi Gorontalo aman akan ancaman radikalisme.

Untuk mendalami dan membahas fenomena tersebut dapat kita analisis melalui bagian bab berikutnya dalam buku stabilitas dan ancaman radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo tentang faktor-faktor yang menyebabkan generasi muda dipengaruhi paham radikalisme.

Bab IV

Penyebab Munculnya Radikalisme

A. Faktor-Faktor Terpaparnya Radikalisme pada Anak Muda

Dalam mengetahui mengapa orang terlibat dalam aliran radikalisme dapat kita lihat melalui faktor-faktor penyebab seseorang menjadi radikal. Hal ini dapat digali melalui suatu penelitian lebih dalam mengapa seseorang terjerumus dalam gerakan radikalisme. Melalui penelusuran literatur dan jejaring internet ditemukan beberapa alibi seseorang dapat dipengaruhi oleh gerakan ideologi radikal di antaranya sebagai berikut.

1. Pendidikan Rendah

Latar belakang pendidikan yang rendah dianggap merupakan salah satu penyebab mengapa generasi muda ataupun anak sekolahan sangat tertarik untuk terlibat dalam kegiatan radikal. Acap kali generasi muda tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mencari jalan alternatif penyelesaian suatu masalah selain bertindak radikal ataupun melakukan aksi-aksi ekstrim. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dengan latar pendidikan tinggi hingga bergelar doktor sekalipun dapat menjadi salah seorang aktor intelektual di balik penyebaran ajaran radikal dan terorisme di Indonesia.

2. Krisis Identitas

Secara umum, target perekrutan anggota kelompok radikal ataupun ekstrimisme berasal dari kelompok generasi muda yang masih dalam pencarian jati diri. Dalam proses perekrutan generasi muda sangat rentan terhadap tekanan kelompok dan juga membutuhkan sebuah panutan hidup. Tekanan kelompok dilakukan dengan adanya perekrutan dan seleksi oleh organisasi radikal berkedok kelompok keagamaan dan forum studi yang terbatas. Apabila salah seorang target telah masuk ke dalam lingkungan kelompok radikal dan ekstrim, maka tindakan selanjutnya sang perekrut akan mulai melakukan tahapan komunikasi yang lebih intensif guna memengaruhi pola pikir dan perilaku sang target, baik dengan cara dialog, ceramah atau bahkan sebuah ritual. Pengaruh kelompok perekrut ini sangatlah besar karena tanpa disadari secara terus menerus si target akan dituntun mengikuti arus perubahan dan pemahaman nilai-nilai kelompok radikal.

3. Minimnya Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi yang kurang memadai disertai dengan sikap apatis terhadap kondisi lingkungan sekitar dapat dianggap menjadi salah satu faktor penyebab untuk menarik generasi muda dalam melakukan tindakan radikal. Generasi muda tidak memiliki kebanggaan secara materi dan tidak memiliki pandangan positif mengenai masa depan yang dihadapi di dunia ini. Biaya sekolah yang mahal, membuat sebagian generasi muda menjadi putus sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan hingga penghasilan yang memadai, terkadang dijadikan sebagai salah satu faktor kekesalan terhadap sistem perekonomian yang dianggap keberatan terhadap ideologi liberal sebagai penyebab lantaran sistem yang ada dianggap tidak pro

terhadap rakyat dan tidak juga memberikan kesejahteraan terhadap dirinya. Dengan keadaan tersebut penghancuran terhadap dirinya dan orang lain dianggap sebagai suatu yang wajar karena materi yang tidak diperoleh akan digantikan dengan kenikmatan di akhirat sebagai imbalannya melakukan perjuangan dan pengorbanannya setelah mati syahid.

4. Keterasingan secara Sosial dan Budaya

Adanya rasa keterasingan di lingkungan dan jarak di antara masyarakat umum dengan hubungan anggota radikal merupakan salah satu penyebab yang membuat generasi muda rentan bergabung dengan organisasi radikal. Sehingga dengan adanya rasa keterasingan dan jarak tersebut, kelompok terorisme tidak merasa menjadi bagian dari masyarakat akan merasa tidak memiliki hubungan emosional dan terikat oleh masyarakat di sekitarnya. Tak ayal sebuah kelompok radikal seringkali melakukan aktivitas penghancuran terhadap fasilitas umum dan memakan korban rakyat sipil.

5. Keterbatasan Akses Politik

Aspirasi politik yang tidak tersalurkan melalui jalur politik formal berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, dan menjadi salah satu alasan untuk sebuah organisasi melakukan aksi radikal. Sehingga dengan melakukan aksi dan tindakan radikal yang cenderung “nyeleneh” dimata masyarakat dianggap sebagai sebuah solusi atau terobosan kontroversial untuk dapat menyampaikan pesan organisasi ke masyarakat luas. Adanya rasa ketakutan yang mendalam diharapkan oleh sebuah organisasi radikal akan membuat pesan yang ingin disampaikan tertanam dan melekat dibenak target khalayak.

6. Primordialisme dan Etnosentrisme

Rasa kebersamaan antara sesama umat dalam suatu agama membangun sebuah tali persaudaraan yang kuat melintasi perbedaan suku, budaya, negara dan geografis. Rasa solidaritas yang tinggi tersebut menciptakan suatu tali batin dan rasa empati yang mendalam. Seperti halnya apabila ada sekelompok umat yang merasa ditindas oleh pemerintah dan agama lain, dapat menjadi faktor pembangkit semangat kelompok radikal dan terorisme untuk bergerak seakan-akan membantu kelompok-kelompok yang mengalami tindak penindasan. Tersirat jelas pada perang dingin antara kelompok-kelompok negara Barat dan kelompok negara Timur Tengah. Di mana Israel dianggap sebagai biang keladi penindasan umat Islam yang kemudian membuat para kelompok radikal dan ekstirmis melancarkan aksi perlawanan yang tidak hanya ditujukan kepada Amerika dan Israel, namun negara-negara pendukung atau hanya berhubungan ekonomi dan budaya dalam lingkup kecil pun menjadi target penyerangan kelompok radikal.

Berdasarkan faktor penyebab adanya paham radikalisme dapat masuk di suatu daerah dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki apa yang menjadi penyebab dalam tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme disuatu daerah untuk dicarikan solusi dalam penanganan faktor penyebab tersebut. Misalnya, rendahnya pendidikan. Pemerintah daerah berupaya untuk dapat membantu warga masyarakatnya menikmati pendidikan dasar. Dengan perhatian kepada peningkatan kualitas pendidikan di daerah Gorontalo, warga masyarakat kita akan tersentuh melalui telaah akademik akan paham radikalisme sebagai permasalahan trasnasional yang melintasi antara negara.

Gerakan teroris yang ada di Indonesia sesungguhnya bukan berasal dari bagian ideologi warga negara Indonesia. Pemahaman gerakan teroris yang masuk di kalangan generasi muda berasal dari pengaruh dari gerakan teroris di negara Timur Tengah yang masuk melalui siaran TV Swasta, TV negeri bahkan melalui media sosial pemberitaan perlawanan kelompok ISIS dan Teroris di negara konflik seperti yang terjadi ketika tentara Amerika Serikat menduduki wilayah negara Afganistan, menduduki wilayah negara Irak dan di beberapa negara Timur Tengah seperti di negara Palestina akan pendudukan tentara Israel. Perjuangan kaum mujahidin di wilayah konflik tersebut memengaruhi perilaku pemikiran generasi muda kita bergabung dengan kelompok mujahidin melalui panggilan Jihad.

Sebenarnya kalau ini dimaknai Jihad seharusnya apa yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung pada kelompok ISIS dan teroris medan perjuangannya harus ada dilokasi konflik, bukan berjihad di negara kita yang sementara melakukan hubungan kerjasama perdagangan dengan negara yang terlibat konflik di medan peperangan. Sehingga pemahaman gerakan teroris akibat dari transnasional dianggap tidak sesuai dengan makna jihad apa yang diartikan di dalam Islam. Islam tidak mengajarkan Jihad di daerah damai, tetapi Jihad lebih diarahkan kepada umat Islam yang dizalimi di medan perang.

Dengan kurangnya pengetahuan warga masyarakat kita khususnya generasi muda kita terpengaruh oleh seruan jihad di daerah konflik seperti di negara Timur Tengah. Alasan apa pun yang dikatakan oleh kelompok teroris dan ISIS dalam memerangi di mana saja di setiap negara itu adalah imbauan yang salah. Dan fakta itu benar sebagaimana seruan ISIS kepada umat Islam untuk melawan negara AS dan sekutunya di mana pun mereka berada padahal apa yang terjadi di negara

Timur Tengah mungkin hanya rebutan lahan. Sehingga ISIS ingin merebut pemerintah yang sah di negaranya dengan jalan menyuarakan Jihad.

Dengan fakta-fakta di atas sebetulnya gerakan Jihad yang dianjurkan oleh kelompok ISIS dan teroris itu keliru. Fakta yang benar terjadi adalah perebutan lahan bisnis, bukan kepentingan agama yang menjadi sumber konflik saat ini. Dengan demikian saya berharap kepada generasi muda yang ada di daerah Gorontalo jangan termakan hasutan yang mengatas namakan agama hanya untuk kepentingan kelompok ISIS dan Teroris yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah di negaranya. Propaganda jihad oleh kelompok ISIS dan kelompok teroris sesungguhnya adalah pertarungan di dalam merebut sumber daya ekonomi di daerah konflik. Apa yang dilakukan oleh organisasi ISIS dan Teroris hanya ingin memprovokasi warga dunia khususnya umat Islam dalam memperjuangkan kepentingan kelompok ISIS dan teroris menguasai dan menggulingkan pemerintahan yang sah di negara konflik.

Dengan kajian faktor seseorang terpengaruh paham radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo melalui pendidikan yang rendah itu benar. Yang dimaksudkan dengan faktor penyebab generasi muda kita bersimpatik dengan gerakan ISIS dan gerakan teroris karena kelompok ISIS dan teroris menggunakan label agama Islam dalam memperjuangkan keinginan kelompok teroris dan ISIS merebut dan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Dengan demikian, generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo jangan sampai terpengaruh dengan propaganda politik yang dimainkan oleh kelompok ISIS dan teroris dalam mengajak anda generasi muda untuk berjihad. Akibatnya anda sebagai generasi muda di daerah ketika menjalankan misi organisasi ISIS dan Teroris melakukan jihad dengan melakukan bom bunuh diri sia-sia

sudah. Anda bukan hanya mati syahid, melainkan Anda telah merugikan kepentingan orang banyak dengan jalan menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah. Anda generasi muda yang melakukan bom bunuh diri itu untuk mati syahid, justru Anda dicela oleh seluruh umat Islam bahwa apa yang Anda lakukan melakukan bom bunuh diri sesungguhnya merugikan diri Anda sendiri, Anda tidak mendapatkan pahala tentang apa yang Anda lakukan, justru sebaliknya Anda masuk ke dalam neraka karena anda melakukan apa yang dilarang oleh semua agama. Di mana agama tidak menghendaki permusuhan dan menghilangkan nyawa orang yang tidak berdosa.

Dengan pemahaman terhadap ideologi radikalisme negatif ini anda harus berhati-hati menerima ajakan dari kelompok ISIS dan gerakan teroris dengan iming-iming apa pun. Harus kita sadari apa yang dilakukan oleh kelompok ISIS dan Teroris sesungguhnya motivasinya hanya ingin menggulingkan pemerintah yang sah di negaranya atau kelompok ISIS dan teroris ingin melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah di negaranya guna memperebutkan lahan ekonomi dan fasilitas negara. Dalam artian perjuangan kelompok ini hanya semata-mata di dalam merebut kekuasaan yang sah. Dengan apa yang menjadi analisis saya mengapa kelompok ISIS dan teroris menggiring opini bahwa apa yang mereka lakukan merupakan menegakkan syariat Islam. Sesungguhnya motivasi itu lari dari syariat Islam. Karena Islam bukan agama teroris dan bukan pelaku teroris. Stigma ini yang melekat kepada agama Islam. Dan berdampak kepada kriminalisasi warga negara yang menganut agama Islam di negara Eropa dan di negara AS. Warga negara AS, dan di negara Eropa warga negara pemeluk agama Islam menjadi musuh bagi negara yang ditempatinya. Semua ini akibat dari perjuangan ISIS dan Teroris yang menggiring opini jihad dalam merebut kekuasaan yang sah di

negaranya. Semoga dengan telaah ini melalui pendidikan, generasi muda kita akan memahami konstalasi Internasional menyangkut ajakan jihad dari kelompok ISIS dan Teroris yang sama sekali keluar dari ajaran Islam sesuai yang ada dalam Alquran dan hadits yang menjadi sumber dari pelaksanaan syariat Islam.

Islamophobia di semua negara diakibatkan dari ajakan kelompok ISIS dan Teroris dalam mengajak berjihad yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga dengan analisis dalam buku ini generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo tidak akan bersimpatik dengan perjuangan kelompok ISIS dan Teroris. Karena sudah jelas apa yang mereka perjuangkan bukan semata-mata menegakkan negara Islam, tetapi agama Islam digunakan untuk kepentingan dalam melakukan kudeta bagi pemerintahan yang sah yang ada di daerah konflik. Dengan demikian, saya berharap generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo untuk tidak terlibat dalam gerakan radikalisme negatif yang disuarakan oleh kelompok ISIS dan kelompok teroris.

Demikian halnya dengan faktor krisis identitas salah satu faktor dapat berkembangnya paham radikalisme di kalangan generasi muda. Generasi muda terkadang masih labil di dalam mengenal jati diri bangsanya. Krisis identitas bisa menjadi *trigger* masuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda. Untuk mengantisipasi krisis identitas sebaiknya pemerintah daerah dan perguruan Tinggi selalu menyosialisasikan tentang eksistensi dasar negara Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga penguasaan pengetahuan dan pemahaman yang lengkap kepada generasi muda tidak berdampak diterimanya ajaran radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo.

Bila dilihat fakta sosial politik bahwa pelaku bom bunuh diri rata-rata ada pada usia generasi muda. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa generasi muda kita sangat mudah terkontaminasi ajaran ideologi radikalisme. jawabannya adalah karena generasi muda kita masih sangat labil melihat konstalasi politik Internasional. Konstalasi politik Internasional saat ini terjadi perang antara ideologi di dalam menguasai dan memengaruhi warga negara Indonesia. Target ideologi radikalisme kepada generasi muda bagaimana generasi muda dapat menerima ajaran ISIS dan gerakan teroris di kalangan generasi muda di Indonesia untuk memusuhi negara AS dan sekutunya. Padahal masalahnya hanya antara militer AS dan sekutunya dengan ISIS dan teroris. Bukan lawan mereka yang ada di negara Indonesia yang sementara berinvestasi atau turis mancanegara yang menjadi sumber pendapatan negara melalui Pariwisata. Sehingga ajakan ISIS kepada generasi muda yang masih dalam proses pencarian jati dirinya terpengaruh dengan ajakan tersebut.

Dengan demikian, apa yang saya ingin sampaikan kepada generasi muda di Indonesia dan lebih khusus di daerah Provinsi Gorontalo untuk menolak ajakan jihad yang diserukan oleh kelompok ISIS dan teroris di Indonesia. Apalagi bila dianalisis berdasarkan dengan jatih diri bangsa Indonesia ajaran ISIS dan gerakan terorisme sangat bertentangan dengan ajaran ideologi Pancasila sebagai dasar negara RI. Ideologi negara Pancasila menolak seruan Jihad karena bertentangan dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Seruan jihad oleh kelompok ISIS dan Teroris kepada generasi muda sangat merusak hubungan persaudaraan masyarakat Internasional yang menghendaki perdamaian sama dengan apa yang ada di dalam nilai-nilai pancasila. Negara Pancasila sangat menolak gerakan *violence* yang mengatasnamakan agama Islam, karena negara pancasila adalah negara yang didasarkan atas

ketuhanan yang maha Esa di mana mengandung makna negara Indonesia sebagai negara yang beragama. Dan semua agama di negara Indonesia anti terhadap tindakan kekerasan yang diajarkan oleh ajaran ISIS dan teroris.

B. Saran untuk Pemerintah dalam Mengatasi Radikalisme

Membangkitkan jati diri generasi muda terhadap pengaruh paham radikalisme pemerintah daerah dan perguruan tinggi di daerah, harus lebih aktif melakukan sosialisasi akan konsep ideologi negara Pancasila. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di semua daerah mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan dan desa, akan meminimalisasi masuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo.

Demikian juga dengan faktor minimnya kondisi ekonomi sebagai faktor yang dapat memengaruhi lebih cepat ajaran radikalisme dapat masuk dialam pikiran generasi muda kita. Dengan alasan ini pemerintah seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti membantu melalui dana desa dan pemerintah daerah menyalurkan bantuan pinjaman modal usaha kepada warga masyarakatnya. Sehingga kondisi ekonomi meningkat. Dengan kondisi kemiskinan yang ada di negara kita sekitar 9%. Menjadi *trigger* bagi kelompok ISIS dan Teroris mengiming-imingi bantuan modal usaha bahkan perjalanan umrah dan haji gratis. Stimulus ekonomi ini yang digunakan oleh kelompok teroris dan ISIS dalam memengaruhi ideologi radikalisme untuk diikuti oleh generasi muda di Indonesia.

Dengan adanya identifikasi faktor penyebab merebaknya paham radikalisme di Indonesia dan lebih khusus di daerah Gorontalo, pemerintah daerah sebaiknya mengatasi kemiskinan melalui bantuan sosial yang diberikan kepada warga masyarakatnya. Kondisi kemiskinan akan menjadi lahan subur berkembangnya paham radikalisme di Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah harus memperhatikan kebutuhan dasar warganya sehingga tidak akan dimasuki oleh paham radikalisme yang menjanjikan kebahagiaan kepada generasi muda yang siap di baeat menjadi anggota ISIS atau anggota teroris.

Keseriusan pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan warga masyarakatnya akan memiliki kekuatan dalam menghalau lajunya pengaruh gerakan radikalisme di Indonesia. Memang benar adagium yang mengatakan kemiskinan merupakan *trigger* dan berkembangnya paham radikalisme, tetapi bila dilihat dari pentolan pelaku ISIS dan Teroris mereka bukan berasal dari kondisi warga dunia yang miskin seperti pentolan Teroris amahum Osama bin Laden dari negara afganistan. Dia berasal dari kelompok warga dunia yang masuk dalam klas milyader sehingga terbantahkan bahwa mereka yang amsuk di dalam menggerakan teroris dan ISIS anggotanya karena eknomi yang terpuruk. Bin Laden dan muktar al Bagdadi adalah sosok pentolan ISIS dan Teroris Internasional yang memiliki kekakayaan yang berlimpah. Yang menjadi pertanyaan apakah motivasi Bin Laden dan Muktar Albagdadi dalam melakukan gerakan ISIS dan gerakan Terorisme yang sasasanya memusuhi negara AS dan sekutunya.

Kasus Bin laden dan Muktar Albagdadi sebagai pentolan gerakan radikalisme global merupakan suatu bentuk representasi dari perjuangan menegakkan keadilan lembaga Internasional akan penindasan negara Islam di dunia

Internasional. Kalau demikian apakah pengikut Bin Laden dan Muktar Albagdadi itu salah. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus berhati-hati dalam memberikan tanggapan akan kasus dua tokoh besar yang memiliki pengaruh di belahan dunia Internasional.

Jawaban dari kegiatan yang dilakukan oleh kedua tokoh besar radikalisme global ini dapat kita benarkan argumennya di dalam menegakkan keadilan Internasional. Tetapi tindakannya dalam menghadapi aksi-aksi negara AS dan seketunya dengan melakukan pemboman di negara AS seperti yang terjadi di gedung WTC dan gedung Pentagon AS yang membunuh banyak warga negara AS dan warga negara Inggris, Prancis dsb yang berada di gedung WTC dan gedung pentagon ribuan nyawa melayang. Sehingga menjawab apa yang dilakukan oleh pentolan ISIS dan Teroris sangat hati-hati memberikan interpretasi, mengapa karena tindakan radikalisme melalui aksi pembajakan pesawat AS lalu ditabrakan pada dua gedung tersebut dianggap sebagai aksi biadab yang dilakukan oleh kelompok ISIS dan gerakan teroris.

Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh kedua pentolan ISIS dan Teroris telah mencederai perjuangan masyarakat Internasioanal dalam memperjuangkan negara Palestina dengan negara Israel. Demikian juga dengan stigma negatif masyarakat Internasional kepada penganut agama Islam. Islam dianggap sebagai agama teroris.

Bila kita menganalisis agama Islam bukan agama teroris melainkan agama rahmatan lil Alamin. Bila ada kelompok warga negara yang mengatasnamakan agama Islam dalam melakukan aksinya melakukan bom bunuh diri, itu bukan aksi yang dibenarkan oleh ajaran syariat Islam. Oknum penganut Islam tersebut sebagai pelaku bom bunuh diri telah terpapar paham radikalisme negatif yang tidak diakui dalam dakwah Islam dalam menyebarkan agama. Islam agama damai yang

membuat Islam mengalami cap negatif sebagai *Islamophobia* karena ajaran Teroris dan ISIS yang menggunakan label agama Islam dalam memperjuangkan ambisi kekuasaannya dalam melakukan kudeta kepada pemerintah yang syah di negara asal kelompok ISIS dan teroris. Generasi muda kita hanya digunakan sebagai alat dalam mensukseskan ambisi politik dari ISIS dan teroris dalam menghabisi musuh-musuhnya dalam kompetisi sumber daya ekonomi di negara konflik tadi.

Dengan kesadaran pengetahuan apa yang menjadi telaah kami pada bagian bab ini khususnya pada faktor yang memudahkan gerakan radikalisme dapat masuk di Indoensia melalui faktor ekonomi menjawab sudah bahwa proses masuknya paham radikalisme dipengaruhi oleh kondisi ekonomi warga masyarakat yang mengalami penurunan sumber daya ekonomi (masyarakat berada pada tahap garis kemiskinan atau *poperty line*).

Demikian juga dengan faktor yang memengaruhi generasi muda terpapar paham radikalisme melalui faktor Keterasingan secara sosial dan budaya. Pengaruh keterasingan warga negara dengan budaya demokrasi atau tertutup kepada budaya pendidikan modern akan memengaruhi masyarakat yang termaginalkan tersebut dengan mudah akan terpapar paham radikalisme negaratif. Dengan demikian tugas pemerintah daerah membuka akses kesuatu daerah yang terisolir dari perkembangan peradaban. Bila kita diuji asumsi tersebut apakah pengaruh terisolir warga negara dapat dengan mudah dipengaruhi oleh tradisi radikalisme yang mengedepankan tindakan kekerasan dalam mewujudkan keinginan dan kebutuhan diri dan keluarganya.

Fakta di atas ada benarnya bila warga negara sangat terisolir dari perkembangan peradaban modern, warga masyarakat disuatu derah tidak akan mengenal tatakelola pemerintahan yang baik. Agar tidak terjadi gesekan antar

warga masyarakatnya. Situasi kesenjangan sosial ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikalisme untuk memengaruhi warganya agar melakukan aksi-aksi radikalisme dalam bentuk kegiatan bergabung dengan ISIS atau dengan kelompok teroris.

Untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme di daerah yang terisolir dari budaya luar. Pemerintah daerah perlu membuka akses jalan, akses telekomunikasi dsb. Sebagai pendukung upaya pencegahan masuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda di Indonesia.

Demikian halnya dengan faktor Keterbatasan akses politik yang akan mempermudah masuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda. Pandangan ini terjadi bila generasi muda di daerah kurang tersentuh oleh pandangan politik oleh partai politik yang ada di daerah dan bahkan kunjungan birokrasi kepada generasi muda sangat jarang diterima oleh generasi muda akan pandangan paham radikalisme di kalangan generasi muda. Dalam menyikapi terhadap faktor keterbatasan akses politik sebagai *trigger* generasi muda terpapar paham radikalisme di Indonesia merupakan petunjuk kepada pemerintrah daerah dan partai politik akan tanggung jawabnya di dalam menyosialisasikan paham radikalisme yang negatif untuk tidak berpengaruh kepada mindset generasi muda dalam menerima paham radikalisme.

Berdasarkan argumentasi di atas sudah saatnya pemerintah melalui badan Kesbangpol di setiap daerah untuk mensosialisasikan bahaya ancaman paham radikalisme di kalangan generasi muda. Dengan komunikasi melalui kegiatan bedah buku, FDG (Fokus Discusion Grouf) dalam membahas ancaman paham radikalisme di kalangan generasi muda sampai ditingkat desa dan kelurahan akan dapat mencegah masuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda di

daerah khususnya kepada generasi muda di daerah Glorontalo.

Fakta-fakta ini terbukti dengan hasil riset yang dilakukan kepada generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo generasi muda ada yang ragu dan tidak mengetahui tujuan dari kegiatan kelompok radikalisme yang masuk di kalangan generasi muda. Karena strategi yang dipakai oleh kelompok ISIS dan Teroris dengan membawa syariat Islam dalam perjuangan untuk melakukan Jihad.

Dengan adanya akses politik yang diberikan oleh badan kesbangpol di setiap daerah dan partai politik membuka pemahaman generasi muda akan tujuan akhir dari kelompok yang mengatasnamakan Jihad dalam melakukan kegiatan dalam menegakkan syariat Islam. Padahal apa yang dikemukakan oleh kelompok ISIS dan Teroris sangat bertentangan dengan sistem politik pancasila sebagai dasar negara.

Semua propaganda yang disampaikan oleh kelompok ISIS dan Teroris semuanya bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945. Dengan demikian adanya sosialisasi terhadap ancaman paham radikalisme bagi generasi muda yang dilakukan oleh pemerintah dan partai politik di daerah akan mempermudah berkembangnya paham ideologi radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo.

Demikian halnya dengan faktor Primordialisme dan etnosentrisme dapat menjadi *trigger* masuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda. Di mana dengan sikap primordialisme akan mudah disusupi oleh paham radikalisme dalam merusak tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan di daerah, strateginya kelompok ISIS dapat memecah belah kelompok masyarakat yang awalnya harmonis menjadi disharmoni. Dengan menjadikan kelompok

agama misalnya Islam untuk membenci bukan bagian dari kelompok penganut agama Islam. Demikian halnya dengan sikap etnosentrisme yang hanya mengakui bahwa golongan agamanya yang merasa benar. Sikap masyarakat ini akan dapat dimanfaatkan oleh kelompok ISIS dan teroris dalam membenturkan antara etnis, agama dan bahkan tradisi, dan ras menjadi objek dari paham radikalisme dalam membenturkan antar sesama warga masyarakat. Apalagi masyarakat Internasional misalnya masyarakat Eropa, AS dengan warga masyarakat dunia di bagian Timur Tengah yang beragama Islam.

Apa yang terjadi dengan benturan antara tradisi Barat dan Timur ini dapat kita lihat melalui teori *The Clash Of Civilization* sebagaimana yang dikemukakan oleh Samuel Huntington akan terjadi benturan kebudayaan demi memecah belah suatu bangsa. Oleh karena sikap primordialisme dan sikap etnosentrisme dapat dijadikan *trigger* bagi kelompok teroris dan ISIS dalam mewujudkan ambisi kekuasaan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Strategi kelompok ISIS dan Teroris mengajak kedua kelompok masyarakat yang berbeda agama, berbeda ras dan kebudayaan untuk saling memerangi. Karena lawan ISIS dan teroris di negara mereka adalah bangsa Eropa dan negara AS. Melalui sentimen agama, sentimen ras dan tradisi kelompok teroris dan ISIS memasukan pengaruh ideologinya untuk bersama-sama dengan kelompok warga negara beragama Islam untuk menghadapi musuhunya. Padahal kepentingan yang diperjuangkan oleh ISIS dan Teroris hanya kepentingan politik dan ekonomi bukan ideologi agama.

Agama Islam hanya dijadikan sebagai alat dalam memperjuangkan ambisi kekuasaan untuk menguasai kekuasaan yang sah di negaranya. Dalam arti simbol agama hanya dijadikan sebagai tameng untuk memusuhi negara yang berkonflik dengan ISIS dan Teroris. Dalam membuktikan fakta

tersebut ISIS dan Terorisme ditolak di negara-negara Timur Tengah. Seperti di negara Saudi Arabia, Iran dan Irak dsb. Kehadiran mereka tidak diterima oleh negara yang mayoritas beragama Islam. Sehingga dapat dikatakan ISIS dan Teroris bukan ajaran Islam. Ajaran Islam yang sebenarnya adalah mengajarkan penghormatan kepada hak asasi manusia khususnya dalam perbedaan keyakinan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Alquran "*lakum dinukum waliyadin*" artinya bagimu agamaku dan bagimu agamamu.

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*. Islam pemberi rahmat bagi siapa pun apakah perbedaan agamanya, perbedaan rasnya, dimata Islam semua manusia adalah sama tidak mengenal perbedaan kasta, perbedaan keyakinan. Sehingga itu ajaran ideologi Teroris dan misi organisasi ISIS tidak termasuk misi ajaran Islam. Dengan dasar ini negara-negara Islam di Timur tengah tidak menerima kehadiran organisasi ISIS dan Teroris. Apalagi negara Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila yang mengadopsi sikap toleransi antar umat beragama sesuai dengan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa dan nilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna penghargaan kepada hak asasi manusia. Dengan demikian eksistensi organisasi teroris dan kehadiran ISIS sangat bertolak belakang dengan dasar negara kita Pancasila. Larangan terhadap ideologi teroris dan organisasi ISIS telah diatur di dalam konstitusi dan perundang-undangan melalui UU Terorisme. Dengan demikian, negara Indonesia tidak mendukung adanya organisasi ISIS dan keberadaan teroris.

Demikianlah kajian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi warga negara khususnya generasi muda terpapar paham radikalisme. Semoga telaah pemikiran di atas dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda di

Indonesia dan lebih khusus bagi generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo. kami berharap daerah Provinsi Gorontalo dapat mengantisipasi sel jaringan ISIS dan gerakan terorisme yang merupakan bagian dari gerakan radikalisme negatif. Mengapa kami menekankan kepada bentuk radikalisme negatif karena di awal kita pada bab terdahulu dalam kajian ini telah mengidentifikasi bahwa bentuk radikalisme ada yang positif dan ada bentuk radikalisme negatif.

Bentuk radikalisme positif seperti mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan dasar negara kita Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945 dapat dibenarkan dalam berkembang di negara kita. Tetapi bentuk ideologi radikalisme negatif yang mengajarkan kekerasan tidak diperkenankan untuk hidup dan berkembang di negara Indonesia yang kita cintai. Dengan demikian pembahasan dalam buku ini adalah mengkaji sesungguhnya apakah paham radikalisme itu. Dari uraian di atas kita dapat melihat apa dan bagaimana ideologi radikalisme dan apa yang mendorong generasi muda kita ada yang terpapar paham radikalisme sampai dengan aksi-aksi teroris.

Dalam mengulas lebih dalam lagi apakah itu teroris dan ISIS dapat kita lihat melalui kajian pada bab berikutnya yang lebih mengidentifikasi ajaran paham radikalisme. Dengan kajian apa itu terorisme dan organisasi ISIS dapat memberi pemahaman kepada generasi muda untuk lebih berhati-hati kepada pengaruh paham radikalisme negatif di dalam sikap dan perilaku generasi muda khususnya generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo.



Bab V

Paradigma Makna Teorisme dan Radikalisme

Fenomena terorisme dan radikalisme di Indonesia dapat kita ketahui dari perjalanan beberapa tokoh terorisme yang pernah mengguncang tanah air kita melalui aksi-aksi serangkaian bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia. Data dan fakta sebagai jejak aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris yang ada di Indonesia terekam di dalam media sosial dan referensi buku yang beredar di toko Buku dan perpustakaan tentang aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok terorisme di Indonesia.

Mengapa perlu kita ketahui jejak kekerasan yang dilakukan oleh terorisme di Indonesia, agar generasi muda kita tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh para teroris yang sering dalam aksinya pelakunya membawa keyakinan Jihad, padahal apa yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam organisasi tersebut berbeda dengan ajaran Islam sesungguhnya. Namun, walau begitu fakta-fakta tentang kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris telah terekam dalam sejarah kalam bangsa ini. Beberapa kutipan referensi yang ada tentang jejak perjalanan kelompok terorisme di Indonesia dapat kita lihat melalui kutipan literatur di bawah ini.

Akhir-akhir ini kita dihantui “bom buku”. Ternyata hantu terorisme yang keluar dari pintu gelapnya pada aksi terorisme 11 September di World Trade Center (WTC) pada tahun 2003 masih berkeliaran sampai saat ini. Terorisme menjadi hantu

menakutkan banyak negara-negara di seluruh dunia. Sampai saat ini terorisme masih menjadi bagian penting bukan saja dalam kaitan keamanan negara dari aksi terorisme, namun wacana terorisme tetap hangat dan diperdebatkan. Sebagian kalangan bahkan mengkritisi bahwa terorisme sesungguhnya bisa muncul secara variatif, karena terorisme bisa muncul melalui simbolisme keagamaan, sebagian lainnya melalui aktivitas perampokan, dan bahkan sebagian lainnya melalui aktivitas aktor-aktor kekuasaan negara (Susan, 2012: 119).

Berdasarkan sumber kutipan di atas bahwa kegiatan teroris memang fakta dan bukan halusinasi akan adanya hantu di siang bolong. Kegiatan aksi teroris terlihat sangat fenomenal ketika melakukan pembajakan pesawat dan setelah itu pesawat yang dibajak ditabrakan kegedung WTC di negara Amerika Serikat. Dengan fakta tersebut masyarakat dunia Internasional sangat takut akan ancaman nyata gerakan terorisme tersebut. Dan apa yang terjadi di gedung WTC dan pangkalan militer AS Pentagon oleh kelompok teroris Alqaeda menyatakan bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan tersebut.

Dengan fakta-fakta di atas kita sebagai bagian dari masyarakat Internasional sangat mengutuk keras atas tindakan tragedi kemanusiaan tersebut yang dilakukan oleh kelompok teroris jaringan Alqaeda di bawah pentolan tertinggi teroris Internasional Usamah bin Laden warga negara Afghanistan. Dengan tragedi ini negara AS menyerukan untuk melawan dan memusuhi jaringan terorisme di semua negara yang ada jaringan sel teroris. Usaha negara AS mencari dan membunuh pimpinan Alqaeda berhasil dilakukan dengan terbunuhnya Usamah bin Laden di negara Afghanistan. Namun gerakan terorisme tidak hilang dan lenyap dimuka bumi, justru para simpatisan Usamah bin Laden bertambah populasinya dan melakukan gerakan teroris di belahan dunia yang dianggap musuh bersama teroris.

A. Meluaskan Makna

Semenjak tragedi WTC makna terorisme disempitkan menjadi aktivitas mereka yang di luar sistem normatif, bergerak di bawah tanah dan menenteng pistol atau bom ke mana-mana. Bahkan akhir-akhir ini di Indonesia, terorisme seolah-olah semakin disempitkan maknanya sebagai ancaman pada Presiden semata. Penyempitan makna tersebut jelas mengaburkan terorisme lainnya yang bisa saja beraktivitas melalui posisi-posisi strategis dalam sistem normatif negara. Dimensi aktivitas terorisme mereka menjadi tidak terendus oleh kontrol moral publik. Kondisi mengharuskan publik meluaskan pandangannya bahwa praktik terorisme tidak hanya dilakukan oleh aktor non-negara di luar sistem normatif, tetapi juga oleh negara (Susan, 2012).

Berdasarkan uraian di atas fakta bahwa terorisme itu ada bukan lagi fatamorgana. Bentuk terorisme global dapat kita lihat melalui peledakan gedung WTC dan pelakunya bukan hanya aktor non-negara dapat juga dilakukan oleh negara. Pernyataan ini memberi makna kepada kita tentang ancaman gerakan terorisme di semua negara termasuk negara kita Indonesia. Bila gerakan teroris dapat menguasai dan menggulingkan pemerintahan yang sah. Wujud teroris tidak lagi dilakukan oleh aktor non-negara, tetapi telah dilakukan oleh negara. Inilah yang mengkhawatirkan kita bila ambisi dari kelompok teroris ini tercapai dalam menggulingkan pemerintahan yang sah. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan bila kelompok teroris masuk di dalam sistem tata kelola negara artinya bila ada anggota teroris yang bergabung dengan oknum negara. Indikasi ini sangat berbahaya bila ideologi teroris ini masuk di bagian birokrasi bahkan di kalangan politisi yang menggerakkan negara. Bila hal ini terjadi di negara tertentu, maka aksi itu akan dilakukan oleh negara. Ini sangat berbahaya

bila paham teroris masuk dalam alam pikiran penyelenggara negara.

Untuk menepis kekhawatiran tersebut sesegera mungkin Presiden kita mengutuk terhadap tindakan yang dilakukan oleh kelompok teroris. Walaupun harapan teroris dianggap benar secara logika, tetapi niat baik yang dilakukan dengan aksi kekerasan merupakan kejahatan negara. Oleh karena itu, gerakan teroris itu sering membawa isu agama, isu keadilan internasional, tetapi bentuk protesnya selalu dilakukan dengan tindakan kekerasan. Dengan niat yang baik tetapi dalam mewujudkan cita-cita dilakukan dengan tindakan melakukan bom bunuh diri atau melakukan pemboman disuatu fasilitas negara dianggap bertentangan dengan hukum. Sehingga aksi gerakan terorisme dikecam oleh semua negara dan gerakannya dianggap sebagai musuh bersama semua negara.

Menyambung apa yang dikutip di atas tentang pemaknaan gerakan terorisme adalah pemaknaan ini sama dengan pendefinisian terorisme oleh PBB (1992) yang menjelaskan bahwa terorisme adalah aktivitas menciptakan kondisi ketakutan luar biasa, baik oleh aktor non-negara maupun negara melalui cara kekerasan. Gerakan kelompok radikal yang mengorganisasi diri untuk melakukan bom bunuh diri atau berencana membunuh Presiden sudah jelas merupakan aktivitas terorisme. Mereka merupakan kelompok dari terorisme non-negara. Namun terorisme non-negara tidak boleh menghapus jejak terorisme negara. Karena terorisme negara lebih deskriptif dalam mendisfungsi kemerdekaan dari tangan rakyat.

Sebagaimana pendapat Igor Primoratz dalam *terorisme The Philosophical Isus* (2004) bahwa terorisme negara sesungguhnya lebih buruk moralnya dan lebih berbahaya daripada terorisme non-negara. Karena terorisme negara mampu bekerja secara lebih masif melalui wewenang dan struktur kekuasaannya,

serta muncul dalam variasi kekerasan yang bisa tidak kasat mata. Primoratz juga mengkritisi bahwa kekerasan terorisme sesungguhnya tidak hanya dilihat melalui bentuk tindakan, seperti membunuh atau melukai. Namun bisa dilihat dari efek fisik sistematis dari terorisme seperti kondisi ketakutan, keresahan dan kematian.

Jika demikian, korupsi misalnya bisa dikategorikan sebagai rangkaian praktik terorisme negara. Karena efek tindakannya tidak kalah dengan tragedi WTC atau bom Bali. Lihat saja pada tahun 2009, berdasar pada beberapa laporan statistik hampir 12 juta anak putus sekolah, 5 juta bayi menderita gizi buruk yang ratusan ribu di antaranya meninggal dunia, serta sekitar 100 juta rakyat berpenghasilan kurang dari 18.000 rupiah setiap harinya. Saat ini mereka diradang keresahan atau naiknya harga kebutuhan pokok yang tidak terbeli oleh penghasilan itu. ini semua efek deskruktif dari terorisme dalam bentuk kekerasan “korupsi” yang merampok dana pembangunan di Indonesia (Susan, 2012: 120).

Menarik ulasan di atas bahwa salah satu dari bentuk gerakan terorisme yang dilakukan oleh negara adalah maraknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Dikatakan korupsi bagian dari gerakan terorisme yang dilakukan oleh *actor state* yang memiliki daya rusak yang sama dengan gerakan terorisme yang dilakukan oleh *actor non state* seperti bom bunuh diri di Bali yang pelakunya M Rozi, Imam Samudra dkk. Beberapa pelaku tersebut telah dieksekusi mati. Tetapi bila pelaku dari bentuk gerakan terorisme itu adalah *actor state* justru tidak dieksekusi mati.

Berdasarkan telaah referensi di atas dapat terjawab pertanyaan pada bagian bab terdahulu sebenarnya siapakah pelaku teroris. Dalam kutipan di atas pelaku teroris bisa saja dilakukan oleh *actor state* dan bisa juga dilakukan oleh *actor non state*. Dengan demikian yang lebih memiliki daya rusak yang

tinggi bila gerakan teroris itu dilakukan oleh *actor state* seperti Presiden, Menteri, Kepala Daerah dan lembaga lain yang mewakili institusi negara bila mereka melakukan korupsi. Korupsi dan terorisme keduanya memiliki daya rusak yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh terorisme. Tindakan terorisme dampaknya dapat dirasakan langsung sesaat pada aksi bom bunuh dilakukan oleh teroris berdampak pada puluhan nyawa meninggal. Tetapi korupsi dampaknya perlahan-lahan rakyat akan kehilangan nyawa, seperti kemiskinan dan akhirnya dampak kemiskinan menimbulkan efek angka harapan hidup masyarakat menjadi rendah. Mengapa karena uang yang seharusnya dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dirampok oleh *actor state* sebagai bagian dari tindakan terorisme tadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gerakan teroris bukan hanya aksi-aksi menggunakan bom bunuh diri dengan target sasaran kerumunan warga, tetapi juga terorisme dapat dilakukan oleh *actor state* melalui penyalagunaan kekuasaan berupa tindakan korupsi yang berdampak kepada kemiskinan warga negara. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah harus tegas dalam memberantas gerakan teroris, baik yang dilakukan oleh *actor non state* dan teroris yang dilakukan oleh *actor state*.

B. Mewaspada Terorisme

Jika terorisme negara lebih tidak bermoral dan berbahaya daripada teroris non-negara, tentu publik juga harus mewaspada setiap aktivitas negara. Secara sosiologis, negara beraktivitas melalui aktor-aktor kekuasaan yang menjalankan wewenang legal formal. Dari presiden sampai kepala desa, dari pejabat pusat sampai kepala dinas di daerah. Sehingga negara

menjadi teroris atau tidak sangat dipengaruhi oleh watak dan kepentingan aktor-aktor kekuasaan tersebut. Fakta buruknya, watak dan kepentingan banyak aktor kekuasaan berpotensi menciptakan rangkaian terorisme sistematis. Karena watak mereka yang tidak berempati pada kebaikan umum dan dihasrati kepentingan parsial (Susan, 2012: 121).

Pernyataan di atas menunjukkan pelaku teroris *actor state* lebih diwaspadai dari pelaku gerakan teroris yang dilakukan oleh *actor non state*. Namun bagi saya kedua-duanya harus kita cegah baik itu pelakunya *actor state* maupun *actor non state*. Karena kedua bentuk kegiatan terorisme, korupsi keduanya merugikan kepentingan warga masyarakat Indonesia. Untuk menindaklanjuti argumentasi dalam kutipan tersebut, kita lihat sambungan uraian di bawah ini.

Watak dan kepentingan parsial tersebut bisa dilihat pada bagaimana para aktor kekuasaan di senayan terus berupaya menciptakan kebijakan yang meresahkan rakyat. Dari dana aspirasi kerumah aspirasi yang intinya mengeruk uang negara hasil pajak rakyat. Banyak kepala daerah berkongkalikingkong dengan pebisnis kotor untuk mengeruk dana pembangunan dan merusak alam. Sedangkan peraturan dari pusat sampai daerah diciptakan atas dasar kepentingan-kepentingan parsial (Susan, 2012: 121). Berdasarkan pernyataan di atas aksi *actor state* dalam melakukan tindakan yang merugikan masyarakat terlihat jelas bahwa pelaku teroris bukan hanya *actor non state*, tetapi juga dilakukan oleh *actor state* di dalam merencanakan kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat yang memiliki daya destruktif yang sama dengan perlakuan gerakan *actor non state* terhadap tindakan terorisme. Menarik di dalam tulisan di atas bahwa sesungguhnya *actor state* lebih berbahaya bila mereka menjadi pelaku gerakan teroris di negara kita. Dan juga dikatakan tindakan *actor state* melalui

kasus korupsi dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang sama dengan aksi gerakan teroris.

Sebagai lanjutan dari kutipan di atas dikatakan watak dan kepentingan parsial tersebut bila dilihat pada bagaimana para aktor kekuasaan di senayan terus berupaya menciptakan kebijakan kebijakan yang meresahkan masyarakat. Dari dana aspirasi ke rumah aspirasi yang intinya mengeruk uang negara melalui hasil pajak rakyat (Susan, 2012: 121).

Dengan pernyataan di atas dalam menghadapi gerakan terorisme yang dilakukan oleh *actor non state*, kita juga harus mewaspadaikan ketika pelaku gerakan terorisme itu berasal dari kalangan *actor state* khususnya perbuatan *actor state* terhadap penyalagunaan kekuasaan seperti perbuatan korupsi dll.

Untuk melihat apakah sesungguhnya teroris dapat kita lihat melalui argumentasi yang dikemukakan Novri Susan, 2012: 123. Dikatakan terorisme sebagai kejahatan luar biasa adalah salah satu ancaman nyata terhadap kehidupan dunia global. Dinamika ekonomi politik bisa mengalami guncangan yang tidak kecil dan mampu menciptakan rasa ketidakamanan pada masyarakat luas. Upaya-upaya menangani masalah terorisme sudah melibatkan berbagai kalangan ditingkat nasional dan internasional.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa tindakan terorisme harus menjadi tugas kita bersama dalam menghadapinya baik itu negara maupun oleh warga negara. Karena sudah tentu tindakan gerakan terorisme sangat merugikan masyarakat internasional. Dengan demikian ancaman terhadap gerakan terorisme di suatu negara merupakan ancaman global. Mengapa demikian karena sering menjadi sasaran korban bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi turis mancanegara dari berbagai negara. Untuk mengantisipasi terjadinya gerakan terorisme, negara kita harus mewaspadaikan jangan sampai paham tersebut dapat tumbuh dan berkembang di negara kita. Salah

satu caranya dengan menyosialisasikan kepada warga masyarakat kita akan adanya paham radikalisme berupa bentuk kegiatan teroris seperti melakukan intimidasi dan melakukan bom bunuh diri di tempat fasilitas umum.

Salah satu strateginya adalah upaya yang komprehensif negara harus ditopang oleh kerjasama seluruh komponen bangsa dengan memperhatikan konteks lingkungan global yang menyebabkan kemunculan aksi terorisme yang saat ini menodai agama (Islam). Memahami konteks lingkungan global akan membantu menciptakan strategi kebijakan komprehensif untuk penanganan masalah terorisme oleh negara dan masyarakat.

C. Gelombang Radikalisme

Radikalisme sebagai paham yang ingin merubah sistem secara drastis melalui kekerasan, dalam diskursus umum masyarakat saat ini, sering hanya disematkan pada kelompok-kelompok identitas keagamaan tertentu. Kondisi ini tidak lepas dari wacana dominan yang dikampanyekan negara-negara barat tentang perang melawan terorisme terutama terhadap Usamah bin Laden dan Al Qaeda. Namun, radikalisme sebagai pemahaman tindakan politik sering berlangsung pada beberapa gerakan sosial non keagamaan, seperti kelompok-kolompok sosialis leninis FARRC di Kolombia atau partai komunis di Filipina. Kelompok-kolompok sosialis Leninis tersebut menggunakan perlawanan senjata dan terror untuk menciptakan efek destabilitas politik. Lebih jauh lagi “radikalisme bukan saja merupakan paham dari aliran kolompok-kolompok minoritas semata, melainkan juga dipraktikan oleh kelompok mayoritas. Sosiologi Anthony Giddens (2009) kelompok-kolompok mayoritas ini merupakan

pengemudi dari transformasi global yang membawa kepentingan-kepentingan industri kapitalisme (Susan, 2012: 124).

Berdasarkan kutipan di atas ternyata gerakan terorisme tidak hanya dilakukan melalui oleh negara-negara yang ada di Timur Tengah atau negara Asia seperti Indonesia, tetapi bisa saja pelakunya *actor state* dari negara yang memiliki haluan ideologi liberal. Selama ini tuduhan gerakan radikalisme selalu mengkambinghitamkan negara-negara yang berhaluan ideologi Agama Islam, tetapi kenyataannya pelaku gerakan radikalisme dapat saja dilakukan oleh negara dalam kolompok liberal bahkan di negara India penganutnya beragama Hindu yang sering membunuh warga negara yang beragama Islam, demikian juga di negara Nyanmar teroris dilakukan oleh kelompok fundamentalis Buddha dengan membunuh warga Rohinya yang penduduknya mayoritas muslim.

Tudingan bahwa agama Islam Teroris itu tidak benar, semua agama memiliki potensi menjadi teroris, apa pun agamanya. Contohnya dengan *actor state* Israel yang dilakukan oleh fundamentalis Yahudi dengan membunuh muslim Palestina, fundamentalis Buddha di negara Nyanmar dan dilakukan oleh actor state dengan membunuh muslim Rohinya, dan di negara India melalui *actor state* membunuh muslim di negaranya yang pelakunya fundamentalis Hindu dikendalikan negaranya.

Dengan demikian, tuduhan Islam teroris tidak benar, yang benar adalah gerakan fundamentalis Islam demikian juga agama lain selain agama Islam. Jadi faktor pendorong agama dijadikan sasaran pelaku teroris itu salah, yang ada paham fundamentalis yang ada pada semua agama. Sehingga yang menjadi pendorong pengikut agama menjadi kelompok teroris adalah aliran fundamentalisme di setiap pengikut agama. Dan semua agama tidak menerima dan menolak ketika umatnya

berubah menjadi golongan fundamentalis yang tidak mau menerima perkembangan zaman (modernisasi). Bagi golongan fundamentalis mereka menghendaki dunia Internasional tidak dipengaruhi tradisi modern yang merusak tatanan kehidupan keagamaan. Sehingga wujud mereka melawan modernisasi dengan tindakan terorisme tadi. Dan juga golongan fundamentalis anti kepada kehidupan toleransi antar agama, maunya hanya agamanya sendiri yang bisa hidup dan berkembang di negara asalnya. Inilah salah satu penyebab mengapa semua agama ada yang melakukan aksi teroris. Oleh karena itu, tidak adil bila masyarakat Internasional hanya mengkambinghitamkan agama Islam sebagai agama teroris. Inilah yang dianggap bentuk ketidakadilan Internasional. Mengapa negara Israel dengan fundamentalis Yahudi membunuh warga muslim Palestina dibiarkan oleh negara AS dan sekutunya. Bahkan organisasi PBB pun tidak bersikap tegas kepada negara Zionis Israel merampas wilayah dan membunuh warga muslim di negara Palestina. Tudingan Islam teroris itu sangat tidak tepat, bisa saja kita mengatakan bahwa fundamentalis Yahudi sebagai Teroris, fundamentalis Hindu di negara India, Fundamentalis Buddha di negara Yanmar sebagai teroris. Seharusnya tudingan teoris itu bisa semua agama yang mengikuti paham fundamentalisme tadi.

Hal ini terlihat pada kutipan yang sama bahwa gelombang radikalisasi liberalisme global dilakukan oleh kelompok negara-negara industrialis maju dengan melakukan tekanan masif terhadap banyak negara berkembang dunia. Tekanan masif yang muncul sebagai paket sistem ekonomi politik leberal termasuk di dalamnya adalah demokrasi, pasar bebas dan hak asasi manusia.

Pada saat bersamaan tekanan masif ini didorong oleh dominasi modal ekonomi dan kekuatan militer yang mengontrol negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan

Timur Tengah. Bagi kelompok-kelompok Islam berhaluan keras, tekanan masif dan dominasi AS di seluruh bidang telah merusak identitas sistem Islam (syariat Islam). Isu-isu kebangsaan dan kesetaraan sosial menjadi salah dimensi ideologis yang panas diperdebatkan dan ditolak oleh kelompok-kelompok Islam garis keras. Seperti peran kepemimpinan perempuan dalam politik, masalah homoseksual, dan gaya hidup keseharian (Susan, 2012: 124).

Berdasarkan argumentasi di atas paham radikalisme bisa saja dapat dibenarkan tindakan kelompok-kelompok negara berkembang akan penguasaan negara-negara maju akan sumber daya ekonomi di negaranya. Dengan masalah ini memunculkan pemikiran radikal dikelompok negara berkembang yang khususnya beragama Islam. Apalagi tradisi demokrasi Politik yang membenarkan kaum gender dalam kehidupan politik, kebebasan homo seksual dan gaya hidup kebarat-baratan yang memasuki tradisi negara berkembang yang memiliki tradisi Islam. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai *trigger* melahirkan gelombang pemikiran radikalisme disuatu negara. Yang menolak tradisi liberalisme.

Dengan demikian, tulisan di atas ada alasan mengapa muncul gelombang radikalisme di semua negara yang menggunakan syariat Islam sebagai landasan kebijakan negaranya. kondisi terkontaminasi penguasaan ekonomi liberalisme terhadap ekonomi disuatu negara berkeombang melahirkan aksi kurang simpatik dari warga negara akan pengaruh dari politik liberalisme terhadap negara-negara berkembang khususnya bagi negara yang beragama Islam.

Alasan pemikiran radikalisme selalu menyalahkan negara di belahan Timur Tengah dan sebagian negara yang ada di Asia Tenggara dll. Itu tidak selamanya benar. Wajar ketika negara yang menggunakan syariat agama dalam menentukan

kebijakan negara berpikir radikal untuk menolak tradisi negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi liberal dalam memengaruhi kebijakan ekonomi di negara berkembang. Apalagi transfer tradisi barat ke negara yang berhaluan pada ideologi agama, sudah tentu mereka akan radikal menolak bahkan melakukan aksi kekerasan terhadap penguasaan sumber daya ekonomi dari dominasi negara yang tergabung pada sistem ekonomi kapitalis dengan menggunakan sistem ekonomi liberal dalam menguasai negara berkembang yang memiliki ideologi Islam.

Tuduhan bahwa negara-negara di Timur tengah sangat radikal terhadap budaya sistem ekonomi kapitalis. Merupakan suatu yang wajar bila reaksi mereka terhadap negara seperti AS dan sekutunya bertindak radikal sampai dengan menggunakan kekuatan militer di dalam mengusir dominasi negara-negara AS dan sekutunya dalam menguasai sumber daya ekonomi negara Timur tengah. Contoh kasus ketika AS dan sekutunya menuduh negara Irak mengembangkan senjata kimia dan mereka berharap kepada PBB untuk memberikan resolusi dalam mengebuk negara Irak. Padahal negara Irak bukan negara radikal yang harus diperangi oleh PBB. Irak menggunakan senjata kimia karena merasa bahwa sumber daya ekonomi dikuasai oleh negara AS dan sekutunya. Justru yang dituduh sebagai negara teroris justru negara Irak yang dikuasai ekonominya oleh negara kapitalis dengan sistem liberal.

Semestinya tuduhan negara teroris itu bukan negara Irak, tetapi negara AS dan sekutunya yang ingin menguasai negara Irak akan sumber daya alamnya seperti minyak dan gas alam. Inilah yang melahirkan gelombang radikalisme global yang menjadi musuh negara-negara besar. Padahal tindakan negara Irak dianggap sebagai aktor state dalam melaksanakan gerakan teroris diminta untuk dimusuhi oleh negara-negara kapitalis

termasuk negara-negara yang tergabung dalam organisasi OKI (Organisasi Kerjasama Islam) di mana di situ bergabungnya kelompok negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah termasuk Indonesia untuk sama-sama mengutuk terhadap negara Irak yang dituduh mengembangkan senjata kimia. Padahal apa yang dilakukan oleh negara Irak dalam rangka mempertahankan kedaulatan negaranya. inilah embrio berkembangnya paham radikalisme global dengan adanya ketidakadilan internasional kepada kelompok negara Islam.

Isu ketidakadilan dalam tatakelola global (*global governance*) juga menjadi masalah yang sangat panas dan menjadi salah satu sebab fundamentalis lahirnya kelompok-kelompok radikal dan teroris global. Seperti penindasan Israel pada bangsa Palestina yang menyebabkan ratusan ribu korban jiwa termasuk perempuan dan anak-anak. Belum lagi ketertindasan politik dan identitas yang tidak mendapatkan pembelaan dari negara-negara Barat dan AS. Sebaliknya, AS terus membantu Israel secara politik dan persenjataan untuk menekan dan menindas bangsa Palestina. Kenyataan ini mendorong kelompok Islam garis keras ingin melakukan perlawanan melalui jalur perang (kekerasan) yang dijustifikasi oleh interpretasi teks suci Alquran. Namun, fakta tentang lemahnya dukungan dari pemeluk agama Islam untuk melakukan perlawanan pada AS-Israel melalui jalur kekerasan dan ketidakseimbangan kekuatan militer, menyebabkan kelompok Islam garis keras memilih cara kerja terorisme. Kelompok-kelompok Islam berhaluan moderat sebenarnya pun mengambil posisi kritis terhadap gelombang radikalisme global yang dikemukakan oleh negara-negara maju Barat. Namun respons kalangan ini hadir dalam wajah yang lebih diplomatis dan anti kekerasan (Susan, 2012: 125).

Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan gelombang radikalisme disebabkan oleh ketidakadilan negara Barat dan AS serta organisasi PBB dalam menentukan eksekusi kepada negara-negara Islam seperti kejahatan perang yang ada di Palestina. Semestinya PBB menghentikan aksi terorisme yang dilakukan oleh negara Israel terhadap negara Palestina. Bukan melakukan pembiaran terhadap tindakan teroris yang dilakukan negara Israel terhadap warga negara Palestina. Dengan demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok garis keras Islam di negara Timur tengah sebagai sebuah bentuk perlawanan akan aksi negara AS dan Israel terhadap warga negara Palestina. Ini menimbulkan gerakan gelombang radikalisme global. Dengan fakta-fakta ini terjadilah aksi-aksi yang dilakukan oleh generasi muda yang bersimpatik kepada negara Timur tengah yang dizalimi oleh negara AS dan Israel. Dengan bentuk bom bunuh diri dilokasi di mana ada kepentingan negara AS dan sekutunya dengan jalan tindakan gerakan teroris tadi.

Namun, apa pun alasannya kita tidak berharap kepada generasi muda kita menggunakan tindakan aksi terorisme dalam mendukung saudara-saudara kita yang ada di negara Palestina dan Timur tengah atau di belahan dunia lain. Kita berharap kepada PBB untuk bersikap adil kepada tindakan radikal yang dilakukan oleh negara AS dan Negara Israel. Dengan tindakan tegas dari PBB terhadap kejahatan global negara AS dan Israel akan menekan gelombang radikalisme negatif di semua negara yang ada warga negaranya yang beragama Islam. Walaupun agama Islam tidak menghendaki adanya gerakan terorisme karena agama Islam agama damai. Tetapi kita tidak dapat mengontrol emosi dari warga negara tersebut melampiaskan amarahnya dengan ikut serta dalam melaksanakan bom bunuh diri sebagai bentuk perlawanan

kepada kelompok negara yang menindas kedaulatan negara Islam tadi.

Apa yang tertulis di atas bukan membenarkan tindakan teroris, melainkan berharap organisasi PBB bersikap adil pada penindasan bangsa Palestina yang dizalimi oleh negara Israel dan AS. Akan tetapi, juga mengutuk akan adanya gerakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok garis keras Islam yang menggunakan strategi teroris dalam melawan kezaliman bangsa Israel dan AS terhadap negara-negara Islam. Diingatkan apa yang terjadi di atas bukan merupakan representasi Perang Salib atau perang agama, melainkan ketidakadilan negara Israel dan AS adalah misi perebutan sumber daya ekonomi dari negara Timur Tengah inilah yang menjadi sumber konflik. Kalaupun ada isu agama itu hanya dilakukan oleh golongan fundamentalis yang bukan representasi dari agama. Karena semua agama menolak paham fundamentalisme masuk sebagai aktivitas dalam agama. Aliran fundamentalis agama menolak toleransi beragama, menolak modernisasi, paham fundamentalis agama sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh warga negara khususnya strateginya dalam memerangi perbedaan paham yang dilakukan dengan cara kekerasan tadi, sementara seluruh agama dalam menyelesaikan perbedaan dilakukan dengan cara-cara damai tanpa kekerasan fisik.

Dengan kesadaran menilai fakta-fakta di atas menunjukan bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah hanya merupakan pertempuran di dalam merebut sumber daya ekonomi, bukan agama. Islam tidak mengharapakan peperangan, Islam agama damai. Ketika kelompok teroris mengimbau untuk berjihad dalam melawan kelompok negara Israel dan AS. Sebaiknya kita menempuh dengan jalan damai melalui konsep *international relation*. Karena apa yang terjadi sesungguhnya hanya gerakan politik dan perebutan lahan ekonomi di negara Timur Tengah.

Sehingga generasi muda kita tidak terpancing akan isu global tentang imbauan berjihad dalam membela negara Palestina dan negara-negara Timur Tengah. Jihad jangan dimaknai sempit, tetapi jihad dapat dilakukan melalui hubungan bilateral dan multilateral dalam menyelesaikan konflik di negara-negara Timur Tengah.

Harapannya dalam kajian bab ini, bila masyarakat Internasional menghendaki dunia Internasional bersih dari paham radikalisme negatif. Seharusnya negara Israel dan sekutu AS menghentikan penguasaan kedaulatan wilayah dan kedaulatan ekonomi suatu negara yang berdaulat seperti negara Palestina dan negara-negara di Timur Tengah. Walaupun saat ini negara Palestina belum diakui oleh PBB sebagai negara yang berdaulat, tetapi mendorong supaya negara Palestina diakui oleh PBB sebagai negara yang berdaulat. Sehingga negara Israel dan AS tidak melanggar prinsip-prinsip dan azas yang di dalam *Declaration of Human Rights* (hak asasi manusia sedunia PBB), yang melarang negara lain menyerang dan menduduki negara yang berdaulat.

Bila organisasi PBB mengakui kedaulatan negara Palestina sebagai sebuah negara, Israel, dan AS tidak akan semena-mena terhadap kedaulatan negara Palestina. Masyarakat dunia Internasional berharap bila negara Palestina telah diakui sebagai sebuah negara berdaulat, maka kejahatan AS dan Israel di negara Palestina akan dapat diadili di Mahkamah Internasional. Sehingga gelombang radikalisme global dalam bentuk terorisme global dapat ditekan. Dengan solusi ini masyarakat Internasional tidak terlalu takut di tempat-tempat fasilitas umum seperti berada di bandar Udara, di Pesawat atau berkunjung sebagai wisatawan di Bali atau di mana pun. Sepanjang keadilan internasional tidak ditegakan oleh organisasi PBB, selama itu pula masyarakat Internasional dihantui oleh ketakutan akan adanya gerakan teroris di setiap

negara. Dengan demikian, menghentungkan sel terorisme sebagai bagian dari pemikiran radikalisme kepada warga negara Indonesia atau warga negara yang beragama Islam dengan jalan AS dan Israel serta sekutunya tidak lagi melakukan gerakan teroris yang dilakukan oleh negaranya. Bila ini terjadi dan berulang lagi paham radikalisme global akan selalu menjadi hantu di siang bolong bagi negara-negara Barat dan AS akan terjadi.

Harapannya kepada generasi muda di Indonesia dan lebih khusus di daerah Provinsi Gorontalo untuk tidak berpartisipasi dalam melakukan gerakan teroris, sekalipun secara logika berpikir kita bahwa ini karena ketidakadilan Internasional terhadap pelaku teroris yang dilakukan oleh *actor state* AS dan Israel dan dibiarkan oleh organisasi PBB karena anggota tetap PBB adalah AS, Inggris, Prancis, Cina, Rusia. Selalu di Veto negara AS, Inggris, dan Prancis ketika PBB akan menjatuhkan resolusi kepada negara Israel sehingga PBB tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada negara Israel sebagai pelaku teroris. Sekalipun alasan secara logika benar mengapa muncul radikalisme global sebagaimana alasan di atas, sikap generasi muda kita tetap konsisten menolak imbauan untuk berjihad dengan cara aksi-aksi bom bunuh diri melawan kesewenang-wenangan Israel dan AS di negara Palestina. Hal ini karena solusi damai masih terbuka peluang kita endus lewat organisasi PBB dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Mestinya bila PBB memperbaiki tata kelola organisasinya, harus menghilangkan hak Veto agar dunia Internasional akan merasakan keadilan Internasional. Sepanjang hak Veto atau hak istimewa masih tetap ada untuk tiga negara sebagai anggota tetap PBB, sepanjang itu pula akan terjadi gelombang radikalisme global di negara-negara yang bersimpatik dengan negara Palestina dan negara di Timur tengah(Palestina, Iran, Irak, Surya, Arab Saudi, dan sebagainya).

Demikian alternatif solusi dalam meminimalisasi gerakan radikalisme global yang akan menjadi hantu di siang bolong bagi negara-negara Barat dan negara AS serta sekutunya. Dengan tetap berharap kepada generasi kita untuk tidak terlibat dalam gerakan teroris. Karena gerakan teroris merupakan cara kekerasan dalam memperjuangkan hak-hak dari negara yang ditindas. Gunakan cara moderat dalam menyelesaikan permasalahan konflik antara kepentingan negara Barat dengan negara di Timur Tengah.

Apalagi aturan KUHP dan undang-undang terorisme telah diberlakukan di negara kita. Artinya, siapa saja yang terlibat pada kelompok terorisme akan berhadapan dengan negara dan akan menjadi musuh bersama warga negara Indonesia. Sekali lagi saya katakan apa yang terjadi selama ini, bukan lagi representasi Perang Salib. Akan tetapi, yang terjadi adalah perang dalam memperebutkan sumber daya ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, imbauan dalam berjihad sesungguhnya tidak tepat di era abad ke XXI.

Harapan kita, konflik diselesaikan secara damai tanpa harus mengorbankan banyak jiwa manusia hanya karena kepentingan perebutan kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi. Saat ini tidak perlu kita mengembangkan lagi Perang Salib atau perang agama. Yang ada hanya perang dalam merebut kekuasaan politik dan berjuang dalam menguasai sumber daya ekonomi negara-negara yang ada di Timur tengah yang kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi.

Bila ada pengalihan penggunaan sumber daya minyak diganti dengan sumber energi lain misalnya mobil dan motor hanya bisa digerakan oleh cahaya matahari. Maka temuan ini akan mengurangi konflik antar negara dalam menguasai daratan negara Timur Tengah karena hampir semua negara mendapatkan sinar matahari. Penemuan alternatif energi selain minyak bumi sebagai penggerak mesin industri dan

transportasi akan mengurangi gesekan antar negara dalam memperebutkan sumber daya minyak. Sehingga jelas bahwa konflik antar negara di Timur Tengah dengan negara-negara Barat dan AS. Hanya konflik SDA, bukan konflik agama. Untuk itu, generasi muda kita jangan terpengaruh dengan agama dijadikan sebagai isu di dalam kegiatan perebutan kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi. Dengan demikian, tegas bahwa propaganda bahwa berjihad ke negara Timur Tengah adalah wajib itu tidak benar. Fakta sesungguhnya konflik antara negara saat ini hanya konflik sumber daya alam, bukan Perang Salib.

Dengan kesadaran politik Internasional dan kembali kepada pemahaman agama Islam yang benar dapat mengurangi aksi-aksi gerakan terorisme di Indonesia, yang menjadi masalah kita bersama antara pemerintah dan masyarakat yang ada di pusat dan di daerah. Pemahaman akan teori konspirasi internasional kepada generasi muda akan mendinginkan emosi yang selalu ditiupkan dari kelompok teroris agar generasi muda kita berpartisipasi dalam memperjuangkan kepentingan politik dan ekonomi kelompok teroris. Sama sekali agama hanya dijadikan sebagai tameng di dalam memperjuangkan ambisi politik dan ekonomi bagi kelompok terorisme global sebagai bagian dari gerakan radikalisme global yang dikemukakan pentolan ISIS dan kelompok Alqaeda di negara-negara Timur Tengah, yang sengaja mengambil simpatik generasi muda yang ada di Indonesia.

Bab VI

Analisis Potensi Radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Realitas Survei pada Kalangan Generasi Muda tentang Fenomena Potensi Radikalisme

Fenomena radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo baru sebatas pemikiran (*mindset*) belum berada pada kelompok radikal yang melakukan usaha partisipasi apa yang dia anggap benar melalui pengetahuan dan pemahamannya. Namun, dalam upaya pencegahan gerakan radikalisme di daerah ini harus dilakukan sedini mungkin artinya upaya preventif gerakan radikalisme tidak hanya dilakukan pada saat generasi muda kita melakukan aksi gerakan teroris atau melakukan aktivitas kegiatan komunis (PKI), tetapi upaya penganganannya dimulai dari embrio radikalisme sejak persepsi generasi muda kita melakukan membenaran kepada aksi kegiatan radikalisme. Upaya ini dimaksudkan untuk mencegah aksi kegiatan radikal sejak generasi muda kita mulai kenal dan membenarkan aksi gerakan radikal selama ini yang banyak merugikan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pengaruh ideologi dalam kehidupan masyarakat sangat berperan penting dalam merubah perilaku seseorang. Karena ideologi akan berkembang sepanjang ada masyarakat yang menerima dan membenarkan ideologi tersebut. Untuk mengkaji mengapa seseorang bila telah menerima dan meyakini ideologi tertentu akan memengaruhi perilaku seseorang mengikuti ajaran ideologi tersebut. Dapat kita lihat

melalui penyebab seseorang melakukan aksi yang orang lain menganggap bahwa itu adalah kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial.

Bentuk ideologi radikalisme yang dinyatakan bertentangan dengan ideologi Pancasila di antaranya adalah ideologi sosialisme komunis, ideologi fundamentalisme inilah yang dilarang berkembang di negara Republik Indonesia. Untuk mengetahui mengapa ideologi ini dinyatakan dilarang dapat kita lihat melalui perkembangan ideologi tersebut.

A. Ideologi Sosialisme Komunis

Berbagai macam konsep dan paham sosialisme sebenarnya hanya paham komunismelah sebagai paham yang paling jelas dan lengkap karena hanya Marxlah yang memberikan suatu pemikiran yang lengkap dan tajam. Terdapat beberapa tokoh pemikir sosialis seperti Saint Simon dan Lassale, namun menurut Marx pandangan tokoh-tokoh tersebut terlalu utopis, karena tidak menjelaskan cara bagaimana untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Atas dasar alasan inilah maka karya Marx sering diistilahkan dengan sosialisme yang ilmiah dan realistik. Paham ini adalah sebagai bentuk reaksi dasar perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil dari ideologi liberal.

Berkembangnya paham individualisme liberalisme yang berakibat munculnya masyarakat kapitalis menurut paham ini mengakibatkan penderitaan rakyat, sehingga komunisme muncul sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung pemerintah negara. Reaksi itu tidak hanya menunjukkan kelemahan-kelemahan dari kapitalisme, akan tetapi Marx juga mengungkapkan pandangan-pandangannya sendiri. Komunisme Marx juga

menolak idealisme, karena idealisme dianggap lepas dari kenyataan-kenyataan, Marx ingin mengungkapkan pemikirannya dengan menganalisis kenyataan. Dalam kritiknya terhadap kapitalisme, Marx menyatakan bahwa kapitalisme memiliki bentuk yang sedemikian rupa dan yang menjadi dasar adalah ditentukannya unsur hak kepemilikan pribadi. Kapitalisme menjadi sistem yang mempunyai pengaruh dan akibat luas yang signifikan dalam kehidupan masyarakat karena hak milik pribadi. Bahkan Marx berpendapat bahwa hak dan milik pribadi inilah yang menjadi sebab masyarakat terbelah menjadi dua kelas yaitu mereka yang memiliki hak milik pribadi, dan mereka yang tidak memiliki hak milik pribadi. Kelompok masyarakat yang menguasai hak milik pribadi inilah yang memiliki dan menguasai modal dan memiliki alat produksi.

Bila dilihat dari kajian teori di atas tentang ekonomi komunis memang dapat memengaruhi sikap generasi muda bila tidak dikaji lewat pendampingan lembaga pendidikan formal mekanisme ekonomi komunis yang dianggap oleh sebagian kalangan generasi muda kita dapat diterapkan di Indonesia. Pemahaman inilah yang membuat kalangan generasi muda kita ada yang membenarkan ideologi radikalisme termasuk komunis di Indonesia dapat diadopsi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Akan tetapi, untuk menyikapi hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman tersebut keliru bila kita mengkaji berdasarkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan kesejahteraan bersama dengan prinsip pengelolaan yang didasarkan kepada keadilan sosial. Jadi, sistem ekonomi Pancasila tidak mengenal dikotomi kaum proletar yang menguasai kaum kapitalis, tetapi penguasaan produksi harus diintervensi negara demi mencapai keadilan bersama antara golongan buruh dan golongan feodal atau pengusaha. Di Indonesia, hak-hak buruh diatur lewat perundang-undangan

supaya pemilik modal tidak merugikan kepentingan buruhnya. Misalnya sipemilik modal dapat menaikkan gaji sesuai dengan UMR sesuai dengan peningkatan produksi yang dihasilkan oleh tenaga buruh.

Demikian halnya dengan gerakan teroris dan gerakan ISIS di Indonesia bila dilihat dari hasil survei yang ditemukan masih banyak generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo yang bersimpatik dengan gerakan radikalisme tersebut. Untuk mengetahui mengapa generasi muda kita ada yang bersimpatik dengan gerakan radikalisme seperti gerakan teroris dan gerakan ISIS dapat kita lihat apa yang melatarbelakangi munculnya gerakan radikalisme tersebut.

Ditengarai gerakan radikalisme tersebut ada di Indonesia karena ada ideologi fundamentalisme. Ideologi fundamentalisme ini tidak hanya ada di kalangan pengikut agama Islam. Namun, semua agama bila memiliki ideologi fundamentalisme agama di setiap pengikut agama akan berubah menjadi tindakan radikal. Untuk menjelaskan apa sesungguhnya ideologi fundamentalisme tersebut dapat kita kaji melalui refrensi yang dikutip dalam kajian Prof. Dr. Kaelan, M.S., dalam bukunya liberalisasi Ideologi Negara Pancasila di bawah ini.

B. Ideologi Fundamentalisme-Radikalisme

Fundamentalisme tumbuh sekitar abad ke-19 dan semakin berkembang sampai dewasa ini sehingga banyak mendapat perhatian para peneliti agama. Dalam tradisi Barat fundamentalisme ditandai dengan keberhasilan industrialisasi yang membawa hal-hal yang positif dan negatif pada saat yang sama. Hal yang negatif adalah munculnya kekosongan jiwa, kemurungan hati kehampaan dan ketidakstabilan perasaan. Fromm (1997) menyebut sebagai penyebab lahirnya penyakit

masokisme dan sadisme. Suatu perasaan yang bahagia dengan menyakiti diri sendiri dan bahagia di tengah penderitaan orang lain.

Berdasarkan pemikiran paham fundemntalisme tersebut maka lahirlah ilmu akhirat (*eskatologi*) yang *apokaliptis* dan *premilennialisme*, yang intinya adalah kestabilan hidup dunia bagi di sosrga sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan dahulu. Dunia bagi mereka adalah tempat kita harus menghadirkan kerajaan surga. Mereka inilah yang mengawali ketidakpuasan pada modernisme dan mencoba melarikan diri guna mencari keselamatan dan perlindungan dari Tuhan dan agama. Dunia kapitalisme industri yang modern dianggap merusak agama, oleh karena itu harus dilawan dan dikembalikan pada fitrahnya, yaitu Tuhan. Mereka mengutuk industrialisasi, dan menengok dogma agama dan menafsirkannya dengan opsi biner, hitam-putih, salah-benar. Mereka yang termasuk hitam adalah mereka yang salah dan disebutnya sebagai setan jahat, sementara yang putih adalah mereka yang benar dan termasuk anak Tuhan. Efistimologi anak Tuhan "*child God*" inilah yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran fundamentalisme di Eropa Barat (Haryono, 2005 :17).

Berdasarkan uraian teori di atas bahwa gerakan radikalisme bukan hanya ada pada pengikut agama Islam yang melakukan gerakan teroris, namun ada juga di kalangan umat kristen yang fundamentalisme dengan mengusung ideologi tersebut. Dan akhirnya bila ada pengikut agama kristen fundamentalisme akan melakukan perubahan dengan cara kekerasan.

Demikian juga dengan sebagian pengikut agama Islam di Indonesia yang melakukan gerakan radikal. Penyebabnya karena ada ideologi fundamentalisme yang masuk dalam alam fikrannya sehingga mengkafirkan orang lain bila tidak sesuai dengan agama Islam fundamentalisme tadi. Dalam agama

Islam perbedaan keyakinan itulah rahmat untuk dijadikan sebagai landasan perdamaian bukan sebaliknya perbedaan keyakinan harus disamakan keyakinannya sesuai dengan ajaran agama Islam Fundamentalisme dengan cara-cara radikal. Ideologi inilah yang merasuki sebagian generasi muda kita dalam hasil survei bersikap simpatik pada gerakan radikalisme global.

Dengan demikian, fenomena radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo harus menjadi perhatian kita semua untuk menyelamatkan generasi muda kita dari paham-paham radikalisme yang akan mengancam stabilitas wilayah dan stabilitas nasional dengan cara memasukkan materi radikalisme dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang pendidikan formal. Hal ini dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada generasi muda kita agar tidak terlibat dalam gerakan radikalisme yang menjadi musuh bangsa dan negara Republik Indonesia.

Fenomena radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo dapat dikaji berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan jawabannya berdasarkan indikator penelitian menunjukkan sebagai berikut.

1. Pengetahuan

Bila dilihat dari hasil survei pada responden penelitian di kalangan generasi muda menunjukkan masih banyak generasi muda di daerah Gorontalo tidak mengetahui ideologi radikalisme khususnya tentang gerakan ISIS, Teroris dan ideologi Komunis. Sehingga kurangnya pengetahuan generasi muda di daerah Gorontalo sikap responden memilih sikap ragu-ragu dan tidak setuju bila gerakan radikalisme dinyatakan sebagai sebuah gerakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila bahkan sikap

responden membenarkan apa yang menjadi tujuan kegiatan radikalisme tersebut.

Sikap ini harus disikapi pemerintah daerah dengan cara memberikan sosialisasi kepada generasi muda mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai ditingkat desa dan kelurahan. Hal ini dilakukan untuk upaya pencegahan akan pembenaran generasi muda kita kepada bentuk gerakan radikalisme yang mereka peroleh informasi melalui media sosial maupun dari kelompok orang yang mengajak mereka bergabung dengan kelompok radikal.

2. Pemahaman

Pemahaman generasi muda akan paham radikalisme sangat minim sehingga hasil survei menunjukkan masih ada generasi muda kita khususnya generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo yang tidak dapat membedakan apakah gerakan radikalisme tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau justru sikap generasi sudah bersimpatik pada gerakan radikalisme tersebut adalah sesuai dengan keyakinan fundamentalis yang mereka anut.

3. Ketaatan

Berdasarkan hasil survei tentang fenomena radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo dengan pertanyaan penelitian yang melihat sikap mereka apakah mau meninggalkan sikap simpatik mereka kepada kegiatan radikalisme atau melanjutkan dukungan mereka kepada ideologi radikal. Ternyata, tingkat ketaatan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo masih ada dari beberapa responden yang tidak mau meninggalkan pemikirannya terhadap ideologi radikalisme yang diperoleh informasi dari media sosial atau dari kelompok orang yang telah tergabung dalam kelompok radikal tersebut.

Berdasarkan hasil survei di atas tentang fenomena radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo menunjukkan adanya kerawanan sosial tentang adanya bahaya laten gerakan radikalisme di kalangan generasi muda di daerah provinsi gorontalo. Data ini sesuai dengan sinyalemen BIN bahwa daerah Gorontalo termasuk lima daerah rawan akan pengaruh gerakan radikalisme setelah daerah Provinsi Aceh.

Tindakan preventif dalam mengatasi gerakan radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo dengan strategi sosialisasi melalui pendidikan formal dan gerakan pemerintah daerah melakukan sosialisasi sampai ketingkat desa dan kelurahan penolakan gerakan radikalisme dengan motto tolak gerakan radikalisme.

Potensi paham radikalisme di kalangan generasi muda khususnya di kalangan mahasiswa perlu diwaspadai oleh Perguruan Tinggi yang ada di daerah Provinsi Gorontalo. Bila mahasiswa yang mewakili kalangan akademisi bila telah terpapar aliran radikal sangat mengancam stabilitas di daerah Provinsi Gorontalo. Mengapa bila mahasiswa yang ada di daerah Gorontalo telah terkontaminasi upaya penyebarannya akan lebih cepat bila kena kepada generasi muda bukan kalangan mahasiswa. Karena mahasiswa mampu memberikan pengaruh melalui pertemuan dan kajian-kajian melalui organisasi keagamaan yang beraliran garis keras dengan membenarkan tindakan teroris sebagai bagian dari paham radikalisme negatif. Sehingga strateginya perguruan Tinggi pun harus aktif mengawasi organisasi kemahasiswaan yang mengatas namakan organisasi Agama. Misalnya, mahasiswa bergabung dengan organisasi HTI (Hibnu Tahir Indonesia) dan organisasi yang rawan akan penyebaran aliran radikalisme negatif.

Dengan kekhawatiran tersebut pemerintah membubarkan gerakan organisasi yang akan menyuburkan paham radikalisme negatif. Organisasi HTI (Hibnu Tahir Indonesia) dan FPI (Forum Pembela Islam) dibubarkan oleh pemerintah pusat karena ada indikasi organisasi tersebut menyebarkan paham radikalisme negatif. Upaya pemerintah tersebut tidak cukup hanya dengan membubarkan dan melarang organisasi tersebut, tetapi pemerintah harus mewaspadaikan juga pengaruh media sosial dalam menghalau masuknya kejahatan radikalisme sebagai kejahatan trans nasional. Bila dilihat dari pengaruh gerakan radikalisme negatif ini banyak generasi muda kita tahu bahwa ajaran jihad dengan ikut serta melakukan tindakan bom bunuh diri itu dibenarkan berdasarkan kajian organisasi tersebut yang dianggap organisasi sebagai sarang teroris.

Di Indonesia, pondok pesantren yang dicurigai pemerintah sebagai pondok pesantren yang rawan adalah pondok pesantren yang dibina oleh Ustad Abubakar Baasyir tokoh kelompok Islam garis keras yang tekah dijatuhi hukuman penjara 15 tahun oleh pengadilan Jakarta Selatan karena perannya dalam mendirikan kamp pelatihan ala militer di Aceh yang saat ini pemimpin pesantrennya tersebut masih mendekam dipenjara. Pesantren Al Mukmin Nguruki di Sukohardjo Jawa Tengah ini dianggap rawan dalam menyebarkan paham radikalisme negatif di Indonesia. Hal ini ditunjukkan ada beberapa muridnya yang terlibat dengan aksi bom bunuh diri seperti Farham Mujahidin, Muchsin Tsani, Firmansyah, dan kawan-kawan.

Dengan gejala generasi muda kita membenarkan dan menyetujui aksi-aksi gerakan teroris memberikan *warning* bagi kalangan perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk lebih intensif dalam menyosialisasikan bahwa gerakan radikalisme negatif sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila sebagai

dasar negara. Karena gerakan teroris ditolak keras oleh dasar negara kita, sehingga tidak ada tempat bagi paham radikalisme negatif untuk tumbuh dan berkembang di negara kita.

Bila dilihat dalam kutipan *Republika.co.id*, upaya kontra radikalisme telah membuahkan hasil menurunnya potensi radikalisme, jangan sampai membuat seluruh elemen yang terlibat dalam kerja-kerja kontra radikalisme menjadi berpuas diri dan terlena. Justru harus terus lebih keras lagi melakukan desminasi untuk melawan propaganda kelompok radikal intoleran dan radikal terorisme, kata kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam siaranpersnya, ahad (20/12). Boy Rafli menambahkan masalah proses radikalisme di Indonesia secara global memang cenderung menurun. Seuai global index terorism, Indonesia menempatkan urutan ke 37, di Asean, posisi itu lebih rendah dibandingkan Filipina dan Thailand. Namun demikian kewaspadaan harus terus dilakukan. Ia melihat bahwa penetrasi dari jaringan teroris internasional dalam proses radikalisasi itu dengan keberadaan dunia maya atau digital tidak bisa dihindarkan. Pasalnya kelompok teroris itu melihat pangsa pasarnya seperti generasi milineal, generasi Z, penggunaannya sangat tinggi di dunia maya (*Republika.co.id*). Mereka tahu karena yang disasar ini anak muda, jadi bukan lagi yang tua-tua. Bagi mereka yang tua itu masa lalu, tapi masa depan mereka adalah generasi muda (Boy Rafli).

Berdasarkan kutipan berita di atas, bahwa kontra radikalisme tidak boleh terlena dengan suasana damai saat ini, bahaya radikalisme sangat sulit untuk dideteksi akan ancamannya. Karena gerakan ini dapat mengancam kapan saja bila pemerintah abai dan terlena dalam mengantisipasi segala kemungkinan datangnya ancaman terorisme. Dengan ulasan yang disampaikan oleh kepala BNPT bapak Komjen Pol Boy Rapli perlu diwaspadai kelompok generasi muda melalui

pengaruh dunia maya atau lewat pengaruh digital *Yuotobe* dsb dalam penyebaran paham radikalisme.

Ancaman radikalisme negatif berupa bentuk kegiatan aksi terorisme dengan cara melakukan bom bunuh diri, perampokan dan bentuk kekerasan lainnya menjadi perhatian kita bersama antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah daerah dalam mengantisipasi berkembangnya paham radikalisme di daerah Provinsi Gorontalo. banyak hal yang dapat kita lakukan bersama dengan pemerintah Daerah. Misalnya, melakukan perubahan kurikulum di Perguruan Tinggi dengan memasukan mata kuliah radikalisme dalam MKDU Perguruan Tinggi sama halnya dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan kewarganegaraan. Mengapa demikian supaya semua fakultas, jurusan dan Prodi memasukan mata kuliah Radikalisme dalam upaya mencegah masuknya paham radikalisme.

Memang selama ini di lingkungan perguruan Tinggi yang selalu mengkaji pembahasan radikalisme hanya ada pada fakultas dan jurusan yang mengelola jurusan ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi. Di jurusan lain tidak ada pembahasan menyangkut kajian radikalisme. Inilah bentuk kecelongan perguruan Tinggi bila ada mahasiswanya yang terpapar radikalisme. Mahasiswa kita mengkaji radikalisme hanya diorganisasi keagamaan yang lebih membenarkan tindakan gerakan terorisme sebagai sebuah bentuk perang ketidakadilan yang dimaknai Jihad. Padahal bila radikalisme itu masuk dalam kurikulum perguruan Tinggi dimasukan dalam kelompok MKDU (mata kuliah dasar Umum) mahasiswa akan mendapatkan sentuhan pengetahuan ajaran ideologi Radikalisme sesuai ilmu Filsafat ideologi yang benar dan bukan membenarkan gerakan radikalisme negatif sebagaimana yang mereka dapatkan dari organisasi keagamaan yang dianggap rawan sebagaimana organisasi sayap ISIS dan

Teroris. Melalui kajian akademik di semua jurusan dan program studi mahasiswa kita akan terhindar dari terpaparnya paham radikalisme negatif yang menjadi musuh bersama negara internasional dan komunitas Internasional.

Peran dunia perguruan Tinggi sangat dibutuhkan dalam mengimbangi globalisasi melalui penyebaran paham radikalisme melalui media digital sebagaimana yang disampaikan oleh bapak kepala BNPT di atas. Bila pemerintah daerah pun melakukan hal yang sama dengan menyosialisasikan setiap minggu atau setiap bulan mulai dari tingkat kecamatan sampai desa dan kelurahan tentang bahaya akan paham radikalisme negatif. Saya yakin dapat meminimalisasi tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme di Indonesia dan lebih khusus di daerah Provinsi Gorontalo.

Demikian beberapa alternatif solusi dalam mengantisipasi terpaparnya generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo dari paham radikalisme. Alternatif yang ditawarkan hanya sebagian dari strategi yang dapat menjadi model dalam penanganan kontra radikalisme. Bila pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Perguruan Tinggi di daerah Gorontalo serius dalam membebaskan pengaruh ancaman ideologi radikalisme negatif terhadap generasi muda. Maka sebaiknya kita bekerja bersama antara warga masyarakat, pemerintah daerah dan perguruan Tinggi dalam melakukan upaya preventif menyebarnya paham radikalisme di kalangan generasi muda kita.

Strategi di atas tidak akan berhasil bila kedua institusi tidak bekerja bersama dalam menghadapi ancaman paham radikalisme di kalangan generasi muda. Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo mendorong kepala-kepala daerah Kabupaten dan Kota melakukan sosialisasi sampai ditingkat desa dan kelurahan. Bentuk kegiatannya bisa saja FDG tentang tema bahaya laten paham ideologi Radikalisme negatif. Demikian juga untuk Perguruan tinggi sering ada kegiatan

bedah buku dan FDG atau kegiatan seminar nasional yang ditayangkan lewat virtual atau upline. Dengan bentuk-bentuk kegiatan seperti ini akan menambah wawasan generasi muda terhadap pengetahuannya akan bahaya laten paham radikalisme negatif.

Dalam membahas lebih dalam alternatif solusi lebih dalam lagi, kami mencoba menawarkan solusi dalam menghadapi ancaman radikalisme di kalangan generasi muda pada bagian bab di bawah ini. Memang solusi yang ditawarkan belum menyentuh secara keseluruhan dalam menghadapi ancaman radikalisme, tetapi minimal peran serta kami dalam menawarkan masalah bersama negara kita dalam membebaskan generasi muda kita terpapar paham radikalisme negatif sedikit dapat berkontribusi positif dalam kajian pada bab berikutnya.





Bab VII

Rekomendasi dalam Mewaspadaai Masuknya Ideologi Radikalisme di Kalangan Generasi Muda di Provinsi Gorontalo

Radikalisme masih hangat menjadi isu sentral di belahan dunia Internasional melalui bentuk kegiatan dilakukan melalui gerakan terorisme global. Radikalisme tidak hanya berada di satu negara, tetapi sel radikalisme berkembang menjadi isu global. Karena sel radikalisme tersebut berasal dari negara Timur tengah dan melintasi batas negara-negara yang ada di belahan dunia. Sampai selnya memasuki daratan benua Eropa dan Benua Amerika. Sehingga jangan heran selalu ada pemberitaan tentang aksi-aksi gerakan terorisme di negara-negara Eropa dan AS, Prancis, Irak, Iran, Israel, India, Pakistan, Turki, dan lain-lain.

Fenomena radikalisme global ini, seakan-akan tumbuh dan berkembang di kalangan warga negara yang melintasi batas negara-negara. Contoh di Indonesia peledakan Hotel Mariot, peledakan bom bunuh diri di pantai Kuta Bali dsb. Di negara AS peledakan gedung WTC dan gedung militer Pentagon AS. Rentetan ledakan bom bunuh diri maupun penabrakan pesawat di gedung WTC merupakan aksi yang dilakukan oleh kelompok teroris dari jaringan Alqaeda dan ISIS. Di Indonesia dibawa masuk oleh Dr. Azhari kewarganegaraan Malaysia dan Noordin M. Top Warga negara Malaysia yang merekrut kelompok Imam Samudra dkk., kelompok Santoso di Palu, dan lain-lain.

Bahkan, terakhir kelompok gerakan teroris yang tertangkap densus 88 di daerah Kabupaten Pohuwato sejumlah 7 orang asal Gorontalo. Dengan fakta-fakta tentang perjalanan gerakan terorisme di Indonesia bahkan masuk kewilayah Kabupaten Pohuwato membuat warga masyarakat di daerah Serambi Madinah ini merasa terusik ketenangan warganya. Artinya bila hal ini diabaikan oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo akan menjadi masalah kemanusiaan dan masalah gangguan keamanan. Dan hal ini akan berdampak kepada stabilitas ekonomi di daerah ini. Artinya wisatawan baik manca negara maupun nasional dan lokal akan takut memasuki tempat wisata yang ada di daerah Provinsi Gorontalo. kondisi ini akan merugikan daerah dilihat dari pendapatan dari sektor pariwisata. Pengaruh tertangkapnya anggota teroris ini akan berdampak kepada sumber pendapatan daerah yang saat ini pemerintah daerah sangat giat menggenjot PADnya bersumber dari sektor Pariwisata.

Tertangkapnya kelompok teroris di daerah Kabupaten Pohuwato, membuktikan adanya hubungan pernyataan BNPT dan survei yang dilakukan pada tahun 2018 setelah kepala BNPT mensinyalir bahwa ada lima daerah rawan berkembangnya paham radikalisme di Indonesia. lima daerah tersebut disebutkan Provinsi Aceh dengan Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya. Dengan demikian penangkapan tujuh anggota kelompok teroris di Kabupaten Pohuwato memberi isyarat kepada pemerintah daerah Provinsi Gorontalo agar lebih intensif dalam menyosialisasikan ancaman paham radikalisme negatif kepada generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo.

Dengan fakta-fakta di atas sudah saatnya kita waspada akan bahaya laten berkembangnya paham radikalisme negatif dengan wujud kegiatan dalam bentuk aksi bom bunuh diri atau

sabotase dan perampokan tokoh-tokoh yang ada di daerah Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil interogasi kepada ketujuh kelompok teroris asal Gorontalo, target yang akan mereka lakukan dengan membunuh aparat dan merampok tokoh yang ada di Gorontalo. Dengan hasil interogasi tersebut membuat warga masyarakat di daerah Gorontalo menjadi resah. Untuk membuktikan bahwa fakta bahwa gerakan radikalisme telah merasuki alam pikiran generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo. Kami melakukan riset pada kelompok rentan dan potensial di dalam menyebarkan sel gerakan radikalisme negatif yang berwujud kelompok teroris. Hasil riset yang kami lakukan telah menjawab generasi muda kita telah terpapar ideologi radikalisme.

Fakta-fakta ini dapat kita lihat di bawah ini sebagai berikut berdasarkan hasil penelitian tentang fenomena radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut.

A. Pengetahuan Generasi Muda terhadap Paham Ideologi Radikalisme

Bila dilihat dari hasil survei pada responden penelitian di kalangan generasi muda menunjukkan masih banyak generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo tidak mengetahui ideologi radikalisme khususnya tentang gerakan ISIS, teroris, dan ideologi komunis. Sehingga kurangnya pengetahuan generasi muda di daerah Gorontalo sikap responden memilih sikap ragu-ragu dan tidak setuju bila gerakan radikalisme dinyatakan sebagai sebuah gerakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, bahkan sikap responden membenarkan apa yang menjadi tujuan kegiatan radikalisme tersebut.

Data pengetahuan generasi muda terhadap paham radikalisme akan menjadi pintu masuk terpaparnya generasi muda terhadap paham radikalisme. Gejala awal ini harus menjadi perhatian bagi kita. Ketidaktahuan akan ideologi radikalisme di kalangan generasi muda merupakan suatu pertanda bahwa pemerintah daerah dan lembaga pendidikan formal seperti perguruan tinggi, belum menyentuh sosialisasi akan ideologi radikalisme tersebut. Kajian-kajian gerakan radikalisme hanya ada pada organisasi keagamaan yang dianggap berbahaya dalam menyuburkan paham radikalisme seperti HTI, organisasi FPI dan mungkin generasi muda lebih banyak mengakses *Google* dan *YouTube*. Dengan kurangnya pembahasan melalui kurikulum sekolah tentang radikalisme, membuat generasi muda kita terpapar akan radikalisme negatif. Seperti gerakan teroris dan menjadi simpatisan dari organisasi ISIS (*Islamic State Irak dan Surya*). Bahkan ada yang setuju bila organisasi partai PKI dihidupkan kembali di Indonesia.

B. Pemahaman Generasi Muda terhadap Paham Ideologi Radikalisme

Pemahaman generasi muda akan paham radikalisme sangat minim sehingga hasil survei menunjukkan masih ada generasi muda kita khususnya generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo yang tidak dapat membedakan apakah gerakan radikalisme tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau justru sikap generasi muda bersimpatik pada gerakan radikalisme tersebut adalah sesuai dengan keyakinan fundamentalis yang mereka anut. Hasil survei tersebut menunjukkan bila pengetahuan generasi muda kita kurang mengetahui ideologi radikalisme sudah tentu pemahamannya

pada ideologi radikalisme pun rendah. Dan kondisi ini dapat membahayakan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo. Sikap tidak tahu dan ragu-ragu pada opsi angket dimaknai ketidakpahaman generasi muda akan ideologi radikalisme tersebut.

Keraguan generasi muda terhadap ideologi radikalisme pada opsi angket menunjukkan kerawanan akan terpaparnya generasi muda pada paham radikalisme. Karena bila sikap ragu-ragu yang menjadi pilihan generasi muda, menunjukkan bahwa mereka masih dapat dipengaruhi oleh kelompok teroris, ISIS atau PKI ketika mereka bertemu dengan kelompok tersebut. Hasil survei ini akan menjadi pijakan pemerintah daerah dan Perguruan Tinggi untuk lebih intensif di dalam menyosialisasikan bahaya laten paham radikalisme negatif. Jangan sampai generasi muda kita lebih percaya kepada kelompok teroris dan organisasi ISIS atau PKI ketimbang sosialisasi dari pemerintah. Untuk lembaga pendidikan yang harus dilakukan adalah memasukan kurikulum ideologi radikalisme dalam setiap mata pelajaran atau mata kuliah di perguruan tinggi.

Membebaskan paham radikalisme di kalangan generasi muda bukan pekerjaan yang gampang, mengapa karena pengaruh ideologi sangat kuat bila itu telah menjadi keyakinannya. Faktanya sekalipun Usamah bin Laden pentolan Alqaeda dan Muktar Albagdadi Pentolan ISIS telah mati tertembak oleh tentara Amerika, namun paham tersebut berkembang pesat kepada simpatisan yang berpartisipasi untuk melakukan bom bunuh diri. Padahal kita lihat banyak pasien di rumah sakit, berjuang untuk ingin sembuh dan mempertahankan hidup. Di luar sana kelompok teroris justru lebih suka membawa bom lalu meledakkannya di tengah kerumunan orang banyak. Ini sesuatu yang sangat ironis. Ada

orang yang bersedia mati dalam melaksanakan misi organisasi ISIS dan Alqaeda.

Anomali kepada hak hidup ini sangat kontroversial dengan kondisi normal apa yang dilakukan oleh kelompok ideologis ISIS dan Teroris. Sehingga itu kelompok ini ditakuti oleh tentara di mana pun di dunia ini termasuk militer negara super power Amerika Serikat. Kehadiran kelompok ideologis ISIS dan teroris merupakan hantu yang menakutkan semua negara. Sehingga menghilangkan paham radikalisme negatif di kalangan generasi muda pun harus dilakukan secara sistematis. Jangan dilakukan dengan cara sistem pemadam kebakaran. Artinya nanti sudah terjadi bom bunuh diri disuatu tempat baru pemerintah daerah dan kepolisian, TNI bergerak. Kejahatan ideologis ISIS dan teroris merupakan musuh yang tidak terlihat. Sama ketika kita menghadapi covid-19 yang memporak porandakan ekonomi dunia dan jutaan manusia kehilangan nyawa. Demikian juga dengan menghadapi kelompok kejahatan ideologis ISIS dan teroris. Kelompok ideologis ISIS dan Teroris pada saat kita berada ditempat fasilitas umum misalnya dibandar udara, di Hotel tiba-tiba ada ledakan bom. Ternyata bom itu berasal dari kelompok teroris yang meledakkan dirinya bersama bom tersebut. Apa yang bisa dilakukan oleh polisi tersangkanya sudah mati bersama bom tersebut. Sehingga melihat fenomena kejahatan ideologis radikalisme negatif sangat menakutkan semua penduduk dunia. Apa yang terjadi kepada bom bunuh diri sebelum dia meledakan dirinya berpesan melalui rekamannya, bahwa dia melaksanakan misi jihad dan bagi mereka kematian ini sebagai pintu menuju surga karena melaksanakan tugas suci jihad.

Di sinilah yang menarik bagi kita sebagai pemerhati sosial akan adanya kejahatan ideologis ISIS dan teroris. Apa yang harus kita lakukan supaya generasi muda kita tidak mati sia-sia

dipengaruhi ideologi radikalisme yang digagas oleh ISIS dan Alqaeda.

C. Ketaatan Generasi Muda pada Paham Radikalisme

Berdasarkan hasil survei tentang fenomena radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo dengan pertanyaan penelitian yang melihat sikap mereka apakah mau meninggalkan sikap simpatik mereka kepada kegiatan radikalisme atau melanjutkan dukungan mereka kepada ideologi radikal. Ternyata tingkat ketaatan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo masih ada dari beberapa responden yang tidak mau meninggalkan pemikirannya terhadap ideologi radikalisme yang diperoleh informasinya dari media sosial atau dari kelompok orang yang telah tergabung dalam kelompok radikal tersebut.

Sangat menarik jawaban responden penelitian di atas yang menunjukkan bahwa ada responden yang tidak akan meninggalkan keyakinannya terhadap paham radikalisme. ini menunjukkan dari tingkat pengetahuan, pemahaman dan indikator rawan tentang ketaatan kepada ajaran radikalisme negatif sangat berbahaya. Bila gejala pada indikator ketaatan yang terjadi kepada generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo dipilih opsi ini. Dengan pilihan opsi ketaatan pada paham radikalisme negatif oleh generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo melalui hasil riset. Menunjukkan sudah saatnya pemerintah daerah dan lembaga pendidikan formal merubah *mainset* generasi muda yang telah terpapar paham radikalisme. Jangan sampai sel ini menjadi membesar dan akhirnya dari pengetahuan dan pemahaman berubah menjadi tindakan gerakan teroris sebagai sebuah bentuk ketaatannya akan paham radikalisme negatif. Sehingga itu penanganan

teroris jangan dilakukan dengan cara seperti sistem pemadam kebakaran, tetapi sedini mungkin pemerintah daerah dan lembaga pendidikan formal melakukan terobosan dalam menghalangi tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme di kalangan generasi muda di Provinsi Gorontalo.

D. Rekomendasi pada Potensi Radikalisme di Kalangan Generasi Muda di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang fenomena radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo di atas dapat disikapi dengan rekomendasi penelitian sebagai berikut.

1. Kurangnya pengetahuan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo pada paham radikalisme mengharuskan kepada pemerintah daerah melakukan aksi preventif dengan cara memberikan sosialisasi kepada generasi muda mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai ditingkat desa dan kelurahan. Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan akan pembenaran generasi muda kita kepada bentuk gerakan radikalisme yang mereka peroleh informasi melalui media sosial maupun dari kelompok orang yang mengajak mereka bergabung dengan kelompok radikal.
2. Pemahaman generasi muda tentang radikalisme yang sempit harus disikapi pemerintah daerah dengan memasukan materi dalam kurikulum sekolah dasar maupun perguruan tinggi tentang bahaya laten paham radikalisme di kalangan generasi muda sebagai pemimpin masa depan. Melalui intervensi kurikulum pemerintah daerah dapat mengatasi masuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda kita khususnya di daerah Provinsi Gorontalo.

3. Berdasarkan hasil survei tentang fenomena radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo menunjukkan fakta ternyata tingkat ketaatan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo masih ada dari beberapa responden yang tidak mau meninggalkan pemikirannya terhadap ideologi radikalisme yang diperoleh informasinya dari media sosial atau dari kelompok orang yang telah tergabung dalam kelompok radikal tersebut. Hal ini harus disikapi pemerintah daerah dengan melakukan upaya pencegahan dengan cara program deradikalisasi kepada generasi muda yang terindikasi pemikirannya telah mengarah kepada bentuk dukungannya pada gerakan radikalisme.

Dalam mewaspadaikan masuknya aliran ideologi radikalisme di Indonesia, maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut.

1. Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar.

Hal pertama yang dilakukan untuk mencegah paham radikalisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan harusnya sangat diperkenankan kepada siapa pun terutama pada generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Dalam hal ini memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan pondasi penting terkait perilaku, sikap dan juga keyakinannya kepada Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenankan secara baik dan benar, dalam artian haruslah seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Sedemikian hingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang.

2. Memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar.
Hal kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme ialah menanamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Pemahaman pengetahuan dilakukan dengan memperkenalkan ilmu umum dengan ilmu agama kepada generasi muda supaya mereka tidak akan goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme sekaligus tindakan dan tidak menjadi penyebab lunturnya *Bhineka Tunggal Ika* kepada generasi muda Indonesia.
3. Meminimalisasi kesenjangan sosial.
Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya paham radikalisme. Dengan demikian, untuk mengatasi paham radikalisme di kalangan generasi muda adalah dengan menghilangkan *gap* kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Kesenjangan sosial merupakan lahan yang subur bangkitnya paham radikalisme di masyarakat.
4. Menjaga persatuan dan kesatuan.
Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan radikalisme di kalangan masyarakat terlebih ditingkat negara. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan salah satu yang bisa di dalam kasus Indonesia adalah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

dan nilai-nilai semboyan *Bhineka Tunggal Ika* kepada generasi muda.

5. Mendukung aksi perdamaian.

Mendukung aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan agar tidak terjadi. Walaupun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun, apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan dapat berawal dari munculnya pemahaman radikalisme yang sifatnya baru berbeda dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah agar radikalisme tidak terjadi yakni dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan oleh negara, pemerintah, ormas, maupun perorangan.

6. Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme negatif kepada aparat.

Peranan yang dilakukan di sini adalah ditekankan pada masyarakat untuk memberikan laporan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul gerakan radikalisme ditempat tinggal anda entah itu tindakan radikal yang berskala kecil maupun tindakan radikal yang berskala besar. Contohnya, apabila muncul pemahaman pemahaman baru tentang keagamaan dimasyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang dilakukan agar pemahaman radikalisme tidak menyebar luas pada masyarakat adalah melaporkan atau berkonsultasi dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan upaya tersebut akan dilakukan tindakan pencegahan awal masuknya paham radikalisme di kalangan generasi muda di lingkungan masyarakat.

7. Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan.
Meningkatkan pemahaman untuk hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan meningkatkan pemahaman ini adalah terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman. Dengan kesadaran ini akan memunculkan sikap toleransi dan rasa solidaritas di dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman ini akan memunculkan terhadap ajakan dalam melakukan aksi radikal yang akan merugikan kepentingan umum dan kepentingan diri sendiri. Aksi radikal tidak hanya merugikan kepentingan pribadi namun akan merugikan kepentingan banyak orang. Dengan kesadaran ini akan dapat menolak semua paham radikal yang akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.
8. Menyaring informasi yang didapatkan.
Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme di kalangan generasi muda. Informasi yang didapatkan melalui media sosial maupun dari orang yang dianggap tidak anda kenal tidak selalu benar. Kebenaran dari informasi yang diterima harus ditanyakan kepada seseorang yang dianggap lebih paham apa yang anda dapatkan. Tindakan tersebut dapat menghindari paham radikalisme masuk dalam alam pemikiran generasi muda.
9. Ikut aktif menyosialisasikan radikalisme.
Menyosialisasikan di sini memiliki makna agar pemerintah dan mereka yang memahami tentang ajaran radikalisme yang sesat itu kepada masyarakat. Tindakan sosialisasi bisa dilakukan di mana saja apakah lewat media massa atau

sosialisasi lewat pendidikan formal, informal, dan pendidikan nonformal. Semakin banyak yang mengetahui ancaman radikalisme di kalangan masyarakat akan meminimalisasi paham radikalisme di kalangan generasi muda.

Bahaya aliran radikal di kalangan generasi muda sangat perlu dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Deteksi dini tersebut dilakukan oleh tim pengkaji masuknya bahaya laten ideologi radikalisme masuk kewilayah Provinsi Gorontalo itu dilakukan oleh kepolisian di daerah dan TNI. Namun, perguruan tinggi sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan dalam pembentukan karakter anak bangsa, harus mampu memberikan kontribusi melalui riset dalam mengungkap tentang fenomena aliran ideologi radikalisme di kalangan generasi muda yang ada di daerah Provinsi Gorontalo. Target generasi muda yang dilakukan oleh peneliti mulai dari kalangan mahasiswa dari lima Kabupaten dengan satu kota yang semua ini sementara menuntut ilmunya di Perguruan Tinggi di Gorontalo. Bila di kalangan mahasiswa Gorontalo ditemukan adanya kerawanan dalam keikutsertaan aliran radikalisme akan dijadikan sebagai bahan untuk melakukan deradikalisasi terhadap fenomena tersebut. Namun, dalam kajian objek penelitian ini dapat diduga mahasiswa sebagai perwakilan generasi muda terpelajar tidak akan mungkin terlibat dalam aliran radikalisme. Namun, tidak menutup kemungkinan ada kalangan mahasiswa yang dapat berpotensi menjadi pendukung dari aliran radikal tersebut. Dukungan terhadap aliran radikalisme merupakan awal dari potensi radikal di kalangan generasi muda. Dalam *output* riset inilah digunakan untuk mendeteksi sejak dini masuknya paham ideologi radikalisme di kalangan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo.

Bila hasil riset ini menunjukkan generasi muda di daerah Provinsi Gorontalo sangat tangguh dalam menghadapi fenomena aliran paham ideologi radikalisme ini berarti pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi kinerjanya sangat positif dalam membentuk karakter anak bangsa untuk tidak terlibat dalam gerakan radikal tersebut. Sebaliknya, bila hasil riset menunjukkan rawan atau kurang tangguh ini menunjukkan pemerintah dan perguruan tinggi dan semua yang terlibat dalam memberikan sosialisasi dilembaga formal pendidikan harus bahu membahu memperbaiki kebijakan pendidikan melalui perubahan kurikulum tentang bahaya laten radikalisme di kalangan lembaga pendidikan formal harus dilakukan perbaikan. Mengapa ini dilakukan karena tanpa sentuhan melalui kurikulum ditingkatan pendidikan formal, kerawanan ideologi radikalisme akan dapat diminimalisasi pengaruhnya pada kalangan generasi muda di daerah Gorontalo.

Daftar Pustaka

- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Granit
- Bangun, P. (1998). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UKI.
- Kaelan. (2015). *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso, T. (2002). *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Shively, W. P. (1987). *Power and Choice: An Introduction to Political Science*. New York : Random House.
- Suryadinata, L. (2003). *Penduduk Indonesia, Etnis, dan Agama dalam Era Perubahan Politik*. Jakarta: LP3S.
- Susan, N. (2012). *Negara Gagal Mengelola Konflik Demokrasi dan tata kelola Konflik di Indonesia*. Pustaka Pelajar.



Tentang Penulis

Penulis buku ini bernama Roni Lukum, S.Pd., M.Src., dengan nomor induk pegawai (NIP) 197303232000031002. Jabatan fungsional penulis adalah Lektor Kepala, pangkat IV B. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di STKIP Gorontalo Prodi PPKn, serta S-2 di UGM Ketahanan Nasional. Saat ini, penulis ditugaskan di Universitas Negeri Gorontalo.

Penulisan buku ini dilakukan demi memenuhi kewajiban dosen dalam melakukan kajian ilmiah sehubungan dengan kualifikasi keilmuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, melalui kualifikasi keilmuan penulis menyampaikan peta jalan atau *roadmap* riwayat penulisan karya ilmiah yang pernah dilakukan dalam menganalisis kondisi daerah dalam kaitannya melihat indeks ketahanan wilayah di daerah Provinsi Gorontalo.

Penulisan buku ini diilhami dari beberapa penelitian yang dilakukan secara tim dengan berfokus pada kajian multikulturalisme di daerah Provinsi Gorontalo. Buku pertama yang dihasilkan adalah buku tentang membangun multikulturalisme di daerah Kabupaten Pohuwato di Desa Banuroja Kecamatan Randangan pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis secara pribadi melakukan penelitian (masih dalam kajian multikulturalisme) tentang interaksi sosial antaretnis Arab dengan etnis lokal Gorontalo di Kota Gorontalo pada tahun 2016. Pada tahun 2017, kembali menulis hasil riset tentang membangun hubungan harmonis antaretnis Lokal Gorontalo dengan etnis Cina di Kota Gorontalo. Terakhir, meneliti tentang radikalisme di kalangan generasi muda di Provinsi Gorontalo pada tahun 2018.

Berdasarkan *roadmap* di atas, penulis melakukan riset tentang membangun hubungan harmonis antar etnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali demi mewujudkan negara multikulturalisme di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Hasil riset tersebut dikembangkan menjadi buku refrensi dengan judul:

1. *Membangun Tradisi Multikulturalisme di Indonesia dalam Perspektif Ketahanan Nasional;*

2. *Membangun Tradisi Multikulturalisme di Provinsi Gorontalo dalam Kajian Perspektif Ketahanan Nasional.*

Tujuan penulisan buku ini ditujukan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dan pemerintah pusat bagaimana membangun keharmonisan bagi daerah-daerah yang terdiri dari multietnis, multiras, multiagama dapat hidup rukun dalam suatu wilayah. Berdasarkan hasil riset pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dapat mewujudkan harapan membangun daerah dengan model multikulturalisme di dalam mewujudkan keharmonisan antaretnis. Buktinya, hingga saat ini daerah Provinsi Gorontalo kehidupan warga masyarakatnya yang berbeda tradisi, berbeda agama, berbeda ras, berbeda pilihan politik dapat hidup berdampingan tenteram dan damai hingga saat ini. Substansi yang ada dalam buku ini lebih banyak mendeskripsikan tentang kehidupan warga masyarakat Gorontalo yang sangat toleran dalam menjalankan negara multikulturalisme. Semoga prestasi membangun multikulturalisme di daerah Provinsi Gorontalo dapat dipertahankan di dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi untuk kembali menyosialisasikan keilmuan, penulis dan tim menuliskan buku yang bertujuan membangun kesadaran generasi muda akan bahaya laten paham radikalisme negatif dengan judul *Radikalisme dan Stabilitas Daerah di Provinsi Gorontalo: Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Generasi Muda dari Ancaman Paham Radikalisme*. Buku ini ditujukan untuk membantu pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam menanggulangi terpaparnya generasi muda di Provinsi Gorontalo terpapar akan paham ideologi radikalisme.